

**RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO DALAM MEMBANGUN
LEGITIMASI DEMOKRASI TERPIMPIN (1959–1966)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Ardian Widi
NIM 212104040031
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

**RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO DALAM MEMBANGUN
LEGITIMASI DEMOKRASI TERPIMPIN (1959–1966)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO DALAM MEMBANGUN
LEGITIMASI DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing,
J E M B E R

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Al Oautsar Pratama'.

M. AL OAUTSAR PRATAMA, S.Pd., M.Hum.
NIP. 199404152020121005

RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO DALAM MEMBANGUN
LEGITIMASI DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

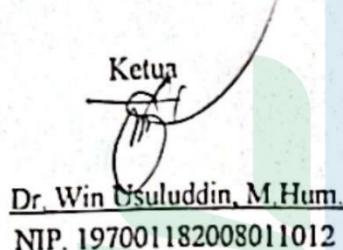
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Senin

Tanggal: 29 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. Win Ushuluddin, M.Hum.
NIP. 197001182008011012

Sekretaris


Sitti Zulaiha, M.A.
NIP. 198908202019032011

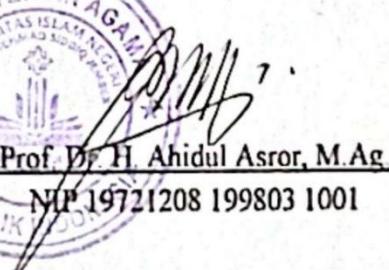
Anggota:

1. Dr. H Amin Fadillah, SQ., M.A.
2. M. Al Qautsar Pratama, S.Pd., M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.

NIP. 19721208 199803 1001

MOTTO

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

Artinya:

“Sesungguhnya sebagian dari retorika itu adalah (bagaikan) sihir.¹”
(HR. Bukhari dan Muslim)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah (dalam sebagian penomoran: Kitab al-Adab), Hadis no. 5767 (penomoran Fath al-Bari juga menyebut no. 5146)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Almamater tercinta Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta para akademisi Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia, khususnya yang konsen atas tema Retorika Persuasif Soekarno Dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nyalah, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa. Terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Dr. Win Usuluddin, M.Hum atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing M. Al Qautsar Pratama, S.pd. M.Hum. yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasinya penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu- ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Selanjutnya kepada kedua orang tua, Bapak Abdul Wafii dan Ibu Wiwik Handayani yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Roni Ali Rahman S.Hum., teman sejawat yang kian membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk seseorang yang pernah bersama saya dan tidak bisa saya sebut Namanya. Terimakasih untuk patah hatinya yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda memberikan cukup motivasi

untuk terus maju dan berproses untuk menjadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah swt. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 26 Oktober 2025

Penulis

Muhammad Ardian Widi
NIM 212104040031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Ardian Widi. 2025. *Retorika Persuasif Soekarno Dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)*

Kata Kunci: Soekarno, Retorika, Legitimasi, Demokrasi Terpimpin

Penelitian ini mengkaji bagaimana retorika persuasif Soekarno berperan dalam membangun legitimasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), sebuah periode ketika Indonesia mengalami pergeseran sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menuju kepemimpinan terpusat.

Fokus penelitian ini adalah 1. Apa yang melatar-belakangi dibentuknya demokrasi terpimpin dalam pengaruhnya terhadap Indonesia?. 2. Bagaimana pengaruh retorika persuasif Soekarno terhadap dinamika politik Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)? Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis apa yang melatar belakangi dibentuknya demokrasi terpimpin dalam pengaruhnya terhadap Indonesia. 2. Menganalisis pengaruh retorika persuasif Soekarno dinamika politik Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin 1959-1966.

Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan menggunakan naskah pidato Soekarno sebagai sumber primer serta literatur akademik dan penelitian terdahulu sebagai sumber sekunder.

Dapat disimpulkan bahwa lahirnya Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi oleh kondisi ketidakstabilan politik, kegagalan Demokrasi Liberal, serta fragmentasi partai yang dianggap menghambat jalannya revolusi dan persatuan nasional. Dalam konteks ini, Demokrasi Terpimpin menjadi upaya Soekarno untuk mengonsolidasikan kekuasaan negara, memperkuat peran presiden, dan mengarahkan kehidupan politik Indonesia sesuai dengan ideologi nasionalisme, revolusi, dan anti-imperialisme. Sejalan dengan itu, retorika persuasif Soekarno memainkan peran sentral dalam dinamika politik era 1959–1966, tidak hanya sebagai alat komunikasi politik, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi massa, legitimasi kekuasaan, dan pembentukan kesadaran ideologis rakyat. Melalui bahasa yang karismatik, emosional, dan simbolik, Soekarno mampu mempengaruhi arah kebijakan politik, memperkuat dukungan publik, serta menjaga kohesi nasional di tengah berbagai tantangan politik dan krisis. Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin dan retorika Soekarno saling terkait erat sebagai instrumen strategis dalam membentuk arah politik dan ideologi Indonesia pada masa tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Studi Terdahulu..... | 8 |
| A. Kerangka Konseptual | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 31 |
| H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 52 |
| BAB II KONDISI INDONESIA PRA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA | 54 |

| | |
|---|------------|
| A. Pra Demokrasi Terpimpin (Parlementer/Liberal) 1945-1958 | 54 |
| B. Demokrasi Terpimpin | 62 |
| C. Dampak Demokrasi Terpimpin terhadap Arah Politik Nasional | 74 |
| BAB III PENGARUH RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO TERHADAP DINAMIKA POLITIK INDONESIA SELAMA ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)..... | 79 |
| A. Karakter Kepemimpinan Soekarno | 79 |
| B. Pola Retorika Persuasif Soekarno Melalui Pidato-Pidatonya | 90 |
| C. Dampak Retorika Soekarno Melalui Pidato dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin..... | 122 |
| BAB IV PENUTUP | 128 |
| A. Kesimpulan | 128 |
| B. Saran..... | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | 131 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 135 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Retorika telah menjadi alat penting dalam sejarah politik dan kepemimpinan di berbagai belahan dunia. Sejak era klasik Yunani hingga masa modern, retorika menjadi medium utama dalam membangun legitimasi kekuasaan dan memobilisasi dukungan rakyat. Para pemimpin politik memahami betul bahwa kemampuan berbicara tidak hanya soal keindahan kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana membentuk kesadaran kolektif, mempengaruhi opini publik, dan merumuskan arah politik sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan tradisi lisan, retorika memiliki posisi yang sangat signifikan. Kebudayaan Indonesia, yang dibangun atas dasar nilai gotong royong dan komunikasi antarwarga, menjadikan orasi dan pidato publik sebagai salah satu sarana strategis dalam membangun konsensus sosial dan politik².

Pasca kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menentukan bentuk dan arah sistem politik yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sistem Demokrasi Parlementer yang diterapkan pada periode 1950–1959 mencerminkan semangat demokrasi modern dan pluralisme politik. Namun, realitasnya, sistem ini justru menghadirkan instabilitas politik yang berkepanjangan. Kabinet yang silih berganti dalam waktu singkat, persaingan antarpertai yang sengit, dan konflik ideologi yang tidak kunjung selesai menjadi gambaran nyata bagaimana Demokrasi Parlementer gagal memberikan stabilitas

² M. D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984). hal. 7.

dan kesejahteraan bagi rakyat. Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan elite politik maupun masyarakat luas, dan membuka peluang bagi munculnya alternatif sistem pemerintahan yang dinilai lebih stabil dan sesuai dengan kondisi Indonesia³.

Dalam konteks inilah muncul gagasan tentang Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Langkah ini sekaligus menandai awal era Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan presiden sebagai pemimpin utama yang tidak hanya simbolik, tetapi juga sebagai pengarah utama kebijakan nasional. Demokrasi Terpimpin dirumuskan sebagai sistem yang, menurut Soekarno, lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kepemimpinan kolektif⁴. Namun, perubahan sistem pemerintahan ini tentu tidak terlepas dari upaya untuk membangun legitimasi di mata rakyat dan elite politik. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal memiliki kemampuan orasi yang luar biasa, Soekarno memanfaatkan retorika sebagai instrumen utama dalam meneguhkan posisi kepemimpinannya. Pidato-pidato Soekarno di berbagai kesempatan menjadi sarana untuk meyakinkan rakyat bahwa Demokrasi Terpimpin adalah jalan keluar dari kebuntuan politik dan jalan menuju tercapainya cita-cita Revolusi Nasional. Retorika Soekarno tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi politik, tetapi juga

³ M. D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984). 11.

⁴ H. Indrajat, “Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi,” (*SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 18, no. 1 (2016): 53-62.

sebagai alat untuk membangun narasi besar tentang Indonesia sebagai bangsa pejuang yang berdaulat dan merdeka.

Terdapat beberapa unsur penting dalam retorika Soekarno yang menjadikannya begitu efektif dan memikat. Pertama, Soekarno sering menggunakan bahasa yang membumi dan dekat dengan keseharian rakyat. Ia piawai merangkai kata-kata yang penuh semangat dan sarat makna, seringkali diselingi dengan idiom-idiom lokal dan simbolisme nasional yang kuat. Kedua, retorika Soekarno kerap memadukan antara konteks nasional dan global. Ia tidak hanya bicara tentang persoalan Indonesia, tetapi juga mengaitkannya dengan perjuangan bangsa-bangsa lain yang melawan imperialisme dan kolonialisme. Hal ini membuat pidatonya memiliki daya tarik yang melampaui batas-batas domestik. Ketiga, retorika Soekarno juga sangat adaptif. Ia mampu membaca situasi dan menyesuaikan narasi pidatonya sesuai dengan konteks audiens dan momentum tertentu.⁵

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, retorika persuasif Soekarno memiliki beberapa fungsi utama. Ia digunakan untuk mendeligitimasi sistem parlementer yang dianggap tidak cocok dengan kondisi bangsa. Soekarno sering menekankan bahwa Demokrasi Parlementer lebih banyak melahirkan konflik kepentingan partai yang pada akhirnya merugikan rakyat. Dengan retorikanya, Soekarno mengarahkan opini publik untuk memandang Demokrasi Terpimpin sebagai sistem yang lebih “asli” dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, retorika Soekarno juga menjadi sarana untuk membangun narasi persatuan nasional.

⁵ K. I. Damanik et al., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 90

Melalui konsep “persatuan revolusioner” dan “Nasakom” (Nasionalis, Agama, Komunis), Soekarno berusaha menjembatani perbedaan ideologi yang ada di Indonesia. Retorika ini menegaskan bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita Revolusi Nasional dapat tercapai⁶.

Retorika Persuasif Soekarno juga memainkan peran penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan pribadinya. Soekarno memposisikan dirinya sebagai Bapak Bangsa yang menjadi simbol pemersatu di tengah fragmentasi politik. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno menampilkan dirinya sebagai pengawal Revolusi dan penyelamat bangsa dari kebuntuan politik. Hal ini menjadi salah satu kunci mengapa kepemimpinannya mendapat legitimasi yang kuat, meskipun secara praktis banyak terjadi pengurangan ruang demokrasi dalam era Demokrasi Terpimpin⁷.

Fenomena retorika persuasif Soekarno dalam konteks Demokrasi Terpimpin ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dari perspektif sejarah. Kebanyakan kajian mengenai era ini lebih banyak berfokus pada aspek struktural, seperti dinamika militer, peran partai politik, dan kebijakan ekonomi. Sementara itu, peran bahasa dan retorika dalam membentuk legitimasi politik belum banyak disentuh secara mendalam. Padahal, retorika menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana rakyat dan elite politik menerima dan mendukung konsep Demokrasi Terpimpin.

⁶ H. Indrajat, “Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi,” (*SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*) Vol 18, no. 1 (2016): 53-62.

⁷ K. I. Damanik et al., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 90

Dengan demikian, penelitian mengenai retorika persuasif Soekarno dalam membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk mengungkap bagaimana kata-kata dan simbol-simbol yang digunakan Soekarno menjadi instrumen kekuasaan yang efektif. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana retorika tersebut berdampak pada persepsi publik dan dinamika sosial-politik Indonesia pada masa itu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan kajian sejarah dengan analisis wacana kritis, sehingga diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan mengenai Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Pada bagian ini akan dicantumkan semua fokus permasalahan yang dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya demokrasi terpimpin dalam pengaruhnya terhadap Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh retorika persuasif Soekarno terhadap dinamika politik Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan ini harus mengacu pada masalah - masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk

menjawab dan menganalisis masalah-masalah yang telah dirumuskan retorika persuasif yang digunakan oleh Soekarno dalam pidato-pidatonya selama masa Demokrasi Terpimpin. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apa yang melatar belakangi dibentuknya demokrasi terpimpin dalam pengaruhnya terhadap Indonesia?
2. Menganalisis pengaruh retorika persuasif Soekarno dinamika politik Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin 1959-1966?.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh aspek spasial dan temporal untuk memastikan pembahasan tetap relevan dengan konteks permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, peneliti menetapkan batasan-batasan spasial dan temporal sebagai berikut:

1. Temporal

Secara temporal dibatasi pada periode 1959 hingga 1966, yaitu masa berlangsungnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga runtuhan kekuasaan Soekarno pada 1966. Ruang lingkup ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan kajian pada konteks sosial-politik yang khas pada era tersebut, ketika Soekarno memimpin Indonesia dengan sistem yang menekankan kepemimpinan terpusat dan menempatkan dirinya sebagai poros utama kekuasaan politik.

2. Spasial

Sedangkan secara spasial penelitian ini difokuskan pada wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan negara yang dipimpin oleh Soekarno, khususnya dalam konteks nasional di mana pidato-pidato politiknya disampaikan untuk membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin. Meski demikian, ruang lingkup spasial ini juga mempertimbangkan dinamika interaksi antara pusat kekuasaan politik di Jakarta dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang menjadi sasaran utama retorika persuasif Soekarno. Dengan demikian, penelitian ini mencakup bagaimana retorika Soekarno meresonansi di tingkat nasional, termasuk dampaknya terhadap persepsi elite politik dan rakyat di berbagai daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dalam bentuk manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur ilmiah mengenai komunikasi politik, khususnya kajian tentang retorika persuasif dalam konteks sejarah politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966).
- b. Memberikan dasar pengetahuan dan kerangka analisis bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi yang relevan dalam mengkaji hubungan antara retorika politik dan legitimasi kekuasaan.
- c. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang tertarik pada dinamika kepemimpinan Soekarno, retorika politik, serta konstruksi legitimasi dalam sejarah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Soekarno menggunakan retorika persuasif sebagai instrumen untuk membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin, sekaligus menjadi pengalaman metodologis yang berharga dalam menganalisis komunikasi politik.

b. Bagi Lembaga

Menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca karya ilmiah ini, terutama bagi kalangan akademisi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya yang mendalami kajian sejarah politik Indonesia dan ilmu komunikasi.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi dan refleksi kritis bagi masyarakat Indonesia mengenai sejarah politik nasional, khususnya peran retorika dalam membentuk legitimasi kepemimpinan di era Demokrasi Terpimpin yang penuh dinamika

F. Studi Terdahulu

Pada bagian ini disajikan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta merangkum penelitian yang telah dan belum dipublikasikan, seperti skripsi, jurnal, dan lainnya. Langkah penting dalam melaksanakan penelitian adalah menemukan penelitian-penelitian

terdahulu guna memperoleh hasil yang relevan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) telah dilakukan oleh Ketut Sedana Arta dalam artikelnya di Jurnal Candra Sangkala. Arta menelusuri dinamika politik Indonesia yang menjadi latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin, terutama akibat ketidakstabilan politik masa Demokrasi Parlementer, pemberontakan PRRI dan Permesta, serta gagalnya Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru. Arta juga menekankan peran militer dan partai politik besar seperti PNI dan PKI dalam mendukung penerapan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno⁸. Penelitian Arta menunjukkan bagaimana kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat besar dalam sistem Demokrasi Terpimpin, dengan didukung oleh struktur negara yang dibentuk melalui pengangkatan langsung oleh presiden, serta penggunaan retorika persuasif dan simbolisme ideologi “Nasakom” untuk menguatkan legitimasi kepemimpinannya .
2. Dalam skripsi karya Adhi Makayasa Eruis Sipayung yang berjudul “Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959–1965”. Skripsi ini membahas bagaimana ideologi Marhaenisme yang digagas oleh Soekarno diimplementasikan dalam kebijakan hukum dan pemerintahan Indonesia selama periode Demokrasi Terpimpin (1959–

⁸ Ketut Sedana Arta, “Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966,” (Dalam Jurnal : *Candra Sangkala*) Vol. 4, No. 1 (2022), 1

1965)⁹. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif, serta menganalisis data dari dokumen, studi pustaka, dan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marhaenisme yang berlandaskan pada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menjadi dasar bagi Soekarno untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyer Mananda Setyahadi menyoroti dinamika konflik politik elite Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Studi ini berfokus pada bagaimana konflik internal maupun eksternal di tubuh TNI, terutama di antara pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mencerminkan kompleksitas politik militer di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Mulyer memaparkan bahwa perbedaan asal-usul para perwira (dari KNIL, PETA, dan laskar-laskar perjuangan) turut memengaruhi rivalitas internal di tubuh TNI¹⁰. Selain itu, konflik eksternal antara TNI dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta peran Soekarno dalam menjaga keseimbangan politik di antara kedua kekuatan ini, menjadi sorotan penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, didukung oleh teori konflik Maurice Duverger dan teori militer dari Samuel Huntington dan Amos Perlmutter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik internal di tubuh TNI, terutama antara

⁹ Adhi Makayasa Eruis Sipayung, *Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959–1965* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹⁰ Mulyer Mananda Setyahadi, “Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966),” *Jurnal Renaissance* 3, no. 1 (Mei 2018): 346–357.

Jenderal Nasution dan Letjen Achmad Yani, serta perbedaan sikap antar angkatan terhadap PKI, menyebabkan TNI terpecah dan tidak solid. Kondisi ini memungkinkan Soekarno untuk mempertahankan kontrolnya atas TNI dan memanfaatkan konflik elite TNI untuk menopang kekuasaannya di masa Demokrasi Terpimpin. Narasi ini menggambarkan bagaimana penelitian Mulyer Mananda Setyahadi memperkaya pemahaman tentang peran militer dan dinamika politik di era Demokrasi Terpimpin, yang sangat relevan untuk dijadikan pijakan dalam studi-studi terkait politik hukum, Marhaenisme, dan kepemimpinan Soekarno.

4. Artikel Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara yang berjudul “Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959-1965)” dan telah terbit di NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Vol. 2, no. 2 (2024): Penelitian ini menyoroti dinamika politik Nahdlatul Ulama (NU) pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan faktor-faktor yang mendorong NU untuk menerima konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah dan analisis politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dua faktor utama yang mendorong NU adalah (1) mengatasi ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan Soekarno, serta (2) mempertahankan dan memperluas posisi NU dalam pemerintahan dan politik nasional. Para peneliti menyoroti bagaimana NU memanfaatkan politik akomodatif dan strategi aliansi melalui Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) untuk

mengamankan peran strategis mereka¹¹. Penelitian ini menegaskan bahwa sikap pragmatis dan adaptif NU berhasil menghindarkan organisasi tersebut dari konflik frontal dengan pemerintah, sekaligus memperkuat posisi politiknya di masa Demokrasi Terpimpin.

5. Skripsi Moh Arif Arifin yang berjudul “Idham Chalid dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966 M” (Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2022): Penelitian yang dilakukan oleh Moh Arif Arifin mengkaji kiprah politik Idham Chalid dalam konteks Demokrasi Terpimpin pada masa Presiden Soekarno. Menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori peranan politik, skripsi ini menyoroti bagaimana Idham Chalid, sebagai salah satu tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU), mengambil sikap akomodatif terhadap gagasan Demokrasi Terpimpin. Idham Chalid mendukung sistem ini dengan tujuan mempertahankan posisi umat Islam dan NU di kancah politik nasional¹². Penelitian ini juga menelusuri bagaimana sikap dan langkah politik Idham Chalid menjadi penyeimbang antara kekuatan militer, Soekarno, dan PKI, sekaligus menjadi representasi kepentingan umat Islam. Penelitian sebelumnya yang dijadikan pijakan dalam skripsi ini antara lain adalah karya Ahmad Muhajir (Idham Chalid: Guru Politik Orang NU) yang membahas biografi dan sikap politik akomodatif Idham Chalid secara

¹¹ Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara, “Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959–1965),” *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 399–416.

¹² Moh Arif Arifin, *Idham Chalid dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966 M* (Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), vii–viii.

umum, serta skripsi Ahmad Zamroni (Pemikiran Idham Chalid Tentang Demokrasi Terpimpin di Indonesia) yang memfokuskan pada pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin namun tidak meneliti langkah-langkah politiknya secara detail. Selain itu, Atifatur Rohmah melalui skripsinya (Dinamika Sejarah Politik NU: Studi Tentang Hubungan NU dan Negara Pada Masa DR. KH. Idham Chalid Tahun 1956-1984 M) memberikan konteks yang lebih luas mengenai hubungan NU dan negara, tetapi tidak fokus pada masa Demokrasi Terpimpin. Terakhir, Rasyid Hidayatullah lewat skripsinya (Demokrasi Terpimpin Menurut KH Idham Chalid dalam Perspektif Fiqh Siyasah) hanya menganalisis konsep Demokrasi Terpimpin dari sudut pandang fikih siyasah, bukan pada aspek historis langkah politik Idham Chalid.

6. jurnal Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias yang berjudul “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin” (Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2, November 2017): Penelitian ini menganalisis pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin yang menjadi ciri khas era kepemimpinannya. Melalui pendekatan historis dan politis, penulis memetakan bagaimana konsep Demokrasi Terpimpin lahir dari keprihatinan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dianggap gagal menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat Indonesia¹³. Demokrasi Terpimpin, dalam pandangan Soekarno, merupakan konsep politik yang menekankan musyawarah mufakat dan

¹³ Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias, “Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (November 2017): 14–26.

kepemimpinan sentralistik yang berakar pada nilai-nilai tradisional Jawa. Penelitian ini juga menelusuri gagasan-gagasan utama yang menjadi fondasi konsep ini, termasuk ide tentang Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang dicetuskan Soekarno sebagai jalan untuk mempersatukan tiga kekuatan ideologis besar di Indonesia. Penulis jurnal ini menekankan bahwa meski Demokrasi Terpimpin di satu sisi menjadi alternatif atas ketidakstabilan politik masa demokrasi parlementer, pada praktiknya ia menjadi alat legitimasi bagi Soekarno untuk mengokohkan posisi politiknya. Akibatnya, Demokrasi Terpimpin justru memunculkan sentralisasi kekuasaan yang otoriter dan represif. Penelitian ini berkontribusi penting dalam memahami transformasi pemikiran Soekarno, sekaligus menjadi acuan bagi kajian yang lebih luas tentang ideologi, kepemimpinan, dan dinamika politik Indonesia di era Demokrasi Terpimpin.

| NO | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Ketut Sedana Arta, “Dinamika Politik Demokrasi Terpimpin” | Menjelaskan dinamika politik masa Demokrasi Terpimpin: ketidakstabilan parlementer, peran PNI, PKI, TNI, retorika dan | Fokus pada konteks politik dan retorika Soekarno, bukan retorika secara mendalam. | Mengakui peran retorika dan simbolisme Soekarno dalam memperkuat legitimasi Demokrasi |

| NO | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|---|--|--|
| | | simbolisme Soekarno. | | Terpimpin. |
| 2. | Adhi Makayasa Eruis Sipayung, “Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum” | Marhaenisme hanya menjadi dasar ideal kebijakan hukum, tidak terealisasi secara konkret. | Bahas implementasi Marhaenisme, bukan retorika Soekarno. | Marhaenisme menjadi bagian retorika Soekarno meski belum operasional. |
| 3. | Mulyer Mananda Setyahadi, “Konflik Politik Elite TNI” | Konflik internal dan eksternal TNI, digunakan Soekarno untuk mempertahankan kontrol. | Fokus TNI, bukan retorika Soekarno. | Soekarno memanfaatkan konflik (termasuk retorika) untuk legitimasi. |
| 4. | Ardi Tri Yuwono & Mustafa Basara, “Faktor Pendorong NU” | Faktor penerimaan NU atas Demokrasi Terpimpin: akomodasi politik & pragmatisme. | Fokus pada sikap NU, bukan retorika Soekarno. | Soekarno gunakan retorika Nasakom untuk rangkul NU. |

| NO | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|--|---|--|
| 5. | Moh Arif Arifin, “Idham Chalid dan Demokrasi Terpimpin” | Idham Chalid bersikap akomodatif, menjadi penyeimbang militer-Soekarno-PKI. | Bahas peran politik Idham Chalid, bukan retorika Soekarno. | Retorika Soekarno untuk penguatan legitimasi dan harmoni Islam-nasionalisme. |
| 6. | Gili Argenti & Dini Sri Istiningdias, “Pemikiran Politik Soekarno” | Konsep Demokrasi Terpimpin lahir dari kekecewaan Soekarno atas parlementer; mengakar pada budaya Jawa; Nasakom sebagai dasar ideologi. | Fokus pada pemikiran Soekarno, tidak fokus pada retorika persuasif. | Membedah konsep yang menjadi basis retorika persuasif Soekarno. |

Dalam penelitian berjudul *Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)*. Retorika persuasif Soekarno menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun dan mempertahankan legitimasi sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkannya

pada periode 1959–1966. Dengan kecakapan berpidato yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah perjuangan bangsa, Soekarno mampu mengubah narasi politik Indonesia menjadi sebuah panggung ideologis yang menekankan pentingnya kepemimpinan sentral, persatuan nasional, dan semangat revolusi yang terus hidup. Dalam berbagai pidatonya, Soekarno menempatkan dirinya sebagai simbol pemersatu bangsa, mengangkat nilai-nilai tradisional Indonesia seperti gotong royong dan musyawarah mufakat untuk menjustifikasi konsep kepemimpinan tunggal yang ia usung. Demokrasi Terpimpin, dalam retorika Soekarno, bukan hanya sebuah sistem politik, melainkan “demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa,” yang diyakini mampu menyelesaikan berbagai krisis politik dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Retorika Soekarno selalu menekankan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah jawaban atas kegagalan sistem demokrasi parlementer. Ia menyebut bahwa demokrasi parlementer yang diwarnai konflik elite dan pergantian kabinet yang terus-menerus telah menyebabkan instabilitas nasional. Dalam kerangka retorikanya, Soekarno berhasil memadukan narasi tentang “kegagalan masa lalu” dengan harapan baru: yaitu “revolusi belum selesai” yang hanya bisa dilanjutkan melalui kepemimpinan terpimpin. Simbolisme Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) menjadi bagian penting dalam retorika Soekarno untuk merangkul seluruh kekuatan politik besar Indonesia, sekaligus menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang inklusif dan visioner. Penggunaan retorika persuasif yang mengedepankan semangat persatuan dan “musuh bersama” (neokolonialisme dan

imperialisme) menjadi instrumen efektif untuk memobilisasi rakyat dan mengukuhkan kekuasaan negara. Lebih jauh, Soekarno memanfaatkan retorika anti-imperialisme yang merujuk pada pengalaman pahit masa kolonial. Ia selalu menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai karena “penindasan ekonomi dan politik” yang diwariskan kolonialisme harus dihapuskan sepenuhnya. Retorika semacam ini bukan hanya membangkitkan semangat nasionalisme, tetapi juga memupuk kesetiaan rakyat pada kepemimpinan Soekarno¹⁴.

A. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah dalam penelitian tentang Retorika persuasif Soekarno menjadi kunci utama dalam memahami bagaimana legitimasi politik dan ideologi Demokrasi Terpimpin dibangun dan dipertahankan pada era 1959–1966. Soekarno tidak hanya memanfaatkan kekuatan retorika sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadikannya sebagai alat dominasi simbolik dan ideologis. Melalui pidato-pidato yang membangkitkan emosi nasionalisme, simbolisme budaya, dan narasi revolusi yang belum selesai, Soekarno merumuskan Demokrasi Terpimpin sebagai “demokrasi asli Indonesia” sebuah sistem politik yang diklaim mampu menjawab kegagalan demokrasi parlementer dan mempersatukan kekuatan nasional¹⁵.

Retorika Soekarno dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk membujuk, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menanamkan keyakinan

¹⁴ H. Indrajat, “Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi,” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 18, no. 1 (2016): 53-62.

¹⁵ P. A. Aurora, “Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Era Reformasi,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* Vol. 4, no. 1 (2024).

bahwa hanya kepemimpinan terpimpin yang mampu menyelamatkan bangsa dari ancaman perpecahan, neokolonialisme, dan krisis ekonomi. Melalui perpaduan antara nilai-nilai tradisional, simbolisme Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), dan citra karismatiknya sendiri, Soekarno menegaskan dirinya sebagai pusat kekuasaan dan “Bapak Bangsa” yang sah. Dengan demikian, retorika persuasifnya menjadi pondasi legitimasi Demokrasi Terpimpin yang sekaligus membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan yang semakin terpusat.

Adapun konsep-konsep yang menjadi landasan dan perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah

1. Retorika Persuasif

Retorika persuasif secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi yang terencana dan terstruktur untuk mempengaruhi, membujuk, atau meyakinkan audiens. Dalam tradisi klasik yang diwariskan Aristoteles, retorika persuasif dibangun di atas tiga pilar utama: ethos (kredibilitas dan karakter pembicara), pathos (kemampuan menggugah emosi audiens), dan logos (logika dan argumentasi yang rasional)¹⁶. Ketiga unsur ini menjadi landasan dalam merumuskan strategi komunikasi yang tidak hanya sekadar informatif, tetapi juga bersifat mempengaruhi sikap dan keyakinan pendengar. Retorika persuasif tidak terbatas pada pidato atau orasi publik; ia adalah seni dan strategi komunikasi yang menempatkan pemimpin atau pembicara sebagai aktor kunci dalam membangun wacana politik, ideologi, dan simbolisme yang diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam konteks politik, retorika persuasif menjadi instrumen

¹⁶ Aristoteles. *Retorika*. Diterjemahkan oleh Aris Munandar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

yang sangat penting: bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan legitimasi, menyatukan kekuatan sosial, dan menegaskan posisi pemimpin sebagai pusat makna dan pengendali narasi.

Aristoteles menjadi salah satu tokoh pertama yang merumuskan pilar-pilar retorika, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ia berpendapat bahwa retorika persuasif adalah seni menemukan cara terbaik untuk mempengaruhi pendengar, melalui karakter pembicara yang dapat dipercaya, emosi yang dibangkitkan, dan logika yang disusun dengan kuat. Dalam pandangan Aristoteles, retorika adalah upaya yang rasional sekaligus emosional, yang harus selalu memperhatikan audiens¹⁷.

Sementara itu, Sustrino dalam Jurnalnya yang berjudul Kajian Retorika untuk Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan Berpidato yang membahas Cicero, orator Romawi ternama, memandang retorika persuasif sebagai perpaduan antara keindahan bahasa dan argumentasi logis yang memikat. Baginya, retorika harus mampu mendidik, menggugah emosi, dan memberikan kenikmatan bagi pendengar. Dengan demikian, retorika tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga estetis dan menggerakkan hati¹⁸.

Dalam Skripsi Safitri yang berjudul Linguistik Politik dan Persuasi Politik: Capres Boneka dalam Perspektif Dramatistik, Yang menyatakan bahwa Kenneth Burke dan Claim Parelman, Kenneth Burke menekankan bahwa retorika persuasif adalah sarana identifikasi, di mana pembicara dan pendengar membangun kesamaan dan solidaritas simbolik. Retorika bukan sekadar persuasi logis, tetapi juga jembatan

¹⁷ M. Aisyah, “Ethos, Pathos, Logos dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review,” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 442-469.

¹⁸ I. Sutrisno dan I. Wiendijarti, “Kajian Retorika untuk Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan Berpidato,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2014): 70-84.

untuk menciptakan rasa kebersamaan dan keterhubungan. Lebih lanjut, Chaim Perelman memandang retorika persuasif sebagai seni membangun konsensus melalui argumentasi yang masuk akal dan relevan dengan nilai-nilai audiens. Perelman menekankan pentingnya merumuskan argumen yang dapat diterima oleh publik yang memiliki perspektif beragam¹⁹.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu sistem politik yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Soekarno pada periode 1959–1966. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap dinamika politik Indonesia pasca-kemerdekaan yang penuh gejolak dan ketidakstabilan. Secara konseptual, Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dinilai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sering kali hanya menimbulkan konflik kepentingan di antara partai-partai politik. Maksud utama dari Demokrasi Terpimpin adalah menciptakan stabilitas politik nasional dan menyatukan seluruh kekuatan politik dalam satu kepemimpinan yang terarah.

Soekarno berpendapat bahwa demokrasi parlementer hanya meniru sistem Barat yang liberal dan individualis, sedangkan Demokrasi Terpimpin lebih berakar pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno kerap menyebut Demokrasi Terpimpin sebagai “demokrasi asli Indonesia” yang mampu menjawab tantangan zaman dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. Secara garis besar, Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menempatkan kekuasaan

¹⁹ D. Safitri, “Linguistik Politik dan Persuasi Politik: Capres Boneka dalam Perspektif Dramatistik Kenneth Burke” (*Skripsi*, Universitas Negeri Jakarta, 2014).

tertinggi di tangan Presiden sebagai “Pemimpin Besar Revolusi” yang mengarahkan jalannya pemerintahan. Konsep ini tidak hanya menekankan kepemimpinan sentral, tetapi juga menekankan pentingnya musyawarah mufakat sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan²⁰.

Rakyat dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, dipandang sebagai satu kesatuan yang harus tunduk pada kepemimpinan nasional demi kepentingan bersama. Sejarah munculnya Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipisahkan dari konteks politik Indonesia pada dekade 1950-an. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia mengadopsi sistem parlementer yang memberi wewenang besar kepada partai-partai politik dalam membentuk pemerintahan. Namun, sistem ini ternyata membawa banyak persoalan. Kabinet sering berganti karena adanya mosi tidak percaya di parlemen, dan partai-partai politik terlibat dalam konflik kepentingan yang tajam.

Situasi ini membuat pembangunan nasional berjalan lambat, dan stabilitas politik menjadi rapuh. Krisis politik mencapai puncaknya pada tahun 1959 ketika Konstituante, lembaga yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru, gagal mencapai konsensus. Konstituante terus mengalami kebuntuan dalam merumuskan dasar negara, sehingga Presiden Soekarno mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945²¹.

²⁰ P. A. Aurora, “Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Era Reformasi,” (dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* Vol. 4, no. 1 (2024).

²¹ M. D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Dekret, Soekarno memperoleh legitimasi hukum untuk memperkuat kepemimpinannya, sekaligus membuka jalan bagi penerapan Demokrasi Terpimpin. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditandai oleh beberapa kebijakan penting. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Nasional yang diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai golongan termasuk militer, partai politik, dan tokoh masyarakat, yang secara simbolis merepresentasikan musyawarah mufakat.

Dewan Nasional dalam praktiknya, tidak memiliki kekuasaan riil; keputusan tetap berada di tangan Presiden Soekarno. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip musyawarah mufakat seringkali hanya menjadi legitimasi formal bagi sentralisasi kekuasaan di bawah Presiden. Demokrasi Terpimpin juga dicirikan oleh konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang dicanangkan Soekarno sebagai strategi mempersatukan tiga kekuatan besar yang ada di Indonesia. Dengan Nasakom, Soekarno berupaya mengakomodasi nasionalis, kelompok Islam, dan komunis dalam satu payung ideologis. Meski secara retoris Nasakom tampak inklusif, dalam praktiknya konsep ini justru menjadi alat bagi Soekarno untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tunggal yang tidak tergantikan²².

Retorika persuasif Soekarno dalam periode Demokrasi Terpimpin, menjadi instrumen kunci. Soekarno menggunakan pidato-pidatonya untuk menanamkan keyakinan bahwa hanya dengan kepemimpinan terpimpin Indonesia dapat mengatasi ancaman neokolonialisme, imperialisme, dan ketidakadilan

²² Adhi Makayasa Eruis Sipayung, *Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959–1965* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

ekonomi. Soekarno sering menggunakan simbol-simbol budaya Jawa, seperti konsep “Ratu Adil”, untuk memperkuat citra kepemimpinannya sebagai penyelamat bangsa. Hal ini membuat Demokrasi Terpimpin semakin kental dengan nuansa personalistik dan simbolik. Namun, penerapan Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari kritik dan kontroversi.

Banyak yang menilai bahwa sistem ini membuka jalan bagi otoritarianisme, di mana kebebasan politik semakin dibatasi dan peran parlemen menjadi simbolis belaka. Lahirnya lembaga-lembaga “terpimpin” seperti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menunjukkan bagaimana prinsip demokrasi disubordinasikan di bawah kehendak Presiden. Demokrasi Terpimpin pada akhirnya menjadi periode yang diwarnai oleh konflik ideologi, konsolidasi kekuasaan, dan krisis ekonomi. Meskipun Soekarno berhasil memobilisasi retorika kebangsaan dan semangat revolusi, pada kenyataannya sistem ini tidak mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan²³.

Ketegangan politik antara PKI, militer, dan kelompok Islam semakin meningkat, yang pada akhirnya memuncak pada peristiwa G30S 1965 dan kejatuhan Soekarno²⁴. Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga menjadi cermin bagaimana retorika dan simbolisme digunakan untuk membangun legitimasi, sekaligus menyingkap dilema antara stabilitas politik dan kebebasan demokratis. Sejarah Demokrasi

²³ Adhi Makayasa Eruis Sipayung, *Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959–1965* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

²⁴ Mulyer Mananda Setyahadi, “Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966),” (dalam Jurnal : *Renaissance*) vol 3, no. 1 346–357.

Terpimpin menjadi pelajaran penting tentang kompleksitas membangun negara bangsa yang adil dan berdaulat di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah. Adapun Landasan teorinya dari penelitian ini Sebagai Berikut :

1. Teori Max Weber tentang Legitimasi Kepemimpinan

Max Weber, sosiolog Jerman yang berpengaruh besar pada abad ke-XX, menyusun kerangka teori yang komprehensif mengenai legitimasi kekuasaan dalam karyanya yang terkenal, *Economy and Society*. Menurut Weber, legitimasi adalah fondasi utama stabilitas politik: kekuasaan tidak hanya didasarkan pada kemampuan memaksa atau dominasi fisik semata, tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan dari mereka yang diperintah. Tanpa legitimasi, kekuasaan menjadi rapuh dan cenderung ditentang. Legitimasi menandakan adanya keyakinan bersama bahwa otoritas yang dijalankan adalah sah dan layak ditaati²⁵.

Weber merumuskan tiga tipe ideal legitimasi: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Ketiga tipe ini tidak berdiri sendiri secara mutlak, melainkan seringkali bercampur dalam praktik kepemimpinan nyata. Namun, sebagai konsep ideal, pembagian ini membantu memahami berbagai bentuk otoritas dalam masyarakat²⁶.

Pertama, legitimasi tradisional berakar pada kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat, kebiasaan turun-temurun, dan nilai-nilai yang telah lama hidup. Otoritas tradisional memperoleh legitimasi dari kontinuitas sejarah: masyarakat melihat kepemimpinan sebagai kelanjutan dari warisan leluhur yang

²⁵ A. A. Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia," (*Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (2011): 126-146.

²⁶ Z. E. Triantini, "Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik," (*Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 1-18.

harus dihormati. Dalam masyarakat yang berlandaskan tradisi, pemimpin tradisional seperti raja, kepala adat, atau bangsawan memiliki posisi yang dianggap sah karena mereka adalah simbol stabilitas dan harmoni sosial. Weber menekankan bahwa di bawah legitimasi tradisional, ketaatan kepada penguasa tidak muncul dari pertimbangan rasional, melainkan dari penghormatan dan kebiasaan yang sudah menjadi norma²⁷.

Kedua, legitimasi rasional-legal bertumpu pada sistem hukum formal dan norma-norma yang rasional. Dalam tipe ini, otoritas dianggap sah karena mematuhi aturan hukum dan prosedur yang telah disusun secara rasional dan disepakati bersama. Kepemimpinan lahir bukan dari warisan atau keturunan, tetapi dari mekanisme legal yang berlaku, seperti pemilu, konstitusi, atau peraturan administratif. Legitimasi rasional-legal menjadi ciri khas birokrasi modern, di mana ketaatan rakyat tidak lagi bergantung pada kepribadian pemimpin, tetapi pada posisi jabatan dan aturan yang mengikatnya. Weber menyebut bahwa dalam legitimasi rasional-legal, kekuasaan menjadi impersonal dan cenderung stabil, karena otoritas melekat pada norma dan bukan pada individu²⁸.

Ketiga, legitimasi karismatik bersumber pada daya tarik personal seorang pemimpin yang dianggap memiliki kualitas luar biasa. Pemimpin karismatik diyakini memiliki “panggilan suci” atau kekuatan khusus yang membedakannya

²⁷ H. R. Seputra dan S. Suyatno, “Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 01 (2024): 1206-1217.

²⁸ H. R. Seputra dan S. Suyatno, “Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 01 (2024): 1206-1217.

dari orang biasa. Legitimasi lahir dari pengakuan emosional rakyat: keyakinan bahwa pemimpin karismatik adalah penyelamat atau pembaharu yang diutus untuk masa-masa krisis. Pemimpin jenis ini sering muncul dalam situasi sosial yang tidak stabil, di mana harapan kolektif mengkristal pada figur tertentu. Weber menekankan bahwa legitimasi karismatik sangat personal dan tidak stabil, karena sangat bergantung pada kepercayaan emosional yang sewaktu-waktu dapat memudar²⁹.

Menariknya, ketiga tipe legitimasi ini bukan hanya kategori statis, tetapi juga bisa berubah dan saling bertransformasi. Legitimasi karismatik, misalnya, sering dilembagakan menjadi bentuk tradisional atau rasional-legal setelah pemimpin karismatik wafat. Contohnya, kepemimpinan seorang tokoh revolusioner yang awalnya bersifat karismatik dapat diubah menjadi sistem birokrasi rasional-legal ketika tatanan hukum formal mulai dibangun. Dengan demikian, teori legitimasi Weber membantu menjelaskan dinamika politik dan sosial: bagaimana legitimasi muncul, berkembang, dan akhirnya dilembagakan.

Legitimasi dalam perspektif Weber adalah proses sosial yang dinamis. Ia tidak sekadar hadir dalam pidato politik atau konstitusi, melainkan menjadi energi yang mengikat rakyat dan penguasa dalam relasi kekuasaan. Legitimasi memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya menjadi alat memaksa, tetapi juga memperoleh pengakuan moral dan simbolik yang mengokohkan keberlanjutan otoritas. Dengan konsep legitimasi tradisional, rasional-legal, dan karismatik, Weber memberi kita lensa tajam untuk membaca bagaimana kekuasaan tidak

²⁹ H. R. Seputra dan S. Suyatno, "Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum," AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora 5, no. 01 (2024): 1206-1217.

pernah berdiri sendiri, tetapi selalu memerlukan pengakuan, keyakinan, dan konsensus dalam masyarakat. Teori ini tetap relevan hingga kini, karena dapat menuntun dalam memahami kompleksitas relasi antara penguasa dan rakyat di berbagai rezim politik dan budaya.

2. Teori Retorika Klasik Aristoteles (*Ethos, Pathos, Logos*)

Teori retorika klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles menjadi salah satu tonggak utama dalam sejarah komunikasi dan seni persuasi. Aristoteles, filsuf Yunani abad ke-IV SM, memandang retorika sebagai seni untuk menemukan cara terbaik mempengaruhi pendengar dalam konteks tertentu. Dalam karyanya yang monumental, *Rhetoric*, Aristoteles merumuskan retorika sebagai “*the faculty of observing in any given case the available means of persuasion*,” yaitu kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia untuk membujuk audiens. Bagi Aristoteles, retorika adalah keterampilan yang dinamis: ia menuntut ketepatan analisis atas situasi, audiens, dan tujuan komunikasi³⁰.

Retorika tidak hanya soal kata-kata indah, melainkan juga tentang bagaimana pesan disusun agar dapat menyentuh pikiran dan hati pendengar. Dari gagasan ini, Aristoteles memperkenalkan tiga pilar utama yang menjadi fondasi retorika persuasif: *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi sebagai elemen yang menyatukan rasionalitas, emosi, dan karakter dalam seni berbicara. *Ethos* adalah unsur yang berkaitan dengan kredibilitas pembicara. Aristoteles menekankan bahwa agar retorika berhasil,

³⁰ M. Aisyah, “Ethos, Pathos, Logos dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review,” (Dalam Jurnal : *Darma Agung*) 30, no. 3 (2022): 442-469.

pembicara harus mampu meyakinkan audiens tentang integritas, kejujuran, dan kebijaksanaannya³¹.

Ethos tidak hanya bersumber dari reputasi pembicara sebelum berbicara, tetapi juga dari bagaimana ia menampilkan dirinya dalam pidato: pilihan kata, gaya bicara, dan sikap yang mencerminkan nilai moral. *Ethos* menciptakan kepercayaan – ketika audiens yakin pembicara adalah sosok yang layak dipercaya, maka mereka lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan. Dalam *ethos*, terdapat dimensi etika dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi moral retorika. Tanpa *ethos*, retorika berisiko menjadi kosong dan tidak memikat. *Pathos* adalah unsur emosional yang mempengaruhi perasaan dan suasana hati audiens. Aristoteles menyadari bahwa manusia tidak hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk yang tergerak oleh emosi.

Pathos berfokus pada bagaimana pembicara membangkitkan rasa simpati, antusiasme, harapan, atau bahkan ketakutan dalam diri pendengar. Melalui pilihan kata, nada suara, dan kisah yang menyentuh, pembicara dapat mengarahkan emosi audiens agar selaras dengan tujuannya. Sebagai contoh, pidato yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme akan menggunakan kata-kata yang menghidupkan kebanggaan dan kehormatan bangsa. *Pathos* menjadi jembatan yang menghubungkan argumen rasional dengan dunia batin audiens, menjadikan retorika lebih hidup dan menggugah.

Logos adalah dimensi logis dan rasional dari retorika. *Logos* mencakup cara pembicara menyusun argumen yang koheren, menyajikan bukti dan data

³¹ S. Zulkarnaini, “Teknik Retorika dalam Penggunaan Pathos, Logos, Ethos dalam Video Pidato Joko Widodo di YouTube,” (*JBI: Jurnal Bahasa Indonesia*) 2, no. 2 (2024): 74-81.

yang relevan, serta merumuskan narasi yang mudah diikuti dan meyakinkan. Dalam logos, retorika memperoleh bobot intelektualnya: audiens tidak hanya tergerak oleh emosi, tetapi juga diyakinkan oleh rasionalitas dan kejelasan argumentasi. Logos melibatkan pemikiran yang kritis, alur yang runtut, dan kemampuan analisis yang cermat. Menurut Aristoteles, tanpa logos, retorika akan kehilangan fondasi intelektual dan hanya menjadi hiburan belaka.

Menariknya, Aristoteles tidak memisahkan ketiga unsur ini sebagai entitas yang berdiri sendiri. Ia justru menekankan pentingnya harmoni antara *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Ketika seorang pembicara mampu memadukan kredibilitas pribadinya (*ethos*), menyentuh perasaan audiens (*pathos*), dan menyampaikan argumen yang rasional (*logos*), maka retorika menjadi kekuatan yang tidak hanya memikat, tetapi juga membangun keyakinan mendalam. Keseimbangan ketiganya menjadi kunci keberhasilan retorika dalam meraih tujuan persuasi. Relevansi teori Aristoteles ini masih sangat nyata dalam berbagai bidang hingga hari ini³².

Dalam dunia politik, bisnis, pendidikan, atau advokasi sosial, *ethos*, *pathos*, dan *logos* menjadi formula yang digunakan untuk merancang komunikasi publik yang efektif. Seorang politisi yang ingin meraih kepercayaan publik harus menunjukkan integritasnya (*ethos*), membangkitkan emosi rakyat (*pathos*), dan merumuskan visi yang rasional dan terukur (*logos*). Demikian pula dalam pendidikan, seorang guru yang baik harus membangun kredibilitas, membangkitkan minat belajar siswanya, dan menyampaikan materi dengan logika yang kuat.

³² I. Sutrisno dan I. Wiendijarti, "Kajian Retorika untuk Pengembangan Pengetahuan dan Ketrampilan Berpidato," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2014): 70-84.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan dalam studi untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian sejarah yang merupakan upaya untuk membangun kembali atau merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dalam metode penelitian sejarah, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sejarah melalui lima tahapan³³. yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Peneliti memilih topik penelitian dengan judul “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)” dilakukan secara sengaja untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Soekarno memanfaatkan kekuatan retorika persuasif sebagai instrumen utama dalam membangun dan mempertahankan legitimasi politiknya pada periode Demokrasi Terpimpin.

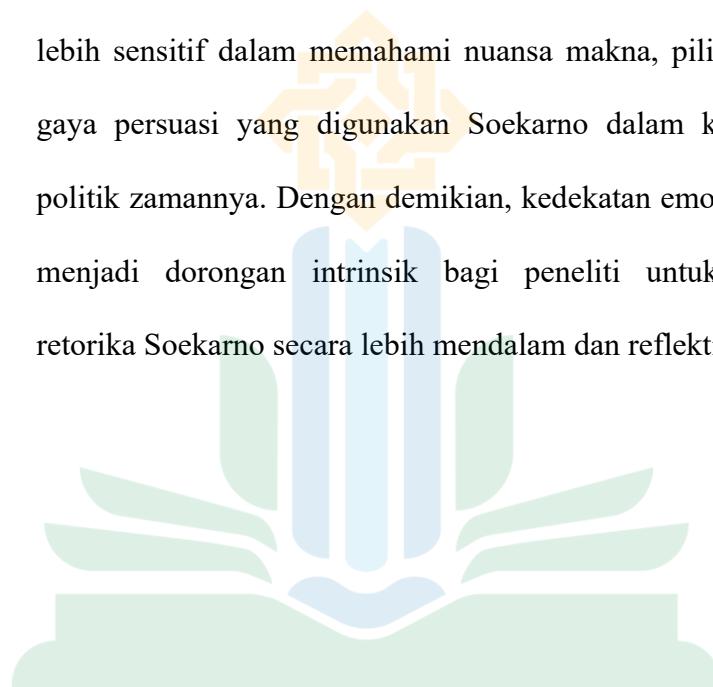
a. Kedekatan Emosional

Kedekatan emosional dalam penelitian ini muncul dari ketertarikan peneliti terhadap figur Soekarno sebagai tokoh sentral dalam sejarah politik dan kebangsaan Indonesia. Soekarno bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang orator ulung yang mampu menggerakkan massa melalui kekuatan kata. Sebagai generasi muda yang hidup di era pasca-reformasi, peneliti melihat

³³ Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka. Hal 69

pentingnya menelusuri kembali gaya retorika Soekarno pada periode 1959–1966³⁴.

Masa ketika pidato tidak sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen ideologis dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa. Keterikatan emosional ini menjadikan peneliti lebih sensitif dalam memahami nuansa makna, pilihan diksi, dan gaya persuasi yang digunakan Soekarno dalam konteks sosial-politik zamannya. Dengan demikian, kedekatan emosional tersebut menjadi dorongan intrinsik bagi peneliti untuk menafsirkan retorika Soekarno secara lebih mendalam dan reflektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Dahimatul Afida, *Diktat Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jember, Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021): 23

b. Kedekatan Intelektual

Menurut M. Al Qautsar Pratama dalam pemilihan topik Kedekatan intelektual harus memiliki daya Tarik instrinsik³⁵ dalam penelitian ini terbangun melalui pemahaman peneliti terhadap teori-teori retorika klasik maupun modern, serta dinamika sosial-politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Peneliti telah mempelajari berbagai konsep tentang retorika persuasif seperti *ethos*, *pathos*, dan *logos* dari Aristoteles, hingga pendekatan kontemporer dalam analisis wacana politik. Pemahaman ini diperkuat oleh studi literatur terhadap pidato-pidato Soekarno dan konteks ideologis yang melatarbelakangi setiap orasinya³⁶.

c. Memberikan dampak signifikan

Penelitian ini memiliki dampak signifikan baik secara akademik maupun sosial. Secara akademik, kajian ini memperkaya historiografi lokal dengan menghadirkan perspektif baru terhadap dinamika sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan studi sejarah lokal yang lebih kritis dan kontekstual³⁷.

³⁵ M. Al Qautsar Pratama, "Pengantar Ilmu Sejarah". KBM Indonesia, 2025

³⁶ Dahimatul Afida, "Diktat Metodologi Penelitian Sejarah" (Jember: Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021): 24

³⁷ M. Al Qautsar Pratama, "Pengantar Ilmu Sejarah". KBM Indonesia, 2025

Secara sosial-budaya, penelitian ini menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap akar identitas dan nilai-nilai yang diwariskan dari masa lalu. Kesadaran historis ini penting untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kemandirian masyarakat di tengah perubahan zaman. Selain itu, secara reflektif, penelitian ini membuka ruang pemahaman terhadap warisan sosial dan ekonomi masa lalu yang masih berpengaruh hingga kini, sehingga sejarah tidak hanya dipahami sebagai masa lampau, tetapi juga sebagai cermin untuk membangun masa depan yang lebih berkeadaban.

d. Dapat di Selesaikan

Penelitian ini dapat diselesaikan karena memiliki sumber data yang cukup, baik berupa arsip, dokumen, maupun keterangan lisan dari masyarakat. Ruang lingkup penelitian telah dibatasi secara jelas sehingga pembahasannya terarah dan realistik³⁸.

Dengan metode historis yang sistematis serta dukungan waktu dan kemampuan peneliti yang memadai, penelitian ini diyakini dapat diselesaikan sesuai rencana dan menghasilkan temuan yang valid serta bermanfaat.

2. Heruistik

Heuristik merujuk pada keterampilan atau metode dalam proses pemecahan masalah atau penelitian yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi. Secara umum, heuristik digunakan untuk mengembangkan

³⁸ M. Al Qautsar Pratama, "Pengantar Ilmu Sejarah". KBM Indonesia, 2025

strategi atau pendekatan yang efisien dalam menangani masalah kompleks atau dalam mengeksplorasi pengetahuan baru. Pengumpulan jenis sumber ini penting dalam penelitian sejarah karena membantu peneliti dalam mengevaluasi keaslian, keandalan, dan relevansi informasi yang digunakan untuk membangun narasi historis yang akurat dan berwawasan luas³⁹.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan-bahan sejarah yang berasal langsung dari periode terjadinya peristiwa dan belum mengalami interpretasi atau penafsiran. Jenis sumber ini meliputi dokumen-dokumen resmi, surat-surat, catatan harian, notulen rapat, arsip pemerintah, laporan, foto, dan artefak lain yang sifatnya asli dan kontemporer dengan peristiwa yang diteliti. Keberadaan sumber primer sangat penting dalam penelitian sejarah karena menyediakan data mentah yang memungkinkan analisis dan rekonstruksi peristiwa masa lalu secara lebih akurat dan objektif⁴⁰.

Sumber primer menjadi pintu untuk memahami realitas sosial, politik, dan budaya dari sudut pandang yang lebih otentik dan bebas dari distorsi interpretasi sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sumber primer menjadi fokus utama untuk menyingkap bagaimana retorika persuasif Soekarno dibangun

³⁹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

⁴⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 56.

dan digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kepemimpinannya⁴¹.

Dalam penelitian ini, beberapa arsip sumber primer yang diambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjadi kunci utama untuk mendalami konteks dan strategi retorika Soekarno. Arsip-arsip ini berupa naskah pidato yang disampaikan Soekarno di berbagai kesempatan, antara lain pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer di Istana Negara, pidato di muka kursus atase militer juga di Istana Negara, pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka, serta pidato kepada para mahasiswa tentang keadaan harga-harga di Istana Negara. Tidak hanya itu, sumber primer juga mencakup pidato tertulis Presiden Jenderal Mayor Djuanda pada seminar buruh di Gedung Wanita Jakarta, pidato Presiden pada resepsi pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara Jakarta, pidato kepada peserta seminar harga, upah, dan pajak di Istana Bogor, dan pidato pembukaan pengembangan kader revolusioner Angkatan Dwikora di Istana Negara Jakarta. Lebih lanjut, pidato Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia berhubung dengan peristiwa G 30 S/PKI menjadi salah satu sumber penting yang menunjukkan

⁴¹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 60.

bagaimana Soekarno merespons krisis nasional melalui retorika persuasif yang memadukan emosi dan simbolisme ideologi. Sumber primer lainnya adalah pidato Presiden kepada para pemimpin dari tujuh partai politik di Guest House Istana Presiden Jakarta, serta pidato Presiden pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Saw. di Istana Negara Jakarta. Naskah-naskah pidato ini memberikan data otentik yang kaya akan nuansa retorika dan simbol politik yang digunakan Soekarno untuk membangun konsensus dan menegaskan posisi kepemimpinan tunggalnya⁴².

Keseluruhan sumber primer ini menjadi pondasi kuat untuk membedah bagaimana retorika Soekarno tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi alat untuk membentuk opini publik, memobilisasi dukungan rakyat, dan membangun legitimasi kekuasaan dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Analisis terhadap naskah pidato ini akan membuka ruang bagi pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kata-kata menjadi senjata yang ampuh bagi seorang pemimpin untuk memengaruhi cara pandang masyarakat dan mengukuhkan posisi politiknya di tengah tantangan zaman.

⁴² Arsip Nasional Republik Indonesia

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan atau dokumen yang memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan mengenai informasi yang diperoleh dari sumber primer. Sumber-sumber ini umumnya dibuat setelah periode waktu yang diteliti dan oleh orang-orang yang tidak secara langsung mengalami peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian dengan judul “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)”, sumber sekunder diambil dari berbagai karya tulis ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lain yang terpublikasi yang memberikan beragam perspektif dan interpretasi mengenai bagaimana retorika Soekarno menjadi instrumen politik yang kuat dalam era Demokrasi Terpimpin. Sumber sekunder ini menjadi penting untuk memahami bagaimana para peneliti dan sejarawan sebelumnya telah menelaah tema retorika dan kepemimpinan Soekarno⁴³.

Salah satu penelitian terdahulu yang menjadi acuan penting adalah artikel karya Ketut Sedana Arta yang menelusuri dinamika politik pada masa Demokrasi Terpimpin, menekankan

⁴³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 60.

bagaimana Soekarno membangun retorika persuasifnya melalui simbolisme Nasakom dan retorika anti-imperialisme. Penelitian lain yang relevan adalah karya Adhi Makayasa Eruis Sipayung yang membahas implementasi ideologi Marhaenisme dalam kebijakan hukum pada masa Demokrasi Terpimpin, yang juga menyinggung bagaimana retorika Soekarno mempengaruhi arah kebijakan hukum negara⁴⁴.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mulyer Mananda Setyahadi menyoroti konflik elite TNI dan bagaimana retorika Soekarno berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kontrolnya di tengah perpecahan politik militer. Penelitian Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara mengenai penerimaan konsep Demokrasi Terpimpin oleh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan konteks penting tentang bagaimana retorika Soekarno membangun konsensus ideologis melalui narasi inklusif⁴⁵.

Skripsi Moh Arif Arifin yang mengkaji peran politik Idham Chalid pada masa Demokrasi Terpimpin juga memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana retorika Soekarno menjadi faktor pengikat antara elite politik dan massa rakyat. Sumber sekunder lain yang relevan adalah artikel Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias yang secara khusus menganalisis

⁴⁴ Ketut Sedana Arta, “Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966,” (Dalam Jurnal : *Candra Sangkala* Vol. 4, No. 1 (2022), 1

⁴⁵ Adhi Makayasa Eruis Sipayung, Implementasi Ideologi Marhaenisme dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959–1965 (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menekankan bagaimana Soekarno menggunakan retorika simbolik untuk memadukan nilai-nilai tradisional dan ideologi revolusi sebagai fondasi politik nasional. Keseluruhan sumber sekunder ini menjadi bahan yang berharga untuk memperkuat analisis mengenai bagaimana retorika Soekarno bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi basis ideologis dan simbolis yang mendukung konsolidasi kekuasaan.

Dengan demikian, dalam penelitian “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)”, sumber sekunder ini akan berfungsi sebagai kerangka pembanding dan kontekstualisasi. Analisis terhadap karya-karya tersebut akan membuka pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana retorika persuasif Soekarno dirumuskan, diterima, dan diinterpretasikan dalam diskursus keilmuan. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan, sekaligus menjadi refleksi kritis atas bagaimana kata-kata menjadi alat dominasi dan pembentuk realitas politik yang menentukan arah sejarah bangsa.

| No | Nama Penulis | Keterangan |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Ketut Sedana Arta | Menelusuri dinamika politik pada masa Demokrasi Terpimpin; fokus pada simbolisme Nasakom dan retorika anti-imperialisme Soekarno |
| 2 | Adhi Makayasa Eruis Sipayung | Membahas implementasi ideologi Marhaenisme dalam kebijakan hukum; mengaitkan retorika Soekarno dengan arah kebijakan negara |
| 3 | Mulyer Mananda Setyahadi | Mengulas konflik elite TNI; retorika Soekarno sebagai alat mempertahankan kontrol politik di tengah perpecahan |
| 4 | Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara | Meneliti penerimaan konsep Demokrasi Terpimpin oleh NU; melihat peran retorika inklusif Soekarno dalam membangun konsensus |
| 5 | Moh Arif Arifin | Mengkaji peran politik Idham |

| | | |
|---|---|---|
| | | Chalid pada masa Demokrasi Terpimpin; menyoroti fungsi retorika sebagai pengikat elite dan massa |
| 6 | Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias | Menganalisis pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin; fokus pada retorika simbolik dan sintesis nilai tradisional-revolusioner |

3. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap keandalan, keabsahan, dan relevansi sumber informasi yang digunakan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian memenuhi standar akademik yang diperlukan untuk mendukung klaim atau argumen yang diajukan.

Proses verifikasi ini melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk memeriksa kredibilitas penulis, metodologi yang digunakan, konteks pembuatan, dan tujuan penggunaan sumber tersebut. Hasil dari verifikasi sumber yang baik adalah memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang diteliti⁴⁶. Dalam penelitian Sejarah dikenal dengan kritik internal dan kritik eksternal, sebagai berikut :

a. Kritik Internal

Kritik internal dalam menilai data sejarah yang diperoleh dari arsip dan laporan resmi pemerintah terkait retorika persuasif Soekarno dalam membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966) menjadi langkah penting dalam penelitian ini. Kritik internal bertujuan untuk menguji kredibilitas dan keandalan sumber-sumber tersebut, memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung analisis dan kesimpulan yang diambil. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap isi naskah pidato dan arsip resmi untuk memahami konteks, maksud, serta strategi komunikasi politik yang digunakan Soekarno⁴⁷.

Peneliti membandingkan informasi yang terdapat dalam naskah-naskah pidato Soekarno, notulen rapat, dan laporan pemerintah dengan sumber-sumber lain seperti artikel surat kabar pada periode yang sama, catatan harian para tokoh politik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk menilai konsistensi data dan mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan. Evaluasi terhadap kesaksian atau testimoni yang muncul dalam arsip-arsip tersebut juga menjadi

⁴⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

⁴⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

bagian dari kritik internal. Peneliti akan menganalisis sejauh mana isi pidato Soekarno dapat dianggap sebagai representasi otentik dari kehendak politik dan ideologi yang dia bawa, serta bagaimana pidato-pidato tersebut berinteraksi dengan konteks sosial-politik yang lebih luas.⁴⁸

Setelah fakta-fakta kunci divalidasi melalui kritik eksternal, langkah berikutnya dalam kritik internal adalah mengevaluasi kredibilitas dan koherensi narasi yang dibangun dalam pidato-pidato Soekarno. Peneliti akan memeriksa apakah retorika yang digunakan Soekarno selaras dengan realitas sosial pada masa Demokrasi Terpimpin, serta bagaimana unsur ethos, pathos, dan logos digunakan secara strategis untuk mempengaruhi audiens. Selain itu, penting untuk menganalisis apakah pesan-pesan yang disampaikan konsisten antara satu pidato dengan pidato lainnya, terutama dalam konteks memperkuat legitimasi kepemimpinan tunggal Soekarno.

Informasi dari sumber primer seperti arsip dan laporan resmi kemudian dibandingkan dengan literatur sekunder yang relevan, termasuk kajian yang telah dilakukan oleh Ketut Sedana Arta, Adhi Makayasa Eruis Sipayung, Mulyer Mananda Setyahadi, Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara, Moh Arif Arifin, serta Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias. Perbandingan ini penting untuk

⁴⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

memastikan bahwa interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kerangka historis yang utuh, konsisten, dan logis.

Melalui tahapan kritik internal yang cermat, penelitian dengan judul “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)” ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang berbobot dan valid, yang tidak hanya mengandalkan data tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin bahwa interpretasi retorika persuasif Soekarno tidak terjebak dalam bias atau narasi tunggal, melainkan menjadi potret yang objektif dan komprehensif tentang bagaimana kata-kata menjadi alat untuk membangun legitimasi kepemimpinan dan mengarahkan jalannya sejarah bangsa.

b. Kritik Eksternal

Kritik eksternal dalam penelitian dengan judul “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)” menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan keaslian dan integritas data sejarah yang digunakan. Kritik eksternal bertujuan untuk memverifikasi otentisitas sumber-sumber primer yang diperoleh dari arsip dan laporan resmi pemerintah, seperti naskah-naskah pidato Soekarno yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)⁴⁹.

⁴⁹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

Proses ini mencakup pemeriksaan asal-usul dokumen, memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut benar-benar dikeluarkan pada periode Demokrasi Terpimpin dan tidak mengalami manipulasi yang dapat memengaruhi validitas isinya. Dalam tahapan ini, peneliti memeriksa aspek fisik dokumen seperti tanda tangan, cap resmi, tanggal pembuatan, serta format naskah yang khas pada masa pemerintahan Soekarno.

Penelitian juga memeriksa konteks pembuatan dokumen, termasuk siapa yang menulis atau merumuskan pidato tersebut, tujuan retorika yang disampaikan, dan situasi sosial-politik yang melatarbelakanginya. Hal ini penting untuk memahami apakah pidato-pidato tersebut benar-benar menjadi representasi autentik dari strategi komunikasi politik Soekarno, ataukah memiliki muatan bias atau kepentingan tertentu. Selain memverifikasi sumber primer, kritik eksternal juga dilakukan terhadap sumber-sumber sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, seperti artikel dan studi terdahulu karya Ketut Sedana Arta, Adhi Makayasa Eruis Sipayung, Mulyer Mananda Setyahadi, Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara, Moh Arif Arifin, serta Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias.

Peneliti menelaah bagaimana sumber-sumber sekunder ini menginterpretasikan retorika Soekarno, serta menilai konsistensi narasi dan metodologi yang digunakan para peneliti terdahulu. Hal

ini membantu memastikan bahwa kerangka analisis yang dibangun dalam penelitian ini berdiri di atas pondasi sumber yang otentik dan dapat dipercaya.

Kritik eksternal juga mencakup perbandingan antara naskah pidato Soekarno yang menjadi sumber primer, seperti pidato di muka wanita militer di Istana Negara, pidato di muka kursus atase militer, pidato kepada para hakim, jaksa, polisi dan petugas Bea Cukai, pidato untuk para mahasiswa mengenai keadaan harga-harga, pidato dalam seminar-seminar buruh, hukum nasional, harga-upah-pajak, hingga pidato monumental berkenaan peristiwa G30S/PKI. Semua pidato tersebut diperiksa keasliannya dan diperbandingkan untuk melihat konsistensi substansi pesan yang disampaikan Soekarno dalam konteks legitimasi Demokrasi Terpimpin⁵⁰.

Langkah ini tidak berhenti pada verifikasi teknis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-politik yang mengitari dokumen tersebut. Dengan memahami latar belakang saat pidato-pidato ini disampaikan seperti ketegangan politik pasca-Dekrit 5 Juli 1959, konflik ideologi dalam tubuh bangsa, serta upaya Soekarno membangun citra kepemimpinan yang karismatik peneliti dapat lebih kritis menilai potensi bias yang muncul dari posisi politik Soekarno pada masa itu. Hasil kritik eksternal ini menjadi

⁵⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 60.

dasar untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis retorika persuasif Soekarno benar-benar otentik dan dapat diandalkan. Keaslian dokumen, konsistensi antara sumber primer dan sekunder, serta kecermatan dalam membaca konteks pembuatan dokumen menjadi landasan kokoh bagi tahap analisis berikutnya. Dengan demikian, penelitian “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)” memiliki pijakan metodologis yang kuat dan menghasilkan interpretasi yang lebih obyektif, kritis, dan relevan dengan dinamika sosial-politik Indonesia pada masa itu.

4. Interpretasi

Interpretasi atau analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)” yang melibatkan penguraian, pemahaman, dan penafsiran makna dari data yang dikumpulkan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan penting dalam teks pidato-pidato Soekarno yang menjadi sumber primer penelitian, serta menempatkan data tersebut dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya⁵¹. Dengan demikian, interpretasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana retorika persuasif Soekarno berperan dalam membentuk legitimasi politik dan konsensus nasional. Proses interpretasi data dalam penelitian ini

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 69.

menggunakan teknik analisis kualitatif yang fokus pada narasi, simbolisme, dan argumentasi dalam naskah pidato Soekarno.

Peneliti tidak hanya menguraikan teks pidato secara literal, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya, termasuk bagaimana Soekarno memadukan unsur emosional (*pathos*), kredibilitas pribadi (*ethos*), dan logika (*logos*) dalam setiap kesempatan berbicara. Hal ini menjadi krusial untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana retorika Soekarno digunakan sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan legitimasi Demokrasi Terpimpin.

Hasil dari interpretasi ini diharapkan dapat mengungkap temuan-temuan penting yang memperlihatkan bagaimana retorika Soekarno tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadi instrumen ideologis yang menyatukan rakyat dalam visi revolusi nasional yang ia canangkan. Temuan ini akan diuji dan dibandingkan dengan teori legitimasi kepemimpinan Max Weber yang membagi legitimasi ke dalam tiga tipe utama: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Dari data primer yang dianalisis, terlihat bahwa Soekarno memanfaatkan legitimasi tradisional melalui simbol-simbol budaya Jawa dan nilai-nilai gotong royong yang menjadi akar dalam pidato-pidatonya⁵².

Sementara itu, pidato-pidato yang disampaikan di forum resmi dan di bawah payung hukum UUD 1945 menunjukkan penggunaan legitimasi rasional-legal, seperti yang tampak dalam pidato kepada para hakim, jaksa,

⁵² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.

dan aparat negara. Selain itu, aura karismatik Soekarno yang kuat dalam setiap orasi, yang diwarnai dengan gaya bicara yang memukau dan citra sebagai pemimpin revolusi, menjadi bukti penggunaan legitimasi karismatik yang juga diuraikan oleh Max Weber.

Interpretasi data juga menunjukkan bagaimana temuan-temuan ini selaras dengan teori retorika klasik Aristoteles yang menekankan harmoni antara *ethos*, *pathos*, dan *logos*. *Ethos* Soekarno muncul ketika ia menampilkan dirinya sebagai “Bung Karno,” pemimpin yang merakyat dan sarat pengalaman revolusi. *Pathos* tergambar dari cara Soekarno membakar semangat pendengar melalui narasi tentang “revolusi belum selesai,” pentingnya persatuan nasional, serta ancaman imperialisme. *Logos* terlihat pada kerangka argumentasi yang Soekarno susun tentang perlunya Demokrasi Terpimpin sebagai jawaban atas krisis politik dan kelemahan sistem parlementer yang dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa.

Dengan demikian, interpretasi data dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman tentang retorika Soekarno semata, tetapi juga mengungkap bagaimana retorika itu menjadi alat politik yang efektif untuk mewujudkan legitimasi kepemimpinan. Temuan-temuan yang muncul mendukung hipotesis bahwa retorika persuasif Soekarno adalah instrumen penting dalam membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin, sekaligus membuka ruang untuk merefleksikan bagaimana kekuatan kata-kata menjadi pilar utama dalam konsolidasi politik pada masa itu. Melalui sinergi antara temuan data primer, teori legitimasi Max Weber, dan teori retorika

Aristoteles, penelitian ini memberikan dasar yang kokoh untuk merumuskan rekomendasi dan implikasi lebih lanjut, serta memperkaya khazanah kajian retorika politik di Indonesia.

5. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan studi yang menyoroti cara-cara dan metode-metode yang digunakan untuk menulis sejarah. Historiografi mencakup pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian berbagai sumber historis untuk membangun narasi yang utuh dan bermakna mengenai masa lampau. Dalam konteks ini, historiografi bukan hanya menekankan pada akurasi fakta, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perspektif, pendekatan teoritis, dan perubahan interpretasi mempengaruhi cara suatu periode sejarah dipahami dan direkonstruksi⁵³.

Dalam penelitian dengan judul “Retorika Persuasif Soekarno dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin (1959–1966)”, historiografi menjadi pendekatan penting untuk memahami tidak hanya apa yang dikatakan Soekarno, tetapi juga bagaimana kata-kata dan simbol-simbol yang digunakan membentuk kesadaran politik rakyat dan membangun legitimasi kepemimpinannya. Pendekatan historiografi dalam penelitian ini memungkinkan untuk menelusuri dinamika sosial-politik yang menjadi latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin, serta bagaimana retorika Soekarno menanggapi tantangan dan peluang yang muncul di era tersebut.

⁵³ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Jakarta: Logos, 1995), 5.

Historiografi dalam penelitian ini juga memperhatikan bagaimana interpretasi tentang retorika Soekarno dan Demokrasi Terpimpin telah berubah seiring waktu, bergantung pada konteks intelektual dan politik yang mempengaruhi para sejarawan dan peneliti. Narasi yang dibangun tidak hanya menampilkan pidato-pidato Soekarno sebagai teks historis, tetapi juga sebagai produk retorika yang dirancang untuk merespons kegagalan sistem demokrasi parlementer dan ketegangan ideologis antara kekuatan nasionalis, agama, dan komunis.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

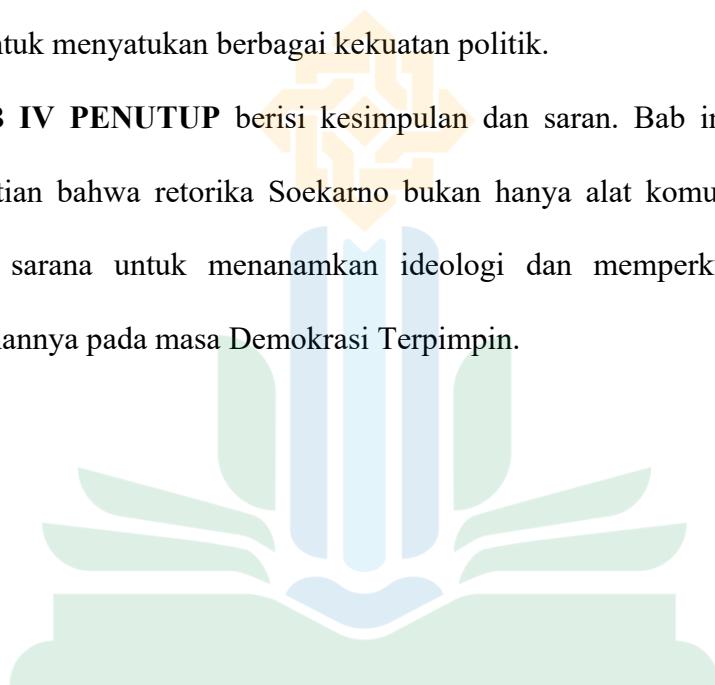
Sistematika pembahasan adalah untuk memperjelas arah bab maupun sub bab suatu penelitian, Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN berisi latar-belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian. Bab ini menjelaskan alasan peneliti memilih topik tentang retorika Soekarno, serta pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana pidato-pidato Soekarno berperan dalam membangun legitimasi Demokrasi Terpimpin.

BAB II KONDISI INDONESIA PRA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA membahas kondisi politik Indonesia sebelum lahirnya Demokrasi Terpimpin. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana sistem parlementer tidak berjalan efektif karena seringnya pergantian kabinet, pertentangan antarpertai, dan lemahnya stabilitas pemerintahan. Kondisi ini menjadi dasar munculnya gagasan Soekarno untuk mengganti sistem demokrasi liberal dengan Demokrasi Terpimpin.

BAB III PENGARUH RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO TERHADAP DINAMIKA POLITIK INDONESIA SELAMA ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966) menjelaskan tentang konsep dan ciri-ciri Demokrasi Terpimpin. Bab ini membahas bagaimana sistem pemerintahan baru tersebut menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dan menggunakan ideologi Nasakom untuk menyatukan berbagai kekuatan politik.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum hasil penelitian bahwa retorika Soekarno bukan hanya alat komunikasi politik, tetapi juga sarana untuk menanamkan ideologi dan memperkuat legitimasi kepemimpinannya pada masa Demokrasi Terpimpin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KONDISI INDONESIA PRA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA

A. Pra Demokrasi Terpimpin (Parlementer/Liberal) 1945-1958

Sebelum memasuki era demokrasi liberal dan terpimpin, Indonesia terlebih dahulu melalui fase pra-demokrasi yang ditandai dengan proses peneguhan identitas kenegaraan pasca-Proklamasi 1945. Masa ini bukan sekadar periode transisi, tetapi fase penentuan arah dasar politik dan pemerintahan bangsa yang baru lahir. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menegakkan kedaulatan politik, membangun institusi pemerintahan yang efektif, serta menyeimbangkan antara cita-cita kemerdekaan dan realitas sosial yang masih rapuh akibat penjajahan panjang. Sistem pemerintahan yang dijalankan masih bersifat eksperimental, bergerak antara model presidensial yang kuat dan aspirasi parlementer yang demokratis sehingga menghasilkan dinamika politik yang kompleks. Fase pra-demokrasi inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan sistem politik Indonesia di masa-masa selanjutnya, termasuk lahirnya masa demokrasi liberal pada awal 1950-an⁵⁴.

Situasi politik dan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh pergulatan. Masa ini merupakan periode pencarian bentuk ideal sistem kenegaraan yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia yang baru merdeka. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga awal 1960-an, perjalanan pemerintahan

⁵⁴ Supriatna, Terbentuknya Identitas Kebangsaan pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004).

Indonesia ditandai oleh pergantian sistem, ketegangan politik, serta upaya yang berkelanjutan untuk menegakkan stabilitas nasional di tengah berbagai krisis yang



Pidato Presiden Soekarno di Sidang Parlemen
Republik Indonesia Serikat (RIS)



Dokumenter Indonesia
734 subscriber

Subscribe

melanda⁵⁵.

Sumber : Channel Youtube Dokumenter Indonesia tentang Republik Indonesia Serikat

<https://www.youtube.com/watch?v=fvrczoeTCh4>

Pada fase awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem ini berjalan dalam situasi yang belum stabil karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonial Belanda yang ingin kembali berkuasa. Pemerintahan Soekarno-Hatta lebih berfokus pada upaya diplomasi dan perjuangan fisik untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada membangun tatanan politik yang mapan. Keadaan ini

⁵⁵ U. N. Batubara, "Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2019): 14–34.

berlangsung hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949⁵⁶.

Hasil dari KMB melahirkan bentuk negara baru yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem federal ini merupakan hasil kompromi politik antara pihak Indonesia dan Belanda. Namun, bentuk negara federal tersebut tidak bertahan lama karena dianggap sebagai bentuk politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan sebagai peninggalan kolonial yang tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Akibatnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950⁵⁷.

Penerapan UUDS 1950 menandai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Dalam sistem parlementer ini, presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini pada awalnya dianggap lebih demokratis karena memberi ruang yang luas bagi partisipasi partai-partai politik. Akan tetapi, praktiknya justru menimbulkan ketidakstabilan politik yang kronis. Koalisi antarpertai yang terbentuk sering kali rapuh dan tidak mampu bertahan lama. Sejak 1950 hingga 1959, tercatat tujuh kali pergantian kabinet yang silih berganti, di antaranya Kabinet Natsir (1950–1951), Kabinet Sukiman (1951–1952), Kabinet Wilopo

⁵⁶ H. Wirahmat dan N. Alfiyani, “Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 114–131.

⁵⁷ P. C. Fajri, “Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959),” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 241–258.

(1952–1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957), dan Kabinet Djuanda (1957–1959)⁵⁸.

Pergantian kabinet yang terlalu sering mengakibatkan arah kebijakan negara tidak konsisten dan menghambat pelaksanaan program pembangunan. Situasi ini menimbulkan kelelahan politik dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang mulai mempertanyakan efektivitas sistem parlementer. Sementara itu, parlemen sebagai lembaga legislatif menjadi arena perdebatan ideologis yang tajam antara tiga kekuatan besar, yaitu nasionalis, Islam, dan komunis. Ketegangan ini semakin meningkat ketika Konstituante, lembaga yang dibentuk melalui hasil Pemilu 1955, gagal merumuskan konstitusi baru akibat perbedaan ideologis yang mendalam⁵⁹.

Pemilihan Umum 1955 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hasil pemilu memperlihatkan bahwa empat partai besar mendominasi, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, tidak ada satu pun partai yang memperoleh majoritas mutlak sehingga pembentukan kabinet harus dilakukan melalui koalisi. Sistem multipartai yang demikian luas membuat proses politik semakin sulit mencapai stabilitas. Dalam situasi politik yang tidak menentu ini, Presiden Soekarno mulai menyuarakan kritik terhadap

⁵⁸ Supriatna, *Terbentuknya Identitas Kebangsaan pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004).

⁵⁹ A. R. Prayogo, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan 1948–1949* (Tesis Doktor, UINSSC, 2025).

demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut terlalu meniru Barat dan gagal mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa⁶⁰.

Krisis politik pada akhir 1950-an diperparah oleh munculnya berbagai pemberontakan daerah seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Gerakan-gerakan tersebut mencerminkan lemahnya integrasi nasional dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, situasi ekonomi memburuk dengan meningkatnya inflasi, defisit anggaran, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan legitimasi pemerintahan. Dalam konteks inilah Soekarno menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai solusi atas kebuntuan politik liberal yang dianggap hanya menguntungkan elite partai dan tidak mengabdi pada kepentingan rakyat⁶¹.

Gagasan Demokrasi Terpimpin mendapat momentum ketika Konstituante gagal menetapkan UUD baru. Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950, serta memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan lahirnya sistem Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan kembali terpusat di tangan presiden. Melalui legitimasi karismatik dan kekuatan retorikanya, Soekarno berhasil memperoleh dukungan

⁶⁰ P. C. Fajri, “Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959),” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 241–258. N.

⁶¹ P. C. Fajri, “Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959),” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 241.

luas dari rakyat untuk menegakkan sistem pemerintahan baru yang ia anggap lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959, merupakan periode penting dalam sejarah politik nasional yang diwarnai oleh semangat demokratis sekaligus instabilitas pemerintahan. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sistem pemerintahan bergeser dari presidensial menjadi parlementer. Dalam sistem ini, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri beserta kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.⁶².

sistem parlementer diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi karena membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas. Partai-partai politik memiliki peran sentral dalam pembentukan pemerintahan, dan keputusan politik banyak ditentukan melalui mekanisme musyawarah di parlemen. Namun, idealisme demokrasi ini tidak berjalan sebagaimana harapan. Sistem multipartai yang terbentuk pasca-Pemilu 1955 justru menimbulkan fragmentasi politik yang tajam. Tidak ada satu pun partai yang mampu memperoleh majoritas suara, sehingga pembentukan pemerintahan harus dilakukan melalui koalisi antarpertai.

⁶² S. R. Dayani, T. Rohayati, dan A. M. Sujana, “Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik di Awal Orde Lama (1957–1958),” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 441–454.

Koalisi tersebut sering kali bersifat rapuh karena didasari kepentingan politik jangka pendek, bukan kesamaan visi kebangsaan.⁶³.

Kerapuhan politik tersebut menyebabkan kabinet sering berganti. Dalam kurun sembilan tahun, Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir hingga Kabinet Djuanda. Setiap kabinet memiliki orientasi dan program yang berbeda, menyebabkan arah pembangunan nasional tidak konsisten. Di sisi lain, parlemen yang seharusnya menjadi ruang representasi rakyat justru berubah menjadi arena perdebatan ideologis antara kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis. Pertentangan ini menimbulkan polarisasi yang menghambat tercapainya kesepakatan politik yang stabil.⁶⁴.

masa demokrasi parlementer juga melahirkan sejumlah capaian penting. Pemilihan Umum 1955 menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu ini menunjukkan kematangan politik rakyat Indonesia dalam menjalankan demokrasi modern. Namun, keberhasilan tersebut tidak mampu menutupi kenyataan bahwa praktik demokrasi yang terlalu liberal sulit beradaptasi dengan karakter sosial masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan gotong royong.⁶⁵

Krisis politik yang berlarut-larut, disertai melemahnya ekonomi dan munculnya berbagai pemberontakan daerah, akhirnya menimbulkan kelelahan

⁶³ R. E. M. C. O. Raben, “Bangsa, Daerah, dan Ambiguitas Modernitas di Indonesia Tahun 1950-an,” dalam Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa (2011).

⁶⁴ L. Ismail dkk., “Pertarungan Ideologi: Konflik Politik dalam Dinamika Masyarakat Modern: Ideologi, Politik, Masyarakat,” Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (2024).

⁶⁵ G. N. Santika, G. Sujana, dan M. A. Winaya, “Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis,” Jurnal Etika Demokrasi 4, no. 2 (2019).

politik nasional. Dalam situasi itulah muncul gagasan Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin, yang dianggap lebih sesuai dengan kepribadian bangsa dan menjadi jalan keluar dari kebuntuan sistem parlementer yang tidak stabil⁶⁶.

Dinamika pra-Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa sistem parlementer yang diterapkan berdasarkan UUDS 1950 tidak relevan dengan realitas sosial-politik Indonesia saat itu karena beberapa faktor mendasar. Pertama, struktur sosial dan politik Indonesia pasca-kemerdekaan belum siap menjalankan sistem demokrasi parlementer yang kompleks. Partai-partai politik yang muncul pasca-Pemilu 1955 lahir dengan basis ideologis dan kepentingan sektoral yang kuat—nasionalis, Islam, dan komunis—sehingga koalisi yang terbentuk lebih bersifat pragmatis daripada ideologis. Akibatnya, pemerintahan menjadi sangat rapuh. Dalam waktu sembilan tahun (1950–1959), terjadi tujuh kali pergantian kabinet, dan setiap kabinet gagal membangun kesinambungan kebijakan. Ketidakstabilan ini memperlihatkan bahwa sistem parlementer yang menempatkan kekuasaan eksekutif di bawah kontrol parlemen tidak mampu bekerja efektif dalam situasi politik yang penuh fragmentasi dan belum memiliki budaya kompromi yang matang⁶⁷.

Kedua, demokrasi parlementer dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan prinsip *musyawarah* dan *gotong royong*. Dalam praktiknya, sistem ini terlalu meniru model demokrasi Barat yang berbasis pada oposisi dan kompetisi antarpertai. Hal ini menimbulkan kesan bahwa politik

⁶⁶ E. Y. Wibowo, “Pertarungan Ideologi Petani: Studi Historis Konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) 1945–1960,” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 6, no. 1 (2025): 59–72.

⁶⁷ A. Huda, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin,” *Idaarotul Ulum (Jurnal Prodi MPI)* 3, no. 1 (Juni 2021): 37–51.

hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, bukan sarana mencapai kemaslahatan bersama. Presiden Soekarno menilai bahwa “demokrasi liberal” telah melahirkan *demokrasi kebablasan*, di mana kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan nasional. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk, pemberontakan daerah (PRRI dan Permesta), serta gagalnya Konstituante dalam menetapkan konstitusi baru memperparah krisis legitimasi politik. Dalam konteks itulah, sistem parlementer kehilangan relevansinya karena tidak mampu menjawab kebutuhan bangsa akan stabilitas, arah ideologis, dan kepemimpinan yang kuat. Maka, Soekarno menawarkan Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan karakter sosial-politik Indonesia suatu sistem yang menempatkan presiden sebagai pemimpin revolusi dan pusat pengambilan keputusan nasional, dengan orientasi pada persatuan dan keadilan sosial, bukan sekadar persaingan politik antarpertai⁶⁸.

B. Demokrasi Terpimpin

Lahirnya gagasan Demokrasi Terpimpin tidak dapat dilepaskan dari krisis politik yang melanda Indonesia sepanjang dekade 1950-an. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan politik, kegagalan sistem parlementer, serta ketegangan ideologis yang terus meningkat sejak awal tahun 1950. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memandang bahwa sistem demokrasi liberal yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 telah menyimpang dari semangat dan kepribadian bangsa Indonesia. Ia menganggap

⁶⁸ E. Y. Wibowo, “Pertarungan Ideologi Petani: Studi Historis Konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) 1945–1960,” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 6, no. 1 (2025): 59–72.

bahwa praktik politik multipartai yang berkembang pada masa itu justru menimbulkan perpecahan, bukan persatuan, dan menjauhkan rakyat dari cita-cita revolusi kemerdekaan⁶⁹.

Awal mula gagasan Demokrasi Terpimpin dapat ditelusuri dari berbagai pidato dan tulisan Soekarno sejak awal 1950-an. Pada tahun 1952, Soekarno mulai menunjukkan ketidakpuasannya terhadap praktik demokrasi liberal yang dianggap meniru sistem Barat. Ia menilai bahwa demokrasi semacam itu tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno menegaskan perlunya “demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,” sebagaimana termuat dalam sila keempat Pancasila. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar filosofis bagi konsep Demokrasi Terpimpin⁷⁰.

Kekecewaan Soekarno terhadap sistem parlementer semakin tajam setelah melihat ketidakefektifan pemerintahan dalam menjalankan program nasional. Sejak tahun 1950 hingga 1959, terjadi tujuh kali pergantian kabinet yang sebagian besar berumur pendek. Kondisi ini menghambat pembangunan nasional dan memperburuk situasi ekonomi. Selain itu, parlemen menjadi arena perdebatan ideologis yang tiada henti antara partai-partai politik. Soekarno menilai bahwa sistem seperti ini telah menimbulkan “demokrasi kebablasan,” di mana kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa. Dalam pidatonya pada tahun 1957, Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia

⁶⁹ H. Hamid, *Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

⁷⁰ A. Huda, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin,” *Idaarotul Ulum (Jurnal Prodi MPI)* 3, no. 1 (Juni 2021): 37–51.

memerlukan sistem pemerintahan yang kuat, stabil, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mampu mengarahkan revolusi nasional⁷¹.

Pada tahun 1957, kondisi politik dan keamanan nasional semakin memburuk. Pemberontakan PRRI dan Permesta di daerah menunjukkan melemahnya wibawa pemerintah pusat. Di sisi lain, kegagalan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru menambah ketegangan politik. Sejak lembaga tersebut bersidang pada tahun 1956, perdebatan ideologis antara kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung Islam tidak pernah menemukan titik temu. Soekarno kemudian menyimpulkan bahwa lembaga ini tidak akan mampu melahirkan konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dalam situasi kebuntuan inilah, Soekarno semakin sering menyuarakan perlunya perubahan arah demokrasi menuju sistem yang lebih terpusat dan terarah⁷².

Gagasan Demokrasi Terpimpin secara resmi diperkenalkan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 21 Februari 1957 di Istana Negara, yang kemudian dikenal dengan nama pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita.” Dalam pidato ini, Soekarno menekankan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada semangat revolusi 1945 dan meninggalkan praktik demokrasi liberal yang dianggap individualistik dan tidak produktif. Ia memperkenalkan istilah “Demokrasi Terpimpin” untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipimpin oleh satu kepemimpinan nasional yang kuat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, demokrasi yang sejati

⁷¹ G. Argenti, “Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14.

⁷² S. R. Dayani, T. Rohayati, dan A. M. Sujana, “Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik di Awal Orde Lama (1957–1958),” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 441–454.

bukanlah demokrasi yang hanya menonjolkan kebebasan politik, tetapi demokrasi yang menempatkan kepemimpinan sebagai pemandu arah bangsa menuju keadilan sosial⁷³.

Seiring dengan penguatan gagasan tersebut, pada tahun 1957 Soekarno mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisinya. Ia menetapkan keadaan darurat perang di seluruh Indonesia pada bulan Maret 1957, yang memberikan wewenang besar kepada militer dalam urusan politik dan keamanan. Langkah ini menjadi awal dari perubahan struktur kekuasaan yang mengarah pada sistem terpimpin. Pada tahun yang sama, Soekarno juga membentuk Dewan Nasional, sebuah lembaga penasihat yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai golongan masyarakat, bukan partai politik. Pembentukan lembaga ini menandai upaya Soekarno menggeser peran partai politik dan menggantikannya dengan representasi golongan fungsional yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan rakyat⁷⁴.

Situasi politik mencapai titik balik pada tahun 1959 ketika Konstituante secara resmi dinyatakan gagal menjalankan tugasnya. Dalam suasana ketegangan nasional tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi tiga keputusan penting, yaitu pembubaran Konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan ini mendapat dukungan luas dari militer dan sebagian besar rakyat Indonesia yang telah jenuh dengan instabilitas

⁷³ E. Y. Wibowo, “Pertarungan Ideologi Petani: Studi Historis Konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) 1945–1960,” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 6, no. 1 (2025): 59–72.

⁷⁴ G. Argenti, “Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14.

politik. Melalui Dekrit Presiden ini, Soekarno secara resmi meletakkan dasar bagi sistem Demokrasi Terpimpin⁷⁵.



DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Bakule
657 subscriber

Subscribe

Sumber : *Youtube channel Bakule* (yang di Ambil dari Arsip Nasional RI)
Pidato Mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959

<https://www.youtube.com/watch?v=-5Pk0LEwPCM>

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno memperkuat struktur pemerintahan sesuai dengan konsep Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1960, ia membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 karena dianggap tidak sejalan dengan semangat revolusi. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat langsung oleh presiden. Langkah ini memperjelas arah perubahan sistem politik dari demokrasi parlementer menuju demokrasi yang berpusat pada kepemimpinan tunggal presiden. Sejak saat itu, Soekarno semakin menegaskan perannya sebagai

⁷⁵ W. Arif Ramadhan, *Pemikiran Soekarno dalam Pembangunan Ibu Kota Jakarta pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962–1964* (Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

“Pemimpin Besar Revolusi” yang mengarahkan seluruh kekuatan nasional menuju cita-cita revolusi⁷⁶.

Lahirnya gagasan Demokrasi Terpimpin tidak dapat dilepaskan dari krisis politik yang melanda Indonesia sepanjang dekade 1950-an. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan politik, kegagalan sistem parlementer, serta meningkatnya ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis. Dalam konteks itu, Soekarno menilai bahwa sistem demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 telah menyimpang dari semangat dan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem multipartai yang semestinya menjadi simbol kebebasan justru menimbulkan fragmentasi dan perpecahan politik. Soekarno menilai bahwa rakyat semakin jauh dari cita-cita revolusi kemerdekaan. Dalam pandangannya, partai-partai politik telah berubah menjadi kendaraan elite yang memperjuangkan kepentingan golongan semata. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk demokrasi kebablasan. Maka, ia menawarkan alternatif: demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila sebuah demokrasi yang tidak liberal tetapi berorientasi pada musyawarah, mufakat, dan gotong royong⁷⁷.

Sejak awal 1950-an, Soekarno dalam berbagai pidato dan tulisannya berulang kali menegaskan perlunya sistem demokrasi khas Indonesia. Dalam pidatonya pada tahun 1952, ia menolak demokrasi liberal Barat yang menekankan individualisme. Baginya, bangsa Indonesia yang berjiwa komunal tidak cocok

⁷⁶ M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

⁷⁷ M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

dengan sistem politik yang bertumpu pada kompetisi tanpa batas. Ia menginginkan demokrasi yang berjiwa kekeluargaan, di mana rakyat menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin revolusioner. Dalam pidato yang paling berpengaruh berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 21 Februari 1957, Soekarno menandai lahirnya konsep Demokrasi Terpimpin. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sejati bukanlah demokrasi yang hanya menonjolkan kebebasan politik, tetapi demokrasi yang menempatkan kepemimpinan sebagai pemandu arah bangsa. Menurutnya, Indonesia tidak menolak demokrasi, tetapi menolak demokrasi yang memecah belah dan mengabaikan semangat gotong royong⁷⁸.

Konteks sosial-politik tahun 1957 menjadi titik balik yang dramatis. Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra dan Permesta (Perjuangan Semesta) di Sulawesi menandai krisis keutuhan negara. Daerah-daerah luar Jawa merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat dan menuduh Jakarta terlalu dominan. Di sisi lain, kegagalan Konstituante untuk menghasilkan konstitusi baru menambah kekacauan politik. Perdebatan antara kubu Islam dan nasionalis mengenai dasar negara tak kunjung berakhir sejak lembaga itu bersidang tahun 1956. Dalam suasana ini, Soekarno merasa bahwa demokrasi parlementer hanya memperuncing pertentangan ideologis dan menghambat pembangunan nasional. Melihat situasi itu, ia mengambil langkah-langkah drastis. Pada Maret 1957, ia menetapkan keadaan darurat perang yang memberi wewenang besar kepada militer dalam menjaga stabilitas nasional.

⁷⁸ M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

Langkah ini tidak hanya memperkuat peran Angkatan Darat, tetapi juga membuka jalan bagi militer untuk terlibat langsung dalam politik. Pada tahun yang sama, Soekarno membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan perwakilan golongan fungsional seperti petani, buruh, cendekiawan, dan perempuan. Lembaga ini dimaksudkan untuk menggantikan dominasi partai politik sekaligus menjadi simbol demokrasi gotong royong yang diidamkan Soekarno⁷⁹.

Klimaks dari seluruh proses ini terjadi pada 5 Juli 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Isinya membubarkan Konstituante, menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950, dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini mendapat dukungan luas dari militer dan rakyat yang jenuh terhadap instabilitas. Dari sinilah fondasi sistem Demokrasi Terpimpin diletakkan secara resmi. Dekrit ini bukan hanya langkah konstitusional, melainkan juga simbol kembalinya kekuasaan terpusat pada presiden. Dalam waktu singkat, Soekarno berhasil mengonsolidasikan kekuasaan di tangan sendiri. Ia menempatkan dirinya bukan sekadar kepala negara, tetapi juga Pemimpin Besar Revolusi. Sejak saat itu, sistem politik Indonesia bergerak dari demokrasi parlementer menuju otoritarianisme dengan legitimasi ideologis Pancasila⁸⁰.

Pasca-Dekrit, Soekarno melangkah lebih jauh. Pada tahun 1960, ia membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 karena menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukannya. Sebagai gantinya, ia membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang

⁷⁹ M. S. Armia, "Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*. 7, no. 1 (2017): 126–146.

⁸⁰ W. Arif Ramadhan, *Pemikiran Soekarno dalam Pembangunan Ibu Kota Jakarta pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962–1964* (Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

anggotanya diangkat langsung oleh presiden. Hal serupa terjadi pada lembaga-lembaga lain: kekuasaan yudikatif dan eksekutif dipusatkan di tangan presiden, sementara fungsi legislatif menjadi simbolik. Pada saat yang sama, Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong yang diisi tokoh-tokoh dari berbagai golongan, termasuk perwakilan dari militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Inilah awal dari sistem politik Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dirancang Soekarno untuk menyatukan kekuatan besar bangsa. Namun, perpaduan ideologis ini justru memicu dinamika baru yang sangat berbahaya⁸¹.

Sistem Nasakom awalnya dimaksudkan sebagai bentuk rekonsiliasi politik nasional. Namun dalam praktiknya, ideologi ini menciptakan ketegangan antara tiga kekuatan besar: TNI Angkatan Darat, kelompok Islam terutama Masyumi, dan PKI. Soekarno yang makin dekat dengan PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok lain. PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit memanfaatkan kedekatan ini untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai bidang, termasuk organisasi buruh, tani, dan bahkan pendidikan. Sementara itu, militer di bawah pimpinan Jenderal A.H. Nasution semakin waspada terhadap kebangkitan komunis. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada awal 1960-an ketika terjadi serangkaian bentrokan politik dan sosial di berbagai daerah antara kelompok komunis dan non-komunis. Soekarno sendiri mencoba menyeimbangkan kekuatan ini dengan retorika

⁸¹ R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 5.

revolusioner. Ia mengatakan bahwa politik adalah panglima dan semua kekuatan harus tunduk pada revolusi dan kepemimpinan nasional⁸².

Namun di balik retorika revolusi itu, ekonomi Indonesia terus merosot. Inflasi mencapai lebih dari 600 persen pada tahun 1965. Program pembangunan macet, produksi menurun, dan rakyat menderita kelaparan di berbagai wilayah. Soekarno menolak kebijakan ekonomi kapitalistik dan memilih jalur ekonomi berdikari, tetapi kebijakan itu tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif. Dalam suasana seperti itu, pidato-pidato revolusioner menjadi pelipur lara atas krisis nyata yang tak kunjung tertangani. Rakyat kehilangan daya beli, dan pemerintah menutupi kesulitan ekonomi dengan jargon revolusi.

Krisis politik semakin dalam ketika Soekarno meluncurkan kebijakan Konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963 dengan slogan “Ganyang Malaysia.” Kebijakan ini menelan banyak biaya dan memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat. Di dalam negeri, Soekarno semakin memperkuat kedekatan dengan blok sosialis Uni Soviet dan Tiongkok yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya mencurigai arah politik Indonesia. Di sisi lain, PKI memanfaatkan suasana revolusioner itu untuk memperkuat posisi politiknya. Mereka berhasil menempatkan kader di banyak lembaga negara dan menggalang dukungan dari massa tani dan buruh. Hal ini menimbulkan ketegangan luar biasa dengan militer yang merasa eksistensinya terancam⁸³.

⁸² W. Arif Ramadhan, *Pemikiran Soekarno dalam Pembangunan Ibu Kota Jakarta pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962–1964* (Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

⁸³ W. Arif Ramadhan, *Pemikiran Soekarno dalam Pembangunan Ibu Kota Jakarta pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962–1964* (Disertasi Doktor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

Soekarno yang semakin uzur dan sakit-sakitan dianggap tidak lagi mampu menengahi konflik antara dua kekuatan besar ini. Tragedi mulai terlihat di banyak daerah. Pembunuhan politik dan bentrokan horizontal antara simpatisan PKI dan kelompok Islam terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra. Ketegangan ideologis itu mencapai puncaknya dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 ketika enam jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh oleh sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September. Meskipun peran Soekarno masih menjadi perdebatan, peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin.

Setelah peristiwa tersebut, situasi politik berubah drastis. Jenderal Soeharto mengambil alih kendali keamanan melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Supersemar. Dengan surat ini, kekuasaan Soekarno praktis berakhir. PKI dibubarkan, para anggotanya diburu, dan ideologi komunis dilarang di seluruh Indonesia. Ratusan ribu orang menjadi korban pembunuhan massal yang dikenal sebagai tragedi 1965–1966, salah satu bab paling kelam dalam sejarah bangsa. Soekarno, sang arsitek Demokrasi Terpimpin, akhirnya kehilangan dukungan politik dan moral. Ia dijadikan tahanan rumah hingga wafat pada tahun 1970. Sistem yang ia bangun dengan semangat revolusioner berakhir dalam kekacauan dan darah.

Meski demikian, warisan intelektual Soekarno tidak sepenuhnya hilang. Gagasan tentang demokrasi yang berkepribadian Indonesia, tentang musyawarah dan gotong royong, tetap menjadi inspirasi dalam perjalanan politik bangsa. Secara filosofis, Demokrasi Terpimpin lahir dari cita-cita luhur untuk

menegakkan kedaulatan rakyat dalam bingkai Pancasila dan kepribadian nasional. Soekarno ingin melahirkan sistem politik yang bebas dari individualisme dan liberalisme Barat, serta mencerminkan karakter kolektif bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin berubah menjadi sistem kekuasaan yang terlalu terpusat, di mana semua keputusan bersumber dari satu figur tunggal.

Kegagalan sistem ini bukan semata karena ideologinya yang keliru, tetapi karena ketidakseimbangan antara idealisme revolusioner dan realitas politik. Soekarno terlalu percaya pada kekuatan simbolik kepemimpinan tanpa membangun sistem checks and balances yang sehat. Ketika ekonomi merosot dan ketegangan ideologis meningkat, sistem yang bergantung pada karisma seorang pemimpin tidak mampu bertahan. Demokrasi Terpimpin pun runtuh di tengah gelombang kekerasan dan peralihan kekuasaan yang menandai lahirnya rezim baru⁸⁴.

Demokrasi Terpimpin adalah eksperimen besar bangsa Indonesia dalam mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan jati dirinya. Ia lahir dari krisis, dijalankan dengan idealisme revolusi, dan berakhir dengan tragedi nasional. Dari masa itu kita belajar bahwa demokrasi, betapapun berkepribadian lokalnya, tetap membutuhkan kebebasan politik, keseimbangan kekuasaan, dan akuntabilitas publik. Tanpa itu semua, demokrasi akan kembali berubah menjadi terpimpin,

⁸⁴ R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 5.

bukan oleh hikmah kebijaksanaan sebagaimana cita-cita Soekarno, melainkan oleh hasrat kuasa manusia yang tak terbatas⁸⁵.

C. Dampak Demokrasi Terpimpin terhadap Arah Politik Nasional

Penerapan sistem Demokrasi Terpimpin sejak tahun 1959 menandai perubahan mendasar dalam arah politik nasional Indonesia. Sistem ini lahir dari keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi instabilitas politik pada masa Demokrasi Liberal dan untuk menciptakan tatanan politik yang lebih terarah serta berorientasi pada persatuan nasional. Secara kronologis, periode Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno pada tahun 1966. Dalam kurun waktu tersebut, arah politik Indonesia mengalami transformasi besar dari demokrasi parlementer yang pluralistik menuju sistem politik yang terpusat dan ideologis di bawah kepemimpinan tunggal presiden⁸⁶.

Setelah Dekrit Presiden 1959 diberlakukan, Soekarno segera mengambil langkah untuk memperkuat posisi eksekutif. Pada tahun 1960, ia membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 karena menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat langsung oleh presiden. Pembentukan DPR-GR menandai berakhirnya prinsip representasi rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan membuka jalan bagi sistem politik yang lebih dikendalikan. Langkah ini

⁸⁵ R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 5.

⁸⁶ M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

merupakan bentuk konkret dari gagasan Demokrasi Terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dan pengarah utama seluruh kebijakan negara⁸⁷.

Pada tahun yang sama, Soekarno juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara. Anggota MPRS tidak dipilih melalui mekanisme pemilu, melainkan diangkat berdasarkan representasi golongan dan organisasi yang dianggap mendukung revolusi. Melalui MPRS, Soekarno memperoleh legitimasi formal untuk menetapkan arah politik dan ideologi negara. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1960, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal berjudul “Resopim” atau “Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional,” yang menegaskan pentingnya kepemimpinan terpadu dalam menjalankan revolusi Indonesia. Sejak saat itu, konsep “kepemimpinan nasional” menjadi landasan ideologis bagi semua kebijakan politik pada masa Demokrasi Terpimpin⁸⁸.

Pada tahun 1961, Soekarno memperkenalkan gelar baru bagi dirinya sebagai “Pemimpin Besar Revolusi.” Gelar ini bukan sekadar simbol, tetapi mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur politik Indonesia. Soekarno menempatkan dirinya sebagai figur sentral yang tidak hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga mengarahkan ideologi, kebudayaan, dan perjuangan bangsa. Pemerintahan pada masa ini bergerak dalam bingkai revolusi permanen yang disebutnya sebagai “revolusi yang belum selesai.” Dengan demikian, arah

⁸⁷ N. M. Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 203–226.

⁸⁸ R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 5.

politik nasional menjadi sangat bergantung pada visi dan retorika Soekarno tentang revolusi dan sosialisme Indonesia⁸⁹.

Pada tahun 1963, Soekarno meluncurkan konsep “Nasakom,” akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini dimaksudkan untuk menyatukan tiga kekuatan ideologis utama di Indonesia, yaitu kaum nasionalis yang diwakili PNI, kaum Islam yang diwakili NU, dan kaum komunis yang diwakili PKI. Melalui Nasakom, Soekarno berupaya membangun harmoni politik dan mengakhiri konflik ideologis yang telah berlangsung sejak awal 1950-an. Akan tetapi, dalam praktiknya, Nasakom justru memperkuat peran PKI dalam kehidupan politik nasional. Partai Komunis Indonesia memperoleh ruang yang luas untuk berkembang dan berpengaruh di berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan, organisasi massa, dan lembaga militer. Kecenderungan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok Islam dan militer yang menilai bahwa Soekarno terlalu berpihak pada komunis⁹⁰.

Secara politik luar negeri, arah kebijakan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1961, Soekarno mendeklarasikan politik luar negeri “bebas aktif” yang kemudian berkembang menjadi sikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme yang tegas. Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang dimulai pada

⁸⁹ R. Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014): 5.

⁹⁰ N. M. Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 203–226.

tahun 1963 menjadi salah satu contoh nyata dari politik luar negeri revolusioner Soekarno yang didorong oleh semangat anti-Barat dan solidaritas dunia ketiga. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno sering menyerukan slogan “Ganyang Malaysia” dan “Poros Jakarta–Beijing–Pyongyang,” yang mencerminkan pergeseran orientasi politik Indonesia ke arah blok sosialis⁹¹.

Dalam bidang ekonomi, arah kebijakan nasional selama Demokrasi Terpimpin cenderung mengarah pada kontrol negara dan penolakan terhadap kapitalisme Barat. Soekarno meluncurkan berbagai program ekonomi yang berorientasi pada kemandirian nasional, meskipun sebagian besar di antaranya tidak berhasil karena lemahnya manajemen dan situasi ekonomi global yang tidak stabil. Inflasi yang tinggi, penurunan nilai ekspor, dan beban utang luar negeri yang meningkat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan 1960-an. Namun, Soekarno tetap menggunakan retorika revolusi untuk menjaga dukungan publik, menyatakan bahwa kesulitan ekonomi adalah bagian dari perjuangan melawan imperialisme ekonomi⁹².

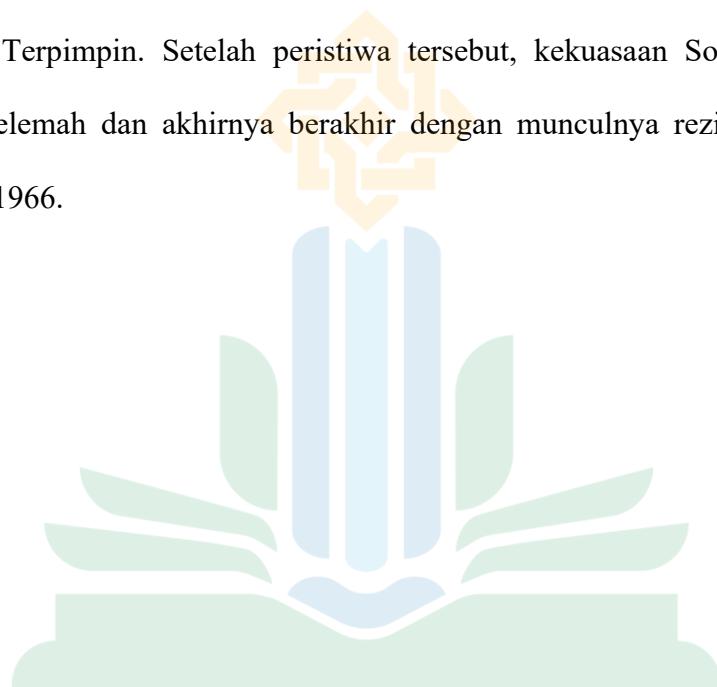
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

| No | Dampak Ekonomi | Dampak Politik |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Penolakan pengesahan APBN | Hubungan PKI dan Militer Memburuk |
| 2 | Penolakan terhadap kapitalisme barat | Gerakan 30 September |

⁹¹ M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

⁹² M. S. Armia, “Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik,” *Jurnal Review Politik* 7, no. 1 (2017): 126–146.

Pada akhir masa Demokrasi Terpimpin, sekitar tahun 1965, arah politik nasional mencapai puncak ketegangan. Hubungan antara PKI dan militer semakin memburuk akibat perebutan pengaruh di sekitar presiden. Ketegangan ini memuncak dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menandai berakhirnya dominasi politik Soekarno dan runtuhnya sistem Demokrasi Terpimpin. Setelah peristiwa tersebut, kekuasaan Soekarno secara perlahan melemah dan akhirnya berakhir dengan munculnya rezim Orde Baru pada tahun 1966.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

PENGARUH RETORIKA PERSUASIF SOEKARNO TERHADAP DINAMIKA POLITIK INDONESIA SELAMA ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

A. Karakter Kepemimpinan Soekarno

Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966) merupakan fase paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia, ketika karakter kepemimpinan Soekarno tampil dengan segala kompleksitasnya. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno berhasil menegaskan kembali otoritasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia menampilkan sosok pemimpin karismatik yang memadukan visi ideologis, kecakapan retorika, dan kemampuan mengelola keseimbangan politik di tengah tarik-menarik kepentingan antara militer, partai politik, dan kekuatan sosial lainnya.⁹³.

Kepemimpinan Soekarno ditandai oleh corak populis dan simbolik yang kuat. Ia memosisikan dirinya bukan sekadar sebagai pemimpin politik, melainkan sebagai *Pemimpin Besar Revolusi* yang menuntun bangsa menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Dalam pandangannya, demokrasi liberal telah gagal menumbuhkan stabilitas dan hanya melahirkan pertentangan kepentingan antarelite. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin sebuah sistem yang menekankan persatuan nasional di bawah bimbingan seorang pemimpin tunggal. Melalui konsep ini, Soekarno berusaha mengembalikan arah

⁹³ Agustina, E. (2019). Soekarno, nasakom, dan buku di bawah bendera revolusi sebagai materi ajar pelajaran sejarah sma. *HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 3, 1-10.

politik Indonesia pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan semangat revolusi yang berpihak pada rakyat.⁹⁴

Keberhasilan Soekarno menjaga keseimbangan kekuasaan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia menunjukkan kelihaiannya dalam memainkan politik aliansi. Ia memahami bahwa stabilitas nasional hanya dapat dipertahankan apabila seluruh kekuatan besar dirangkul dalam satu bingkai ideologis. Dari sinilah lahir gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang ia rancang sebagai simbol persatuan di tengah perbedaan ideologi. Melalui Nasakom, Soekarno berupaya mempertemukan kekuatan nasionalis, religius, dan kiri revolusioner dalam satu poros revolusi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, politik keseimbangan ini justru menempatkannya pada posisi sulit karena ketegangan antara TNI AD dan PKI semakin tajam.⁹⁵

Sebagai orator ulung, Soekarno menggunakan bahasa revolusi sebagai alat untuk menggerakkan massa dan mempertahankan legitimasi. Setiap pidatonya sarat dengan simbolisme yang menggugah emosi rakyat, menggambarkan perjuangan bangsa sebagai bagian dari revolusi global melawan imperialisme dan kolonialisme. Karakter kepemimpinannya yang penuh gairah dan ideologis membuatnya sangat dekat dengan rakyat, tetapi sekaligus menjauhkan dirinya dari kritik rasional dalam pengambilan kebijakan negara.

⁹⁴ Z. M. Latief, “Kepemimpinan Soekarno Sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kehidupan Perundang-undangan di Indonesia,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* (2002): 81–89.

⁹⁵ F. Hanafi dan A. Ansorullah, “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 431–448.

1. TNI AD dan PKI

Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama masa Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu dinamika paling menonjol dalam sejarah politik Indonesia. Kedua kekuatan ini memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan nasional pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Sejak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri era Demokrasi Liberal dan memulai sistem Demokrasi Terpimpin, terjadi perubahan fundamental dalam keseimbangan kekuasaan negara. Dalam sistem baru ini, Soekarno berupaya menempatkan dirinya sebagai poros tunggal antara kekuatan militer dan kekuatan ideologis yang berseberangan, termasuk PKI. Namun, strategi keseimbangan tersebut tidak mampu menghapuskan rivalitas antara dua kekuatan besar yang memiliki kepentingan politik dan orientasi ideologis yang sangat berbeda⁹⁶. 1960, TNI AD menjadi salah satu pilar utama dalam menopang kekuasaan Soekarno. Dukungan militer terhadap Dekrit Presiden menjadi faktor penentu keberhasilannya. Dalam periode ini, hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat berada dalam kondisi relatif harmonis. TNI AD yang dipimpin oleh Jenderal A. H. Nasution memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik pasca pemberontakan PRRI-Permesta (1958) dan menegakkan kembali wibawa pemerintah pusat. Sebagai imbalan atas dukungan tersebut, Soekarno memberikan ruang yang lebih luas bagi militer dalam pemerintahan melalui konsep “Dwifungsi ABRI” yang mulai

⁹⁶ L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

diperkenalkan secara informal pada masa itu. Militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek politik dan ekonomi⁹⁷.

Situasi mulai berubah pada awal 1961 ketika Soekarno memperkuat arah ideologis pemerintahannya ke kiri melalui gagasan revolusi total dan pembentukan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pidato kenegaraan “Resopim” tahun 1960, Soekarno menegaskan perlunya kepemimpinan nasional yang terpadu untuk menuntun revolusi. Pernyataan ini memperkuat kedudukan presiden sebagai pusat kekuasaan dan mengurangi pengaruh parlemen maupun partai politik. Pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan D. N. Aidit mulai bangkit dan menempatkan diri sebagai mitra ideologis Soekarno. Melalui retorika yang revolusioner, PKI menyatakan kesetiaan kepada presiden dan menampilkan diri sebagai kekuatan rakyat yang mendukung revolusi Indonesia. Sikap ini membuat Soekarno melihat PKI sebagai sekutu politik yang potensial dalam menjaga keseimbangan terhadap kekuatan militer yang dianggap terlalu dominan⁹⁸.

Hubungan antara Soekarno dan PKI semakin erat setelah tahun 1962, terutama setelah keberhasilan Indonesia dalam merebut Irian Barat dari Belanda. Keberhasilan diplomasi dan militer ini dijadikan simbol kemenangan revolusi dan memperkuat posisi Soekarno di mata rakyat. Dalam momentum ini, PKI memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruhnya di masyarakat melalui organisasi-organisasi massa seperti SOBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia),

⁹⁷ N. F. Hermayati, *Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960–1967* (Disertasi Doktor, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012).

⁹⁸ L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

Pemuda Rakyat, Gerwani, dan BTI (Barisan Tani Indonesia). PKI mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan Soekarno, termasuk pembentukan Front Nasional yang menghimpun kekuatan politik di bawah kendali presiden. Melalui kedekatan ideologis ini, PKI berusaha menempatkan dirinya sebagai mitra politik utama pemerintah dan membangun citra sebagai partai revolusioner yang setia kepada “Pemimpin Besar Revolusi.”⁹⁹

Sementara itu, TNI AD mulai menunjukkan sikap waspada terhadap meningkatnya pengaruh PKI. Militer menilai bahwa Soekarno telah terlalu memberikan ruang bagi partai tersebut dalam kehidupan politik nasional. Pada tahun 1963, ketika Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), kekhawatiran Angkatan Darat semakin besar. Bagi para perwira tinggi militer, terutama yang berlatar belakang Islam dan nasionalis, gagasan ini dipandang sebagai upaya untuk melegitimasi komunisme dalam struktur negara. Meski Soekarno berusaha meyakinkan bahwa Nasakom merupakan bentuk persatuan ideologis bangsa, dalam praktiknya PKI mendapatkan keuntungan politik yang signifikan. Partai ini berhasil mendekatkan diri dengan presiden dan menempatkan kaderanya dalam berbagai posisi penting di lembaga pemerintahan dan organisasi rakyat¹⁰⁰.

Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat setelah tahun 1964. PKI secara aktif melancarkan propaganda yang menentang

⁹⁹ L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

¹⁰⁰ L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

“imperialisme Amerika dan neokolonialisme Barat,” sementara sebagian besar kalangan militer justru menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan militer¹⁰¹. Perbedaan orientasi politik luar negeri ini memperlebar jarak antara kedua kekuatan. PKI juga melancarkan kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima,” yaitu pasukan bersenjata yang terdiri atas buruh dan petani. Gagasan ini disampaikan oleh D. N. Aidit pada tahun 1965 dan memperoleh tanggapan positif dari Soekarno. Namun, bagi Angkatan Darat, usulan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap monopoli militer dalam bidang pertahanan dan keamanan¹⁰².

Pada pertengahan tahun 1965, hubungan antara TNI AD dan PKI berada pada titik paling tegang. PKI semakin agresif dalam mendukung kebijakan Soekarno yang berhaluan kiri, sementara militer menilai bahwa pengaruh komunis telah merasuki lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam suasana ekonomi yang memburuk, dengan inflasi yang mencapai lebih dari 600 persen, retorika revolusi yang terus digelorakan oleh Soekarno hanya memperdalam ketegangan politik nasional. Rivalitas antara PKI dan Angkatan Darat berubah menjadi pertarungan kekuasaan yang nyata, terutama dalam memperebutkan pengaruh di sekitar presiden.

¹⁰¹ D. S. Nisvi, A. Fandik, I. R. Aisy, dan S. Rettob, “Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI sebagai Syarat Masuk TNI,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 42–58.

¹⁰² L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia,” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

2. NASAKOM

Gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) merupakan salah satu konsep ideologis paling penting yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Gagasan ini muncul sebagai upaya untuk menyatukan tiga kekuatan besar politik Indonesia yang selama periode Demokrasi Liberal sering terlibat dalam pertentangan ideologis, yaitu kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis. Secara kronologis, pembentukan dan penguatan konsep Nasakom berlangsung antara tahun 1960 hingga 1965, seiring dengan semakin kuatnya kedudukan politik Soekarno dan semakin tajamnya rivalitas antara TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI)¹⁰³.



Sumber : *Youtube channel Bakule* (yang di Ambil dari Arsip Nasional RI)
 Tentang Pidato Mengenai Pancasila Dan Komunisme Tahun 1966
<https://www.youtube.com/watch?v=peBHoXN2N5I>

¹⁰³ N. S. Wiratama, A. Budianto, dan M. I. Z. I. Sumarwoto, “Pancasila dan Nasakom dalam Mempersatukan Bangsa Indonesia: (Kajian Kritis Sejarah Intelektual),” *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 2, no. 2 (2022): 66–76.

Cikal bakal gagasan Nasakom dapat ditelusuri sejak akhir 1950-an, ketika Soekarno mulai memikirkan cara untuk mengatasi fragmentasi politik yang telah melemahkan stabilitas nasional. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan dan sistem Demokrasi Terpimpin dijalankan, Soekarno menilai bahwa bangsa Indonesia memerlukan satu ideologi terpadu yang dapat menjadi panduan bagi revolusi nasional. Dalam pidato kenegaraan tahun 1960 berjudul “Resopim” (Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional), Soekarno menegaskan perlunya kepemimpinan tunggal yang dapat memimpin revolusi menuju masyarakat adil dan makmur. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki ideologi yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri, bukan meniru sistem Barat. Pada momen inilah Soekarno mulai menyebut gagasan penyatuan antara nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai inti dari ideologi revolusi Indonesia¹⁰⁴.

Secara resmi konsep Nasakom mulai diperkenalkan secara luas pada tahun 1961. Dalam berbagai pidato dan tulisan politiknya, Soekarno menegaskan bahwa ketiga unsur ini harus dipersatukan karena masing-masing memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Nasionalisme dianggap sebagai semangat kebangsaan yang mempersatukan rakyat, agama memberikan kekuatan moral dan spiritual, sedangkan komunisme membawa semangat kerakyatan dan keadilan sosial. Soekarno berpendapat bahwa ketiganya merupakan bagian integral dari kepribadian bangsa Indonesia. Dalam pandangannya, konflik ideologis antara

¹⁰⁴ H. Munsi, “Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis,” *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 1 (2016).

ketiga unsur tersebut hanyalah hasil pengaruh kolonial dan Barat yang telah memecah belah bangsa¹⁰⁵.

Pada tahun 1962 dan 1963, gagasan Nasakom semakin diperkuat melalui kebijakan politik dan struktur kelembagaan negara. Soekarno membentuk lembaga-lembaga seperti Front Nasional dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berfungsi untuk menghimpun kekuatan sosial dan politik di bawah kepemimpinan presiden. Melalui pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1963, yang dikenal dengan tema “Tahun Berdikari”, Soekarno menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, baik secara ekonomi maupun politik. Ia menempatkan Nasakom sebagai landasan ideologis bagi kebijakan berdikari tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno mempopulerkan slogan-slogan revolusioner seperti “Genta Suara Revolusi Indonesia” dan “Lanjutkan Revolusi,” yang menekankan pentingnya persatuan ideologis untuk menuntaskan revolusi kemerdekaan¹⁰⁶.

Dalam praktik politik, penerapan Nasakom memperlihatkan perubahan besar dalam komposisi kekuasaan nasional. Mulai tahun 1963, PKI memperoleh posisi yang semakin kuat karena menjadi salah satu unsur utama dalam konsep tersebut. D. N. Aidit, ketua PKI, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Nasakom dan menyebut Soekarno sebagai “pemimpin besar revolusi Indonesia.” Dukungan ini memperkuat hubungan politik antara Soekarno dan PKI, sekaligus menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok Islam. Sementara

¹⁰⁵ L. Winata, “Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959–1965,” *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017).

¹⁰⁶ L. Winata, “Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959–1965,” *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017).

itu, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama berusaha menyesuaikan diri dengan konsep Nasakom untuk menjaga hubungan baik dengan presiden, meskipun sebagian tokohnya menunjukkan resistensi terhadap komunisme¹⁰⁷.

Pada tahun 1964, konsep Nasakom mencapai puncak pengaruhnya dalam kehidupan politik Indonesia. Soekarno menjadikan Nasakom sebagai ideologi negara yang tidak tertulis, sekaligus sebagai dasar kebijakan politik dan diplomasi luar negeri. Dalam pidato kenegaraan pada peringatan kemerdekaan tahun 1964, Soekarno menegaskan bahwa Nasakom adalah “penjelmaan dari Pancasila dalam praktik revolusi.” Melalui retorika yang kuat, ia menggambarkan bahwa hanya melalui persatuan nasionalis, agamawan, dan komunis, Indonesia dapat menghadapi ancaman imperialisme dan kolonialisme dunia. Pada saat yang sama, hubungan Indonesia dengan negara-negara blok sosialis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok semakin erat. Dukungan internasional terhadap ide revolusi Asia-Afrika yang digagas Soekarno memperkuat posisi ideologinya di panggung dunia¹⁰⁸.

Meskipun pada permukaannya Nasakom tampak sebagai ideologi pemersatu, di bawahnya tersimpan potensi konflik yang besar. Seiring meningkatnya kekuasaan PKI, ketegangan antara partai tersebut dan TNI Angkatan Darat semakin memanas. Angkatan Darat menilai bahwa Nasakom telah menjadi sarana bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya, sedangkan

¹⁰⁷ E. Agustina, “Soekarno, Nasakom, dan Buku *Di Bawah Bendera Revolusi* sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA,” *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3 (2019): 1–10

¹⁰⁸ E. Agustina, “Soekarno, Nasakom, dan Buku *Di Bawah Bendera Revolusi* sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA,” *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3 (2019): 1–10

Soekarno memandang perbedaan itu sebagai dinamika wajar dalam revolusi. Retorika Soekarno yang terus menyerukan persatuan di bawah Nasakom justru memperdalam ketegangan, karena ia tidak pernah secara tegas menempatkan batas antara ideologi komunis dan nasional-religius. Dalam konteks inilah, konsep Nasakom berubah menjadi medan pertarungan politik antara kekuatan militer dan kekuatan kiri¹⁰⁹.

Menjelang akhir tahun 1965, Nasakom kehilangan daya kohesinya. Kondisi ekonomi yang memburuk, inflasi yang sangat tinggi, serta meningkatnya polarisasi politik menyebabkan sistem Demokrasi Terpimpin berada di ambang krisis. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi klimaks dari ketegangan ideologis yang telah lama terpendam. Setelah peristiwa tersebut, PKI dituduh sebagai dalang, dan militer segera mengambil alih kekuasaan dengan membubarkan seluruh organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut. Kejatuhan PKI secara otomatis menghancurkan fondasi ideologi Nasakom yang dibangun oleh Soekarno. Sejak saat itu, Nasakom tidak lagi menjadi poros ideologis negara, dan kekuasaan politik beralih ke tangan militer yang kemudian menandai lahirnya era Orde Baru¹¹⁰.

Secara historis, Nasakom menunjukkan bagaimana retorika politik dan ideologi digunakan oleh Soekarno sebagai alat untuk mengintegrasikan kekuatan nasional sekaligus mempertahankan kekuasaan. Gagasan ini lahir dari keinginan

¹⁰⁹ L. Winata, "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959–1965," *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017).

¹⁰⁹ L. P. Hati dan L. D. C. U. Ginting, "Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia," *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 161–180.

¹¹⁰ N. F. Hermayati, *Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960–1967* (Disertasi Doktor, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012).

tulus untuk menciptakan persatuan di tengah keragaman ideologi, tetapi dalam realitas politik, Nasakom justru menjadi sumber kontradiksi baru yang memperuncing pertentangan antara kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis. Periode 1960 hingga 1965 memperlihatkan bagaimana idealisme persatuan yang digagas Soekarno berubah menjadi arena perebutan pengaruh, yang akhirnya mengguncang struktur politik Indonesia dan mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin.



B. Pola Retorika Persuasif Soekarno Melalui Pidato-Pidatonya

Pidato politik bukan sekadar medium penyampaian gagasan, tetapi merupakan instrumen kekuasaan yang berfungsi membentuk kesadaran, membangun legitimasi, dan menggerakkan partisipasi publik. Dalam perspektif retorika klasik, seperti yang dikemukakan Aristoteles, efektivitas pidato terletak pada kemampuan orator memadukan tiga unsur utama: *Ethos* (kredibilitas pembicara), *Pathos* (daya emosional), dan *Logos* (rasionalitas argumen). Dalam konteks politik Indonesia pasca-kemerdekaan, pidato Soekarno menjadi contoh paling menonjol dari penggunaan retorika sebagai strategi persuasi yang melampaui fungsi komunikatif semata. Ia tidak hanya berbicara untuk menjelaskan kebijakan, melainkan untuk menciptakan kesadaran ideologis dan membentuk solidaritas revolusioner¹¹¹.

Secara teoritis, pidato ini dapat dibaca sebagai praktik *rhetorical construction of power*, di mana kekuasaan dibangun melalui bahasa yang

¹¹¹ Aristoteles, *Retorika*, diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 7.

menstrukturkan realitas sosial dan politik. Soekarno mengonstruksi citra dirinya sebagai pemimpin visioner yang berbicara atas nama rakyat dan revolusi. Dengan gaya orasi yang penuh simbol, repetisi, dan seruan emosional, ia menghidupkan imajinasi kolektif tentang bangsa yang sedang bergerak menuju tatanan baru. Dalam konteks inilah, retorika Soekarno tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga performative, sebuah tindakan yang tidak sekadar mengatakan sesuatu, melainkan menciptakan realitas politik itu sendiri¹¹².

1. Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer di Istana Negara 19 April 1959¹¹³

Pidato Presiden Soekarno di hadapan para wanita militer pada tanggal 19 April 1959 di Istana Negara merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan gagasan Demokrasi Terpimpin. Disampaikan beberapa bulan sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, naskah pidato ini merefleksikan pergulatan intelektual dan politik Soekarno dalam merumuskan arah baru bagi bangsa Indonesia. Melalui bahasa yang argumentatif, simbolis, dan padat makna, Soekarno tidak hanya menjelaskan konsep kepemimpinan nasional yang terpusat, tetapi juga menempatkan perempuan sebagai bagian integral dalam proyek revolusi sosial dan politik.

Pidato tersebut diawali dengan kalimat permohonan maaf:

¹¹² Aristoteles, *Retorika*, diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 7.

¹¹³ Soekarno, “Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer,” Istana Negara, 19 April 1959, transkrip.

“Saudara-saudara sekalian, saja minta dima’afkan segala kesalahan saja, kesalahan jang saja ketahoei dan jang tidak saja ketahoei.”

Secara tekstual, pembukaan ini menunjukkan kekuatan ethos dalam retorika Aristoteles. Soekarno membangun kredibilitas moralnya dengan menampilkan sikap rendah hati. Ungkapan ini bukan hanya pembuka yang sopan, melainkan strategi retorik untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang manusiawi, yang memiliki kesadaran akan keterbatasan diri. Dengan demikian, naskah pidato memancarkan citra pemimpin yang bukan menempatkan diri sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian dari rakyat.

Selanjutnya, Soekarno memperkenalkan kerangka konseptual tentang gerakan perempuan Indonesia. Ia mengelompokkan gerakan tersebut ke dalam tiga tingkatan kesadaran: domestik, persamaan hak, dan kesadaran sosial revolusioner. Pola klasifikasi ini memperlihatkan kekuatan logos dalam naskah pidato. Struktur argumentasi disusun dengan urutan yang sistematis dan logis. Pada tingkat pertama, Soekarno mengkritik pandangan tradisional yang membatasi perempuan dalam peran rumah tangga. Ia menulis:

“Gerakan wanita jang sejara hendak mentjari kesempoernaan kemanoesiaan sadja. Wanita djenis ini dipingit, tidak mengenal pengetahuan, tidak bisa masak, tidak bisa mendjahit. Lantas timbulah perkempoelan-perkempoelan wanita bersama-sama mempeladjari ilmu masak, ilmu djahit, ilmu roemah tangga... seperti pakatan ‘mode show’ atau sekolah ikat konde di Bogor jang meminta oepah f. 5, tiap matjam konde.¹¹⁴”

¹¹⁴ Soekarno, “Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer,” Istana Negara, 19 April 1959, transkrip.

Kutipan ini memperlihatkan bahwa Soekarno memanfaatkan gaya satir untuk mengkritik orientasi perempuan yang masih sempit. Pilihan kata-kata yang kontras antara “kesempurnaan kemanusiaan” dan “mode show” menghasilkan efek retorik yang kuat secara tekstual. Ia tidak menggunakan istilah akademik, tetapi memanfaatkan bahasa sehari-hari untuk menimbulkan kesadaran sosial. Dalam struktur teks, ironi berfungsi sebagai alat logis dan moral yang menyoroti jarak antara nilai yang diidealkan dan kenyataan sosial.

Tingkatan kedua menggambarkan tahap perjuangan perempuan dalam menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Soekarno menulis:

“Gerakan wanita jang mengejar hak-hak jang sama dengan kaum prija: prija boleh bersekolah, wanita haroes boleh sekolah; prija boleh menjadi pegawai, wanita haroes boleh menjadi pegawai... Kaum prija kadang-kadang mengira dirinja lebih berhak mengoeasai doenia ini. Wanita hanja boleh di dapur, tidak boleh mempunjai hak sama.”

Struktur kalimat yang berulang menegaskan bentuk paralelisme dalam naskah, yang menjadi ciri khas retorika Soekarno. Pola ini tidak hanya menambah keindahan stilistik, tetapi juga memperkuat daya argumentatif teks.



BUNG KARNO PENGGALI MUTIARA PANCA SILA



Subscribe

1 rb

Bagikan

...

Sumber : Channel Youtube BPIP RI tentang Penggali Mutiara Pancasila

<https://www.youtube.com/watch?v=TzJMh-gnaOc>

Pada awal penerapan Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 hingga

Namun, Soekarno tidak berhenti pada gagasan kesetaraan. Ia menolak meniru feminism Barat dengan menulis:

“Meskipoen wanita telah beridjoe hak sama dengan prija, dalam masjarakat kapitalis seperti sekarang, kebahagiaan tak tertepai. Wanita masih lebih menderita dari prija. Di dasar kalboe tiap wanita ada keinginan pada ‘liefde en moederschap’.” Selanjutnya ia menambahkan:

*“Lihat di Amerika dan Perantjis persamaan hak soedah 100%, tetapi apakah wanita disana bahagia? Kaum prija disana bahagia? Tidak! Djangen kira dengan persamaan hak sadja, lantas berbahagia!”*¹¹⁵

Dalam konteks logos, Soekarno menampilkan analisis yang konsisten dengan ideologinya: kesetaraan formal tidak akan bermakna tanpa keadilan sosial. Ia menggunakan pertanyaan retoris untuk menegaskan pandangannya, teknik yang sering muncul dalam teks-teks politik klasik¹¹⁶.

Pada tingkatan ketiga, Soekarno mengarahkan argumen menuju kesadaran sosial revolusioner. Ia menulis:

“Kita harus membangun masjarakat sosialis Indonesia! Di tiap kampoenge nanti ada listrik di roemah, sehingga lampoe tidak pakai minjak tanah mahal. Ada dapoeer oemoem jang masak makanan sehat dengan harga moerah. Ada ‘peri dalam peti’ jang mengerjakan pakajan kotor. Ada polikliniek oemoem dengan dokter dan peralatan lengkap.”

Secara tekstual, bagian ini memperlihatkan kekuatan patos, bukan melalui emosi pribadi, tetapi melalui imajinasi sosial yang konkret. Soekarno menggambarkan masa depan dengan simbol-simbol

¹¹⁵ Soekarno, “Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer,” Istana Negara, 19 April 1959, transkrip.

¹¹⁶ Aristoteles, *Retorika*, diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 71.

kesejahteraan rakyat: listrik, dapur umum, dan poliklinik. Imaji ini membangun harapan dan solidaritas kolektif. Dalam retorika Aristotelian, ini adalah bentuk patos yang bersifat visioner menggerakkan perasaan melalui bayangan rasional tentang masa depan. Dalam bagian berikutnya, Soekarno menyatukan gagasan sosialisme dengan proyek politik nasional:

“Demokrasi Terpimpin kita boekan demokrasi liberal barat jang banjak partainja! Kita tolak ‘oppositie’ jang memetjah belah! Kita kembali ke Oendang-Oendang Dasar 1945! Di bawah pimpinan ‘dirigent’, mari kita gotong-rojong membangun masjarakat ‘edil dan makmoer’!”¹¹⁷

Kalimat ini menunjukkan bagaimana teks pidato menggabungkan fungsi ideologis dan politis. Ia menolak sistem politik Barat dan mengajukan alternatif berbasis nilai nasional. Dari sisi *logos*, struktur kalimat menunjukkan pola deduktif: pernyataan penolakan diikuti dengan ajakan konstruktif.

Penegasan nilai-nilai lokal seperti gotong-rojong dan Oendang-Oendang Dasar 1945 memperkuat ethos nasional dalam teks pidato. Soekarno menampilkan demokrasi bukan sebagai kebebasan mutlak, tetapi sebagai disiplin moral yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Pemilihan istilah “dirigent” memperkuat metafora musical: pemimpin bukan penguasa tunggal, tetapi pengarah harmoni sosial.

Pada bagian penutup, Soekarno menulis:

“Djangan senang dengan fase pertama! Djangan tjoema fase kedua! Sedar, sedar, sedar! Bersatulah dengan prija seperti gelombang bandjir toendoek segala rintangan! Djangan berhenti! Berhenti berarti moendoer, moendoer berarti mati!”

Repetisi dan irama kalimat dalam naskah ini menunjukkan kekuatan stilistika yang khas. Pengulangan kata “*sedar*” berfungsi sebagai seruan

¹¹⁷ Soekarno, “Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer,” Istana Negara, 19 April 1959, transkrip.

kesadaran kolektif, sementara metafora “gelombang bandjir” melambangkan kekuatan sosial yang menyapu hambatan. Secara tekstual, inilah puncak patos yang mendorong pembaca atau pendengar untuk bertindak.

Secara keseluruhan, naskah pidato ini memperlihatkan kesatuan harmonis antara ethos, logos, dan patos. *Ethos* terbangun melalui sikap rendah hati dan kredibilitas moral yang konsisten. *Logos* tampak dalam struktur argumentasi yang sistematis dan logis, sementara patos hadir melalui daya imajinatif dan simbolik yang menggugah kesadaran kolektif. Ketiganya berpadu dalam struktur bahasa yang padat, ritmis, dan penuh pengulangan, menghasilkan efek persuasi yang kuat tanpa perlu bergantung pada ekspresi atau intonasi¹¹⁸.

Naskah pidato ini bukan sekadar teks politik, melainkan dokumen ideologis yang menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat rekayasa sosial. Soekarno menggabungkan kritik terhadap kapitalisme, penolakan terhadap liberalisme Barat, dan cita-cita sosialisme Indonesia dalam satu konstruksi linguistik yang kohesif. Melalui kekuatan kata dan struktur kalimat, pidato ini menegaskan arah baru bangsa: dari kebebasan individual menuju solidaritas kolektif, dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.

¹¹⁸ Aristoteles, *Retorika*, diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 8.

2. Pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka 27 Januari 1960¹¹⁹

Pidato Presiden Soekarno kepada para hakim, jaksa, polisi, dan pegawai Jawatan Bea Cukai serta Imigrasi pada 27 Januari 1960 di Istana Merdeka menjadi salah satu momen penting yang menandai fase konsolidasi politik dan ideologis dalam era Demokrasi Terpimpin. Disampaikan sekitar enam bulan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pidato ini memperlihatkan bagaimana Soekarno menggunakan kekuatan retorika untuk menegaskan orientasi baru negara, menanamkan kesadaran revolusioner, serta menuntut reorientasi total dalam aparatur pemerintahan. Pidato ini juga menjadi cerminan dari upaya Soekarno membangun sistem hukum dan pemerintahan yang tidak lagi berlandaskan pada liberalisme kolonial, tetapi berpijak pada semangat revolusi nasional.

Pidato dimulai dengan ucapan syukur dan penegasan posisi strategis pertemuan tersebut. Soekarno membuka ucapannya dengan kalimat yang khas:

“Saudara-saudara sekalian, saja bersyukur kehadirat Tuhan bahwa Saudara-saudara pada hari ini telah berkumpul di Istana Merdeka, berhadapan muka dengan saja, dengan Menteri Pertama, dengan Menteri Kehakiman dan Menteri-menteri lain serta sebanyak besar daripada para Menteri Kabinet Kerja pula.”¹²⁰

Dengan pembukaan yang penuh rasa hormat, Soekarno menegaskan pentingnya forum tersebut bukan sekadar sebagai rapat administratif, tetapi

¹¹⁹ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

¹²⁰ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

sebagai pertemuan ideologis untuk membentuk kembali arah moral dan tanggung jawab aparatur negara.

Soekarno kemudian menekankan bahwa ini adalah kali kedua ia mengadakan pertemuan penting di Istana Merdeka. Kali pertama, ujarnya, adalah ketika ia mengumpulkan para “udjang-udjang penting” dari Universitas Indonesia, yang pada masa kolonial bernama *Universiteit van Indonesie*. Dalam bagian ini, Soekarno memanfaatkan perbandingan historis untuk menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem pendidikan kolonial dan semangat nasional yang ingin ia bangun. Ia berkata,

“Dengan kedjadian ini saja menerangkan, penggantian ‘Universiteit van Indonesie’ menjadi ‘Universitas Indonesia’ itu adalah penggantian ‘hantjor’ sadja. Tetapi jang lebih penting ialah ‘mentaliteit’, pengertian jang benar tentang tudjuan Universitas ini. Dahulu Universiteit van Indonesie hanja untuk memperoduksi kader bagi ‘koloniaal maatschappij’. Sekarang Universitas Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan rakjat Indonesia, kepada masjarakat jang adil dan makmur.¹²¹”

Melalui contoh ini, Soekarno tidak hanya berbicara mengenai universitas sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadikannya simbol bagi transformasi bangsa dari struktur kolonial menuju struktur nasional. Ia mengaitkan perubahan nama dengan perubahan jiwa dan semangat zaman, menandakan bahwa revolusi yang sedang dijalankan adalah revolusi mentalitas. Di sinilah mulai terlihat elemen *logos* dalam retorika Soekarno: argumen logis yang dibungkus dalam narasi historis dan ideologis.

¹²¹ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

Setelah mengantarkan pendengar ke konteks perubahan tersebut, Soekarno masuk pada inti pesannya: perlunya reorientasi total dalam tubuh aparatur negara. Ia menyatakan,

“Saja peringatkan bahwa sedjak beberapa waktu saja telah menganjurkan, bahkan saja telah memerintahkan, agar supaja semua orang-orang jang bertugas didalam aparatur negara kita mengadakan satu reorientasi jang total. Reorientasi daripada kita punya mentaliteit, daripada kita punya pandangan, daripada kita punya apparatuur, agar supaja kita bisa lebih tepat menuju kepada tudjuan jang ditjipta-tjitakan oleh kita semua.”¹²²

Pernyataan ini mencerminkan ciri khas *Demokrasi Terpimpin*, yakni tuntutan akan kesatuan ide, kesetiaan politik, dan keberpihakan total pada cita-cita revolusi. Soekarno ingin memastikan bahwa aparatur negara bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi bagian dari kekuatan revolusi nasional yang harus memiliki kesadaran ideologis.

Soekarno kemudian mengaitkan hal ini dengan pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal sebagai *Manifesto Politik* atau *Manipol*. Ia menjelaskan, *“Didalam pidato saja pada tanggal 17 Agustus 1959, jang terkenal dengan perkataan ‘Manifesto Politik’, saja telah terangkan dengan djelas, bahwa kita pada tanggal 5 Djuli 1959 mengadakan Dekrit Presiden, bahwa kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya itu berarti kita mengadakan re-orientasi jang baru, re-orientasi total daripada kita punya sikap terhadap kepada tudjuan jang akan kita depot.”* Dengan kutipan ini, Soekarno mempertegas bahwa

¹²² Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

Dekrit 5 Juli bukan sekadar tindakan konstitusional, melainkan langkah revolusioner yang menandai babak baru ideologi negara.

Dalam bagian selanjutnya, Soekarno menekankan bahwa hukum di era revolusi harus disesuaikan dengan semangat zaman. Ia berkata,

“Revolusi kita membutuhkan reorientasi ini. Kita hidup didalam zaman revolusi. Hukum jang berdjalan harus hukum revolusi. Hukum revolusi minta ketegasan, kekerasan dasar-dasar hukum jang lebih tadjam daripada jang dalam zaman normal.”¹²³

Pandangan ini mencerminkan pemikiran politik Soekarno bahwa keadilan dalam masa revolusi tidak bisa diukur dengan ukuran hukum biasa. Hukum harus menjadi alat perjuangan, bukan semata sistem normatif. Dalam konteks inilah muncul logika bahwa stabilitas revolusi hanya dapat dijaga melalui ketegasan negara. Untuk memperkuat pesan tersebut, Soekarno mengutip contoh konkret dari masa revolusi fisik. Ia berkata,

“Saja mengingatkan waktu revolusi fisik dulu, banjak keputusan keras jang diambil. Ada seorang perampok di Djawa Timur jang telah membikin tidak aman, saja perintahkan: ‘Habisi dia!’ Dan habislah perkara itu, Djawa Timur mendjadi aman.”¹²⁴

Contoh ini memperlihatkan bagaimana Soekarno menggunakan anekdot pengalaman pribadi untuk menegaskan pentingnya tindakan tegas dalam menghadapi gangguan terhadap keamanan negara. Retorika seperti ini mengandung elemen *ethos* dan *pathos* sekaligus: *ethos* karena ia berbicara sebagai pemimpin revolusi yang berpengalaman, dan *pathos* karena ia membangkitkan rasa keharusan moral untuk bertindak tegas.

¹²³ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

¹²⁴ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

Selanjutnya, Soekarno mengaitkan persoalan revolusi hukum dengan situasi ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap revolusi tidak hanya datang dari musuh bersenjata, tetapi juga dari pengacau ekonomi. Ia berkata,

“Sekarang kita menghadapi tantangan baru, terutama dibidang ekonomi. Ada orang-orang jang melakukan pengatjan ekonomi, seperti menimbun beras 6000 ton. Terhadap mereka ini harus diambil tindakan tegas dengan hukum revolusi.”

Kalimat ini menandai perluasan konsep “musuh revolusi” ke bidang ekonomi, yang kemudian menjadi dasar pemberian tindakan keras pemerintah terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan rakyat.

Pidato ini juga menampilkan semangat keberanian yang luar biasa. Soekarno menyerukan,

“Oleh karena itu saja serukan: ‘Audace, audace, encore de l’audace, toujours de l’audace!’ – Keberanian, keberanian, sekali lagi keberanian, selalu keberanian!”

Seruan dalam bahasa Prancis ini, yang diambil dari semboyan revolusi Prancis abad ke-XVIII, menunjukkan wawasan internasional Soekarno sekaligus penegasannya bahwa revolusi Indonesia adalah bagian dari gerak sejarah dunia yang menuntut keberanian tanpa henti.

Soekarno menutup pidatonya dengan penegasan tanggung jawab moral dan politik para aparat negara. Ia berkata,

“Saudara-saudara adalah orang-orang penting dalam negara. Sebagian besar daripada nasib hidup negara kita ini terletak diatas pundak Saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyelesaikan revolusi kita ini dengan ketegasan dan keberanian.¹²⁵”

¹²⁵ Soekarno, “Pidato kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas Bea Cukai serta Imigrasi,” Istana Merdeka, 27 Januari 1960, transkrip.

Dalam pernyataan ini terkandung konsep legitimasi karismatik bahwa kekuasaan dijalankan bukan semata karena aturan formal, tetapi karena kepercayaan moral terhadap pemimpin revolusi¹²⁶.

3. Pidato Presiden pada resepsi pembukaan Seminar Hukum Nasional

Indonesia di Istana Negara Jakarta 12 Maret 1963¹²⁷

Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara Jakarta, 12 Maret 1963, merupakan salah satu ekspresi paling jelas dari usaha Soekarno dalam meletakkan dasar konseptual bagi pembentukan sistem hukum yang berakar pada revolusi nasional. Pidato ini tidak hanya menyampaikan arahan kebijakan hukum, tetapi juga menjadi refleksi filosofis mengenai hubungan antara revolusi, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam konteks historis, pidato ini disampaikan pada masa ketika Demokrasi Terpimpin telah mencapai puncak konsolidasi, dan Soekarno berusaha menegaskan kembali arah revolusi Indonesia agar tidak kehilangan semangat ideologisnya.

Soekarno membuka pidatonya dengan menjelaskan latar belakang acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah menugaskan Menteri Kehakiman untuk berbicara terlebih dahulu sebagai pengantar dari amanat utama yang hendak ia sampaikan. Dalam gaya khasnya, Soekarno berkata,

“Saja telah memerintahkan Saudara Menteri Kehakiman untuk berpidato disini sebagai forerunner, sweeper daripada amanat jang hendak saja utjapkan.”¹²⁸

Kalimat ini mencerminkan gaya kepemimpinan Soekarno yang hierarkis namun komunikatif. Ia memperlihatkan posisinya sebagai pusat

¹²⁶ Aristoteles, *Retorika*, diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 7.

¹²⁷ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

¹²⁸ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

otoritas revolusi, sementara para menteri bertugas membuka jalan bagi pemikiran besar yang ia rumuskan.

Soekarno kemudian menegaskan bahwa sebenarnya amanat yang akan disampaikannya tidak lagi baru, sebab telah ia uraikan sebelumnya dalam Kongres Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) di Jakarta. Ia berkata,

“Amanat saja sebenarnya tidak perlu diberikan lagi, karena saja telah berikan pada kongres Persahi di Djakarta.”

Namun, ia memandang penting untuk menegaskan kembali makna “hukum nasional” di hadapan para sarjana hukum dan aparat negara.

“Seminar ini dinamakan Seminar Hukum Nasional Indonesia, dan saja harap Saudara-saudara dapat menjalami sedalam-dalamnya apa jang dimaksudkan dengan perkataan ‘hukum nasional’.”

Bagi Soekarno pembentukan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses revolusi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa revolusi yang sedang dijalankan bangsa ini merupakan gerakan menyeluruh yang meliputi semua aspek kehidupan. Dengan nada reflektif, ia berkata, *“Revolusi kita ini menuju kepada kenasionalan. Nasionalan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, kebudajaan dan lain-lain. Revolusi Indonesia adalah ‘a summing up of many revolutions in one generation’ – revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi sosial, bahkan revolusi manusia Indonesia baru.”* Pernyataan ini memperlihatkan pandangan holistik Soekarno terhadap revolusi: ia tidak memandangnya sebagai peristiwa politik semata, melainkan sebagai perubahan total terhadap cara berpikir, sistem nilai, dan struktur sosial bangsa.

Dalam penjelasannya, Soekarno menegaskan bahwa seluruh aspek revolusi politik, ekonomi, dan kebudayaan berkisar pada satu poros, yaitu nasionalisme.

“Revolusi Politik Indonesia adalah hal nasional. Revolusi Kebudajaan Indonesia adalah hal nasional. Revolusi ekonomi di Indonesia adalah hal nasional. Kita menuju kepada ‘nation building’.”¹²⁹

Ia menggunakan istilah *nation building* untuk menunjukkan bahwa seluruh proses revolusi adalah upaya membangun bangsa dalam pengertian yang utuh, baik secara spiritual, sosial, maupun institusional.

Soekarno lalu menghidupkan pidatonya dengan sebuah anekdot yang kuat secara retoris. Ia menceritakan pertemuannya dengan pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro.

“Waktu saja bertemu dengan Fidel Castro di Hawana, saja tanpa: ‘Fidel, revolusi disini itu revolusi apa? Apakah copy daripada revolusi Amerika atau revolusi Perancis atau revolusi Soviet?’ Fidel menjawab: ‘No, Bung Karno, the Cuban revolution is a Cuban revolution.’” Dari percakapan itu, Soekarno menarik pelajaran untuk Indonesia: *“Demikian pula revolusi kita. Revolusi kita bukan copy daripada revolusi manapun. Revolusi Indonesia adalah Revolusi Indonesia. ‘The Indonesian Revolution is an Indonesian Revolution.’”*

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana Soekarno menolak imitasi ideologis dari luar. Ia menegaskan bahwa revolusi Indonesia harus berpijak pada pengalaman dan kepribadian bangsa sendiri.

Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa sistem hukum nasional tidak boleh meniru sistem hukum kolonial atau Barat. Hukum nasional harus tumbuh dari cita-cita rakyat, nilai-nilai budaya, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa bangsa. Oleh karena itu, Soekarno memperingatkan para sarjana hukum agar tidak memandang “nasional” hanya dalam arti sempit. Ia menegaskan,

“Djangan ada pemuda-pemuda, Sardjana-sardjana Hukum jangan mengira nasional adalah sekadar geografi atau bangsa sadja. Tidak! Nasional

¹²⁹ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

harus kita artikan dalam arti jang seluas-luasnja dan sedalam-dalamnya.”¹³⁰



Genta Suara Revolusi Indonesia : Pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1963 tentang Revolusi Indonesia

 mhdk astar 313 subscriber   16   Bagikan 

Sumber : Youtube Channel *mhdk astar* (yang diambil dari Arsip Nasional RI) Tentang Genta Revolusi Indonesia 1963 https://www.youtube.com/watch?v=rjFusJm4_3s

Soekarno kemudian memperkuat klaim karismatiknya sebagai pemimpin bangsa. Ia menyatakan, “*Saja dinamakan ‘Pembimbing Lidah Bangsa Indonesia’. Bukan karena saja pandai berpidato atau pandai menulis, tetapi karena saja mengerti dan mengetahui sedalam-dalamnya daripada bangsa Indonesia ini. Saja dilahirkan dikalangan bangsa Indonesia jang miskin. Saja mengerti getaran rakjat Indonesia itu. Saja mengerti segala kehendak bangsa Indonesia, mengerti segala tjita-tjita bangsa Indonesia.*”

Kalimat ini bukan sekadar pembelaan personal, tetapi merupakan pernyataan ideologis: bahwa kepemimpinan revolusi harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap rakyat. Pernyataan ini mencerminkan bentuk *legitimasi*

¹³⁰ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

karismatik, di mana kepemimpinan didasarkan pada keyakinan moral dan pengabdian pada bangsa, bukan semata jabatan formal.

Soekarno kemudian menegaskan hakikat revolusi sebagai perubahan yang total. Ia berkata,

*“Revolusi Indonesia menghendaki ‘Umgestaltung’ daripada segala hal. ‘Revolution rejects yesterday’.*¹³¹

Dengan mengutip istilah Jerman “Umgestaltung” (perubahan bentuk), Soekarno menegaskan bahwa revolusi harus mengubah struktur lama secara menyeluruh, termasuk sistem hukum. Ia menambahkan,

*“Dan saja mengertami bahwa revolusi Indonesia itu menghendaki satu hal, karena saja ‘mij oren to huisbaron golegel og de bodem’ – saja dilekatkan dibumi, saja mengerti rakjat digitis.*¹³²

Kalimat ini menunjukkan keakraban Soekarno dengan rakyat kecil yang menjadi sumber legitimasi moral dan politiknya.

Lebih lanjut, Soekarno menugaskan para sarjana hukum untuk menjadi pelopor pembaruan sistem hukum nasional. Ia mengingatkan agar kaum intelektual tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga penggerak ide.

*“Oleh karena itu saja di kongres Persahi tempo hari berkata kepada shli hukum: ‘Tut wuri handajani’ – ikut dari belakang sambil memimpin. Kita harus ‘looking forward’ 50 tahun. Tidak ada revolusi besar jang tidak ‘look forward’*¹³³.

Pernyataan ini mengandung pesan mendalam bahwa pembangunan hukum harus berorientasi masa depan, bukan sekadar reaktif terhadap masa kini.

¹³¹ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

¹³² Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

¹³³ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

Soekarno kemudian merumuskan tiga kerangka dasar revolusi Indonesia:

“Negara Republik Indonesia Kesatuan jang berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, Masyarakat adil dan makmur tanpa ‘exploitation de l’homme par l’homme’, dan Persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia.”¹³⁴

Namun, ia segera menambahkan bahwa revolusi Indonesia tidak berhenti pada tiga kerangka tersebut.

“Fidel Castro berkata: ‘The Cuban revolution is a Cuban revolution but there is an essential humanity in the Cuban revolution’. Demikian pula revolusi kita: ‘The Indonesian revolution is an Indonesian revolution but there is an essential humanity in the Indonesian revolution’.¹³⁵”

Dengan kutipan ini, Soekarno menekankan bahwa inti revolusi Indonesia adalah kemanusiaan universal yang berpijak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Pidato ini kemudian diakhiri dengan penegasan tugas utama kaum sarjana hukum. Soekarno menyerukan,

“Saudara-saudara sardjana hukum saja tugaskan: mentjarilah satu hukum nasional jang tjotjok dengan revolusi Indonesia, jang dapat kita pergunakan sebagai alat daripada Revolusi Indonesia untuk menjapai apa jang kita ‘look forward’ 50 tahun jang akan datang.¹³⁶”

Kalimat ini merupakan puncak dari gagasan Soekarno tentang hukum nasional: hukum harus menjadi alat revolusi, bukan sekadar perangkat administrasi negara.

¹³⁴ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

¹³⁵ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

¹³⁶ Soekarno, “Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia,” Istana Negara, 12 Maret 1963, transkrip.

Secara substansial pidato Soekarno pada 12 Maret 1963 ini menegaskan pandangan bahwa hukum nasional Indonesia harus lahir dari revolusi nasional dan menjadi instrumen bagi tercapainya cita-cita sosialisme Indonesia. Ia menggabungkan unsur intelektual, moral, dan emosional dalam satu kesatuan retorika yang kuat. Pidato ini bukan hanya ajakan untuk membangun sistem hukum baru, tetapi juga menjadi pernyataan ideologis tentang arah revolusi Indonesia: revolusi yang nasional dalam bentuk, universal dalam nilai, dan humanis dalam tujuan.

Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia tahun 1963 memperlihatkan kekuatan retorika yang utuh melalui perpaduan ethos, logos, dan pathos. Ethos tampak dalam cara Soekarno menegaskan dirinya sebagai “*Pembimbing Lidah Bangsa Indonesia*” yang memahami cita-cita dan penderitaan rakyat. Pernyataan seperti ini bukan sekadar pemberaran posisi politik, tetapi penguatan legitimasi moral sebagai pemimpin yang berakar pada pengalaman kolektif bangsa. Ethos juga tercermin dalam konsistensinya menegaskan bahwa hukum nasional harus lahir dari semangat revolusi, bukan hasil tiruan sistem Barat. Sementara itu, kekuatan logos muncul dari struktur argumentasi yang sistematis: Soekarno memulai dari penegasan makna revolusi, menguraikan hubungannya dengan nasionalisme, dan menurunkannya menjadi konsepsi hukum nasional yang kontekstual. Melalui pernyataan seperti “*Revolusi Indonesia menghendaki ‘Umgestaltung’ daripada segala*

hal”, ia menunjukkan logika revolusioner yang menempatkan hukum sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang menyeluruh.

Di sisi lain, pidato ini juga mengandung kekuatan pathos yang membangkitkan kesadaran emosional dan kebanggaan nasional. Soekarno menanamkan perasaan identitas dan kepercayaan diri bangsa melalui kalimat seperti “*Revolusi Indonesia adalah Revolusi Indonesia*” yang menegaskan orisinalitas perjuangan nasional. Patos ini bekerja dengan cara menghubungkan gagasan hukum dan revolusi dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataannya bahwa revolusi Indonesia memiliki “*essential humanity*”. Dengan memadukan tiga unsur retorika Aristoteles tersebut, naskah pidato Soekarno tidak hanya menjadi instruksi politik, melainkan juga teks ideologis yang menggerakkan kesadaran nasional. Ia berhasil mengubah wacana hukum menjadi bagian dari proyek revolusi moral dan intelektual bangsa—sebuah seruan agar hukum nasional menjadi alat pembebasan, bukan sekadar perangkat administratif negara.

4. Pidato Presiden pada pembukaan penggembelangan kader revolusioner

Angkatan Dwikora di Istana Negara Jakarta 31 Agustus 1964¹³⁷

Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan penggembelangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora di Istana Negara Jakarta tanggal 31 Agustus 1964 merupakan salah satu momentum penting dalam upaya ideologisasi Revolusi Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin. Pidato ini

¹³⁷ Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembelangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

bukan hanya seruan politik luar negeri terhadap pembentukan negara Malaysia, melainkan juga pembentukan kesadaran kader yang menjadi “tulang-tulang hidup” Revolusi. Soekarno membuka pidatonya dengan pernyataan yang sangat khas:

“Hari ini saja memberi amanat pemuka-pemuka penggerak Kader Revolusi Indonesia ‘Dwikora’. Kader Revolusi. Saudara-saudara apakah entah memberi pengertian kader. Kader itu apa? Kader adalah, kakaknya, tulang-tulang, bukan tulang-tulang mati, tetapi tulang-tulang hidup bagi pelaksanaan sesuatu hal.”

Dari sini Soekarno menegaskan bahwa para peserta bukan sekadar massa, tetapi elemen vital yang menghidupkan Revolusi. “Saudara-saudara adalah tulang-tulang hidup pelaksanaan Revolusi,” ujarnya, menekankan pentingnya kesadaran diri setiap kader sebagai subjek aktif perjuangan.

Dalam pidato tersebut, Soekarno kemudian menguraikan apa yang ia sebut sebagai *hukum-hukum revolusi*. Ia berkata,

“Hukum-hukum revolusi itu, ketjuali ta besar jang entah diketahui, jaitoe romantika, dinamika, dialektika, pada pokoknya dalam persoalan revolusi untuk punja kawan dan punja lawan.¹³⁸”

Kalimat ini menjadi prinsip dasar: setiap revolusi mesti tegas menetapkan kawan dan lawan, tanpa keraguan dan tanpa kompromi. Soekarno menolak segala bentuk revolusi yang bersifat setengah-setengah. Ia menyatakan,

“Revolusi jang kamu-kira revolusi, begitu ‘revolusi setengah’ atau ‘revolusi pembajarn makanan’ Revolusi rugi. Oleh sebab itu maka revolusi

¹³⁸ Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

tidak boleh main-main saja, tetapi harus didjalankan dari atas dan dari bawah.”¹³⁹

Selanjutnya Soekarno mengemukakan konsepsi revolusi sebagai harmoni antara penghancuran dan pembangunan.

“Revolusi adalah simfoni destruksi dan konstruksi, simfonianja pendjebolan dan pembangunan, karena destruksi sadja atau pendjebolan sadja tanpa konstruksi atau pembangunan, adalah sama dengan anarchi dan sebaliknya konstruksi atau pembangunan sadja, tanpa destruksi atau pendjebolan, berarti kompromi atau reformisme.”¹⁴⁰

Pandangan ini mencerminkan gagasan dialektika revolusi yang menjadi ciri utama pemikiran Soekarno di awal 1960-an, yaitu bahwa pembaharuan tidak mungkin tanpa penghancuran struktur lama, namun kehancuran tanpa arah hanya menghasilkan kekacauan.

Soekarno lalu berbicara tentang tahapan revolusi: “Kemudian, revolusi harus punya tahap-tahapnya. Dalam hal Revolusi kita, tahap nasional demokratis dan tahap sosialis.” Tahap nasional-demokratis, menurutnya, adalah perjuangan melawan imperialisme dan feudalisme, sedangkan tahap sosialis merupakan pembangunan masyarakat tanpa eksplorasi manusia atas manusia. Dwikora hadir dalam konteks tahapan pertama, di mana perjuangan nasional dan antiimperialisme masih menjadi fokus utama negara. Karena itu, Soekarno mengaitkan penggembangan kader dengan kebutuhan politik luar negeri khususnya konfrontasi terhadap Malaysia yang dipandang sebagai proyek imperialisme baru di Asia Tenggara.

¹³⁹ Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

¹⁴⁰ Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

Dalam bagian lain pidato, Soekarno menegaskan bahwa setiap revolusi harus memiliki arah dan program yang jelas:

*“Harus punya program jang jelas dan tepat, seperti dalamnya Madjalah kita mempunjai dengar-dengar jang jelas dan tepat: a. Dasar tudjuan dan sendi-sendii Revolusi Indonesia; b. Kekuatan-kekuatan sosial revolusi Indonesia; c. Sifat Revolusi Indonesia; d. Hari depan Revolusi Indonesia; e. Musuh-musuh Revolusi Indonesia.”*¹⁴¹

Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa Dwikora tidak semata-mata tindakan politik, melainkan juga proyek ideologis dan organisatoris. Setiap kader harus memahami arah perjuangan revolusi secara sistematis.

Soekarno kemudian menyambungkan pidatonya dengan penegasan mengenai Pancasila. Ia berkata,

*“Pantjasila pertama, Saudara-Saudara, tetapi saja kira pada ini hari adalah lebih tepat kita mengatakan satu pendengar luas... Pantjasila itu sebagai dasar daripada negara Republik Indonesia, falsafah negara Republik Indonesia, tetapi diluar daripada itu adalah satu alat daripada revolusi, Pantjasila diluar sebagai ide daripada revolusi.”*¹⁴²

Baginya, Pancasila tidak hanya dasar konstitusional, melainkan juga ide dinamis untuk memandu tindakan revolusi dan menjadi senjata moral melawan imperialisme.

Soekarno juga memperjelas posisi ide dalam revolusi, dengan mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdiri di atas ide, berbeda dengan Malaysia yang dianggap tidak memiliki landasan ideal. “Negara kita adalah untuk realisasi satu ide... Malaysia itu Saudara-Saudara... tidak berdiri diatas ide.” Ia melanjutkan dengan mengisahkan

¹⁴¹ Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

¹⁴² Soekarno, “Pidato Pembukaan Penggembangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora,” Istana Negara, 31 Agustus 1964, transkrip.

pertemuannya dengan Tunku Abdul Rahman di Tokyo, di mana ia menuduh Malaysia berdiri atas kalkulasi politik untuk “*overvote orang Tionghoa*.” Dengan kisah ini, Soekarno menanamkan keyakinan pada kader bahwa konfrontasi terhadap Malaysia bukan agresi, melainkan pembelaan terhadap ide revolusi dan keadilan universal.

Lebih jauh Soekarno memperingatkan bahwa Malaysia dibentuk oleh kekuatan kolonial untuk “*contain Indonesia*,” atau membatasi pengaruh Revolusi Indonesia. Ia berkata, “Mereka mendirikan Malaysia untuk contain Indonesia, contain itu untuk menggenggam, mengandit, membatasi Indonesia dengan sampai Indonesia itu mati.” Pernyataan ini menegaskan posisi Dwikora sebagai tindakan pertahanan ideologis dan politik terhadap ancaman neokolonialisme.

Pidato tersebut juga menampilkan sisi personal Soekarno. Ia mengisahkan pengalamannya di penjara kolonial, menggambarkan bahwa ide tidak bisa dikurung: “*Ideas can break prison walls*.” Kisah ini ia gunakan untuk membangkitkan semangat kader agar tak gentar menghadapi represi atau tekanan. Ia menceritakan bagaimana ketika dipenjara di Bandung, ia bermeditasi dan merasa bahwa gagasannya tentang kemerdekaan mampu memecahkan tembok sel. Melalui kisah ini, Soekarno menanamkan keyakinan bahwa kekuatan ide revolusi melampaui kekuatan fisik, dan bahwa kader sejati adalah mereka yang memiliki api ide dalam dada.

Menjelang akhir pidato, Soekarno menolak pandangan sempit tentang siapa yang layak disebut revolusioner. Ia berkata, “Revolusioner tidak disenutkan kepada orang jang harus dari kalangan producer sadja... oleh karena jang dinamakan revolusioner, adalah orang-orang jang menghendaki perubahan-perubahan dan usaha menghendaki perubahan-perubahan von Grund aus.” Dengan demikian, bagi Soekarno, seorang revolusioner bisa datang dari mana saja, ulama, tentara, pemuda, maupun rakyat kecil. selama mereka berpegang pada ide dan disiplin perjuangan.

Pidato Soekarno pada pembukaan Penggembelangan Kader Revolusioner Angkatan Dwikora tahun 1964 menampilkan keseimbangan kuat antara ethos, logos, dan pathos. Dari sisi ethos, Soekarno membangun wibawa moral dan kredibilitasnya sebagai pemimpin revolusi melalui penyebutan dirinya sebagai bagian dari perjuangan panjang bangsa, bukan sekadar kepala negara. Ia menegaskan otoritasnya dengan memosisikan diri sebagai sumber ide dan arah revolusi, namun tetap menampilkan kedekatan dengan rakyat dan kader, sebagaimana terlihat dalam kalimat “*Saudara-saudara adalah tulang-tulang hidup pelaksanaan Revolusi.*” Dengan bahasa tersebut, Soekarno menciptakan kesatuan moral antara dirinya dan para pendengar: bahwa revolusi bukan milik pemimpin, tetapi tugas kolektif yang menghidupkan bangsa. Ethos Soekarno juga tampak dalam penegasan ideologisnya bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan “*alat daripada revolusi.*” Pernyataan ini memperkuat

legitimasiya sebagai pemimpin ideologis yang memahami arah moral dan historis perjuangan bangsa Indonesia.

Sementara itu, logos dalam pidato ini terlihat dari struktur argumentasinya yang teratur dan logis. Soekarno menjelaskan hukum-hukum revolusi, tahapan-tahapan perjuangan, serta perbedaan antara destruksi dan konstruksi secara sistematis: revolusi harus menghancurkan tatanan lama sekaligus membangun tatanan baru. Ia menulis, *“Revolusi adalah simfoni destruksi dan konstruksi,”* menandakan pemikiran dialektisnya bahwa perubahan sejati lahir dari keseimbangan antara penghancuran dan penciptaan. Logika ini kemudian diperkuat dengan alasan geopolitik konfrontasi terhadap Malaysia bukan agresi, melainkan bagian dari perjuangan ideologis melawan imperialisme. Unsur pathos hadir melalui narasi yang menggugah emosi, seperti kisah pengalamannya di penjara kolonial saat ia berkata *“Ideas can break prison walls,”* yang menanamkan keyakinan bahwa kekuatan ide mampu mengalahkan kekuatan fisik. Dengan perpaduan ketiga unsur ini, pidato Soekarno tidak hanya memobilisasi logika kader, tetapi juga menggugah keyakinan moral dan spiritual mereka, menjadikan teks tersebut bukan sekadar perintah politik, melainkan pembentukan kesadaran revolusioner yang utuh.

5. Pidato Presiden kepada para pemimpin dari tujuh partai politik di Guest

House Istana Presiden Jakarta 27 Oktober 1965¹⁴³

Pidato Presiden Soekarno kepada para pemimpin dari tujuh partai politik di Guest House Istana Presiden pada tanggal 27 Oktober 1965 merupakan salah satu pidato paling menentukan di masa krisis nasional pasca-peristiwa 30 September. Dalam suasana yang sangat tegang, Soekarno berdiri di hadapan para pemimpin politik untuk menegaskan arah revolusi dan mempertahankan legitimasi kepemimpinannya di tengah arus tekanan politik dan militer. Dengan gaya retorika khas yang tenang namun tegas, ia membuka pidato itu dengan kalimat:

“Pada saat ini, kita sedang, seluruh bangsa Indonesia, seluruh negara, bahkan seluruh Rakyat Indonesia mengalami saat-saat jang saat kritik. Jang saja maksudkan ialah sejak terjadinya peristiwa 30 September.¹⁴⁴”

Dari awal, Soekarno berusaha menempatkan peristiwa itu bukan semata urusan keamanan, melainkan masalah politik revolusi yang lebih luas. Ia mengaku dihadapkan pada “tugas mengatasi, membereskan segala akibat-akibat daripada peristiwa 30 September itu,” dan mengingatkan bahwa tindakannya didorong oleh kewajibannya sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Namun ia juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan dengan emosi atau balas dendam. *“Pokok-pokok dari komando saja jang pertama ialah, bahwa saja menghendaki ketenangan. Dan dalam masa ketenangan itulah saja dapat*

¹⁴³ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

¹⁴⁴ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

kemudian mendjalankan tugas saja sebagai hakim tertinggi dan sebagai pimpinan negara dan revolusi.”

Soekarno meminta seluruh rakyat untuk tenang agar negara dapat menegakkan keadilan berdasarkan fakta.

“Sudah saja katakan kepada umum, bahwa saja tidak membenarkan kedjadian 30 September itu, dan bahwa saja akan menghukum siapapun jang pembuat daripada kedjadian 30 September itu. Tetapi agar supaya saja bisa bertindak tegas, maka saja komandokan ketenangan.¹⁴⁵”

Ia menolak dorongan sebagian pihak yang menghendaki tindakan keras tanpa proses yang matang, karena baginya, tindakan seperti itu akan menghancurkan negara sendiri.

Untuk menjelaskan maksudnya, Soekarno menggunakan perumpamaan yang tajam:

“Didalam rumah itu kita mengundi kuras besar... digerogoti oleh tikus... kita marah kepada tikus ini, dan kita mau sedikitnya membersihkan tikus ini... Tapi dalam usaha kita untuk membersihkan tikus ini... ada pungutan-pungutan jang mau membakar rumah ini sama sekali. Ingin membersihkan tikus atau mau membasmi tikus, seluruh rumahnya dibakar.” Ia kemudian menegaskan pesan moral dari perumpamaan itu: *“Marilah kita bersama-sama mendjalaman rumah kita ini. Marilah kita djangan membakar rumah kita ini.¹⁴⁶”*

Dalam kalimat ini, metafora “rumah” melambangkan negara dan revolusi yang harus dijaga, sedangkan “tikus” melambangkan oknum yang terlibat dalam peristiwa 30 September.

¹⁴⁵ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

¹⁴⁶ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

Soekarno juga memperingatkan agar bangsa tidak terjebak dalam kebencian yang membutakan sehingga kehilangan arah revolusi. Ia berkata dengan tegas,

“Saja mendapat kesan, bahwa sebagai daripada bangsa kita ini bertjuma satu... kita berbuat, berfikir, bertindak demikian, kita kurang-kejang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan revolusi.¹⁴⁷”

Di sini ia menolak logika balas dendam massal yang mulai mengemuka di berbagai daerah.

Bagian paling penting dari pidato ini adalah peringatan Soekarno bahwa revolusi Indonesia berpotensi “menjeret keanan” — yaitu bergeser ke kanan, menjauh dari prinsip sosialisme dan keadilan sosial. *“Revolusi kita adalah revolusi kiri, kiri dari apa? Pantjasila op ederwise is al kiri! Apalagi djalan kita memperkatakan sila daripada Pantjasila, keadilan sosial. Maka dengan tegas dan djelas saja katakan, bahwa revolusi kita adalah revolusi kiri.”* Ia lalu menegaskan kekhawatiran terbesarnya: *“Kalau kita tidak waspada, revolusi ini menjeret keanan... itulah malapetaka jang besar sebesar-besarnya, lebih besar daripada kedjadian 30 September sendiri.”*

Dalam konteks itu, Soekarno memanggil para pemimpin partai untuk tetap berpegang pada orientasi kiri revolucioner dan tidak menumpahkan energi pada konflik ideologis yang memperuncing perpecahan. Ia menegaskan bahwa *“revolusi kita ini, revolusi kiri,”* dan bahwa nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) tetap menjadi “roman

¹⁴⁷ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

muka” dari revolusi Indonesia. Ia menjelaskan: “Nas dan A dan Kom mengisi inti daripada ini revolusi kita. Revolusi kita nasional revolusi Partjemuka. Revolusi nasional, revolusi politik, revolusi ekonomi, revolusi sosial, revolusi kultur, bahkan revolusi pendjelasan menesis Sana Indonesia.”

Dalam bagian lain, Soekarno mengkritik mereka yang memanfaatkan peristiwa G30S untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ia mencontohkan bagaimana seseorang yang berambisi menjadi direktur perusahaan menggunakan tuduhan keterlibatan dalam peristiwa itu untuk menjatuhkan pesaingnya. Ia juga menyenggung perebutan kekuasaan pribadi dan romantika kecil yang dimanipulasi untuk keuntungan tertentu. “Beginu ini 30 september terjadi, si A jang kahlungan patjar itu mengenal pengenal, bahwa si B tersangkut 30 september. Satu tjontoh pemunggangan lagi.”

Dalam segmen berikutnya, Soekarno mengarahkan kritiknya kepada intervensi asing, terutama Amerika Serikat dan CIA, yang ia tuduh ingin melemahkan Indonesia. “Segala uasha daripada Kekolla den CIA harus kita emesi. Sebab Kekolla den CIA sonden geen Kekolla en CIA syn, kalau mereka tidak berusaha untuk menghartiyukan kita, mengjian kita, mentjabarkan kita.” Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh “dirangganggu” tanpa disadari, seraya memperingatkan agar tidak termakan propaganda luar negeri.

Sebagai penutup, Soekarno meminta kesetiaan penuh dari para pemimpin partai terhadap dirinya dan terhadap komando revolusi.

“Saja minta saudara-saudara semuanja punja berdiri tegak dibelakang saja... Disini saudara-saudara benar-benar berdiri dibelakang saja, taat kepada saja, setia kepada saja, djalankan printah saja.” Ia menekankan bahwa kesatuan di bawah kepemimpinannya adalah syarat utama untuk menyelamatkan negara dari kekacauan. *“Djalankan komando saja! Taatilah saja, djangan diingkari kepada saja. Semua komando saja, djalankan!”*¹⁴⁸

Pidato ini, jika dibaca secara utuh, memperlihatkan Soekarno sebagai seorang pemimpin yang berusaha mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan politik, keutuhan negara, dan semangat revolusi di tengah tekanan besar dari militer dan kekuatan anti-komunis. Ia mencoba menegakkan kendali moral atas bangsa yang terancam terbakar oleh kemarahan dan dendam. Dengan menutup pidatonya dengan seruan kesetiaan kepada “Pimpinan Besar Revolusi,” Soekarno menegaskan bahwa di tengah situasi yang goyah, kesatuan ideologis dan kepemimpinan adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar “rumah revolusi” tidak ikut terbakar bersama tikus-tikus di dalamnya.

Pidato Soekarno pada 27 Oktober 1965 kepada para pemimpin partai politik menunjukkan perpaduan kuat antara ethos, logos, dan pathos dalam upaya mempertahankan legitimasi kepemimpinan serta arah ideologis revolusi pasca peristiwa 30 September. Unsur ethos terlihat dari cara Soekarno menegaskan posisinya sebagai *Presiden* sekaligus *Pemimpin Besar Revolusi* yang memikul tanggung jawab moral dan politik atas keselamatan bangsa. Ia menyebut dirinya sebagai “hakim tertinggi dan pimpinan negara dan revolusi,” yang berperan bukan sekadar penguasa,

¹⁴⁸ Soekarno, “Pidato kepada Pemimpin Tujuh Partai Politik,” Guest House Istana Presiden, 27 Oktober 1965, transkrip.

tetapi penjaga moral revolusi. *Ethos* ini dibangun melalui bahasa yang menampilkan kewibawaan rasional dan spiritual sekaligus: ia memerintahkan ketenangan dan menolak pembalasan emosional agar keadilan ditegakkan berdasarkan fakta. Dari sisi logos, struktur pidato Soekarno menunjukkan penalaran yang sistematis dan argumentatif. Ia menata pikirannya melalui metafora yang kuat seperti “rumah yang digerogoti tikus” untuk menjelaskan logika politiknya bahwa pemberantasan pengkhianat tidak boleh menghancurkan bangsa sendiri. Logika ini berfungsi untuk menahan euphoria kekerasan dan mengarahkan tindakan revolusi agar tetap berlandaskan prinsip rasional, bukan dendam atau propaganda.

Sementara itu, *pathos* menjadi unsur yang memperkuat daya emosional pidato ini. Soekarno menyalakan kesadaran nasional dengan memperingatkan bahaya besar jika revolusi “menjeret keanan,” yaitu bergeser dari cita-cita kiri dan keadilan sosial. Seruan seperti “*Marilah kita djangan membakar rumah kita ini*” menggugah rasa takut sekaligus tanggung jawab kolektif agar bangsa tidak menghancurkan dirinya sendiri. Ia juga memunculkan *pathos* nasionalisme dengan memperingatkan ancaman intervensi asing dan menegaskan kembali semangat *Nasakom* sebagai wajah ideologis revolusi Indonesia. Di bagian penutup, ketika Soekarno memerintahkan para pemimpin partai untuk “berdiri tegak di belakang saja,” unsur *ethos* dan *pathos* berpadu menjadi retorika persuasif yang membangun loyalitas emosional sekaligus legitimasi moral. Dengan

keseimbangan antara ketiganya, pidato ini berfungsi bukan hanya sebagai pembelaan politik, tetapi juga sebagai teks moral yang berupaya mengembalikan kesadaran bangsa agar tetap waras, bersatu, dan setia pada arah revolusi yang ia pandu.

C. Dampak Retorika Soekarno Melalui Pidato dalam Membangun Legitimasi Demokrasi Terpimpin

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, retorika Ir. Soekarno memainkan peran penting sebagai alat pembentukan, pemeliharaan, dan pemberian kekuasaan politiknya. Soekarno bukan hanya seorang orator ulung, melainkan juga seorang arsitek wacana yang menggunakan bahasa untuk mengatur persepsi publik dan memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin revolusi. Retorika baginya bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi merupakan medium ideologis untuk mengikat emosi rakyat, menggerakkan kesadaran nasional, serta meneguhkan dirinya sebagai figur yang tak terpisahkan dari kelangsungan revolusi Indonesia.

Kekuatan retorika Soekarno tampak dari kemampuannya menyatukan rasionalitas politik dengan daya simbolik yang membangkitkan emosi kolektif. Dalam setiap pidatonya, ia selalu memadukan pesan moral, visi ideologis, dan imaji kebangsaan dalam bentuk bahasa yang hidup dan penuh sugesti. Misalnya dalam pidatonya di hadapan wanita militer pada 19 April 1959, ia mengubah isu emansipasi perempuan menjadi bagian dari proyek besar revolusi nasional. Ketika ia berkata “Kita harus membangun masyarakat sosialis Indonesia,” Soekarno sesungguhnya sedang menanamkan gagasan bahwa kesejahteraan rakyat dan pembebasan perempuan hanya dapat dicapai melalui sistem sosial yang ia pimpin.

Pidato tersebut sekaligus menjadi instrumen legitimasi ide Demokrasi Terpimpin, di mana rakyat diarahkan untuk melihat kepemimpinan Soekarno sebagai pusat kendali yang sah bagi tercapainya cita-cita revolusi.

Dampak Dalam Ekonomi dan Politik Berdasarkan Analisis Membuat Gerak Ekonomi Lebih Normal dengan penyesuaian kekuatan pada masa Demokrasi Terpimpin, Bila dilihat pertumbuhan dan pembangun dari Masa Demokrasi Terpimpin sangat Tinggi di bandingkan Sebelumnya, Namun Walau begitu dampak ekonominya tidak selalu konsisten dengan demokrasi terpimpin itu juga ada dampak politik langsung yang mengarah pada Soekarno. Dari berbagai gerakan militer yang ingin menurunkan presiden soehato waktu itu.

Retorika serupa juga muncul dalam pidatonya kepada aparat hukum dan keamanan pada 27 Januari 1960. Soekarno menyebut perlunya “hukum revolusi” yang tegas dan berjiwa nasional. Ketika ia berkata, “Hukum jang berdjalan harus hukum revolusi. Hukum revolusi minta ketegasan, kekerasan dasar-dasar hukum jang lebih tadjam daripada jang dalam zaman normal,” ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang memahami hukum bukan hanya dalam kerangka legalistik, tetapi sebagai moral tertinggi revolusi. Melalui wacana ini, Soekarno mengukuhkan posisinya sebagai pemegang otoritas moral dan politik tertinggi di atas lembaga-lembaga negara.

Pidatonya pada pembukaan Seminar Hukum Nasional tahun 1963 semakin memperkuat posisi tersebut. Dalam pidato ini, Soekarno menegaskan bahwa “Revolution Indonesia menghendaki Umgestaltung daripada segala hal. Revolution rejects yesterday.” Kalimat itu mencerminkan keyakinannya bahwa semua tatanan

lama, termasuk hukum dan sistem pemerintahan, harus disesuaikan dengan arah revolusi yang ia pimpin. Dengan demikian, Soekarno membangun narasi bahwa legitimasi kekuasaannya bersumber bukan dari sistem parlementer atau konstitusional semata, melainkan dari kedudukannya sebagai penafsir tunggal makna revolusi.

Dalam pidato kader revolusi Angkatan Dwikora pada 31 Agustus 1964, Soekarno menampilkan retorika yang sangat kuat secara emosional. Ia menggambarkan kader sebagai “tulang-tulang hidup” revolusi dan menegaskan pentingnya disiplin ideologi serta loyalitas mutlak terhadap pimpinan. Ketika ia berkata “Revolusi adalah simfoni destruksi dan konstruksi,” Soekarno tidak hanya menegaskan visi revolusionernya, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai konduktor dari “simfoni” tersebut. Ia menjadi figur yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara kehancuran tatanan lama dan pembangunan tatanan baru. Retorika semacam ini efektif dalam menciptakan loyalitas dan meneguhkan mitos kepemimpinan karismatiknya.

Pada masa paling kritis setelah peristiwa 30 September 1965, retorika Soekarno beralih menjadi alat pertahanan kekuasaan. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin tujuh partai politik pada 27 Oktober 1965, ia menggunakan analogi “rumah dan tikus” untuk memperingatkan rakyat agar tidak menghancurkan negara sendiri dalam upaya membasmikan pengkhianat. Ia berkata, “Marilah kita bersama-sama mendjalamatan rumah kita ini. Marilah kita djangan membakar rumah kita ini.” Melalui perumpamaan sederhana namun sarat makna ini, Soekarno mengajak rakyat agar tidak terprovokasi oleh sentimen anti-komunis

yang membabi buta, sekaligus menegaskan dirinya sebagai satu-satunya figur yang dapat menengahi kekacauan politik.

Efek retorika semacam ini sangat besar terhadap legitimasi Soekarno sebagai pemimpin. Pertama, pidato-pidatonya mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa revolusi Indonesia adalah proses sejarah yang hanya bisa dijalankan melalui kepemimpinan tunggal yang kuat. Dengan mengidentikkan revolusi dengan dirinya sendiri, Soekarno berhasil menanamkan keyakinan bahwa menentang dirinya sama dengan menentang revolusi. Kedua, retorika Soekarno menciptakan integrasi emosional antara rakyat dan pemimpinnya. Penggunaan bahasa yang penuh daya dorong seperti “Saudara-saudara,” “revolusi,” dan “gotong royong” membangun kedekatan psikologis yang membuat rakyat merasa menjadi bagian langsung dari perjuangan nasional.

Ketiga, retorika Soekarno juga berfungsi sebagai benteng ideologis dalam menghadapi kekuatan politik yang berseberangan, baik dari kalangan militer maupun partai-partai. Ia menegaskan bahwa ideologi Nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme, adalah wajah revolusi Indonesia yang tak boleh dipisahkan. Dengan menegaskan bahwa “Revolusi kita berroman muka Nas, A, dan Kom,” Soekarno mencoba memelihara keseimbangan politik di tengah pertentangan ideologi yang tajam. Dalam hal ini, retorikanya bukan hanya alat persuasi, tetapi juga mekanisme kontrol sosial dan ideologis.

Namun demikian, efektivitas retorika Soekarno juga menghadapi batasnya. Setelah 1965, makna simbolik dari pidato-pidatonya mulai melemah di tengah kekuatan militer yang meningkat dan sentimen anti-komunis yang meluas.

Meskipun ia tetap berusaha memobilisasi rakyat melalui bahasa revolusi dan seruan kesetiaan, kekuatan retorikanya tidak lagi mampu mengimbangi perubahan struktur kekuasaan. Kendati demikian, dari perspektif historis, retorika Soekarno tetap menjadi salah satu pilar utama dalam membangun legitimasi karismatik seorang pemimpin nasional.

Analisis retorika Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin dapat dipahami lebih dalam melalui kerangka teori legitimasi Max Weber, yang membagi legitimasi kekuasaan menjadi tiga bentuk: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Soekarno dengan cermat menggabungkan ketiganya dalam retorikanya. Melalui bahasa revolusi dan simbol-simbol nasional seperti *Pancasila*, *gotong royong*, dan *revolusi*, ia menciptakan legitimasi karismatik, di mana ketiaatan rakyat bersumber dari keyakinan terhadap kepribadian dan visi pemimpinnya. Dalam pidato-pidatonya seperti pada Seminar Hukum Nasional (1963) dan penggembelangan Kader Revolusi Dwikora (1964) Soekarno menampilkan dirinya sebagai figur mesianik yang memahami kehendak rakyat dan menjadi penafsir tunggal arah revolusi. Ia juga mengembangkan bentuk legitimasi tradisional dengan mengaitkan nilai-nilai lama seperti persatuan dan gotong royong dalam struktur ideologinya, sehingga kekuasaannya tampak sebagai kelanjutan dari nilai-nilai luhur bangsa. Namun, Soekarno tidak sepenuhnya mengabaikan legitimasi rasional-legal; ia tetap merujuk pada dasar hukum negara seperti UUD 1945, namun selalu menempatkan hukum dalam bingkai moral revolusi yang ia pimpin.

Dalam praktiknya, teori Weber ini tampak jelas pada cara Soekarno menggunakan retorika karismatik untuk mengatasi krisis legitimasi politik. Ia tidak sekadar memerintah melalui hukum, tetapi melalui *keyakinan emosional* rakyat terhadap dirinya. Dalam pidato 27 Oktober 1965, misalnya, analogi “rumah dan tikus” bukan hanya metafora moral, tetapi strategi untuk meneguhkan otoritasnya sebagai “penyelamat revolusi” di tengah kekacauan pasca-G30S. Melalui perpaduan ethos, pathos, dan logos, Soekarno menegaskan dirinya sebagai sumber kebenaran politik dan moral: ethos terwujud dalam kredibilitasnya sebagai pemimpin revolusi, pathos dalam seruan emosional terhadap persatuan nasional, dan logos dalam argumentasi ideologis mengenai bahaya “revolusi yang menjeret keanan.” Dengan demikian, retorika Soekarno berfungsi bukan hanya sebagai komunikasi politik, tetapi sebagai mekanisme produksi legitimasi karismatik ala Weber di mana kekuasaan bertahan karena diyakini, bukan sekadar ditaati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah pidato Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), dapat disimpulkan bahwa retorika Soekarno berfungsi sebagai instrumen ideologis, moral, dan politis dalam membangun legitimasi kepemimpinan serta menanamkan kesadaran revolusioner di tengah rakyat Indonesia. Retorika tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi politik, melainkan juga menjadi alat pembentukan kesadaran kolektif dan arah ideologi bangsa. Melalui gaya bahasa yang emosional, simbolik, dan penuh imaji, Soekarno berhasil menggugah semangat kebangsaan dan solidaritas nasional.

Dalam berbagai pidatonya Soekarno menampilkan karakter retorika yang khas dan sarat makna. Ia menunjukkan gaya kepemimpinan yang karismatik dan humanis sebagaimana tergambar dalam pidato di hadapan wanita militer tahun 1959, di mana dirinya tampil sebagai figur pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pada saat yang sama, ia mengedepankan retorika ideologis dan revolusioner seperti dalam pidato kepada aparat hukum tahun 1960 serta seminar hukum nasional tahun 1963, di mana konsep hukum revolusioner dan nasionalisme ditegaskan sebagai poros utama pembangunan hukum bangsa. Retorika mobilisasi massa juga tampak kuat dalam pidato penggembangan kader Dwikora tahun 1964, ketika Soekarno menyerukan semangat keberanian dan tindakan total dalam menjalankan revolusi. Sementara itu, pada pidato tahun 1965 setelah peristiwa 30 September, retorika Soekarno beralih menjadi alat pertahanan legitimasi,

memperlihatkan upayanya untuk menjaga stabilitas dan arah revolusi di tengah situasi krisis nasional.

Retorika Soekarno membentuk citra kepemimpinan yang visioner, karismatik, dan berakar pada semangat nasionalisme-revolusioner. Melalui kekuatan bahasa dan simbol, ia mampu mempersatukan emosi, ideologi, serta kesadaran politik rakyat Indonesia. Dengan demikian, retorika Soekarno tidak hanya menjadi sarana komunikasi kekuasaan, tetapi juga manifestasi dari semangat revolusi dan perjuangan membangun bangsa dalam bingkai Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin Berdampak Signifikan pada kondisi politik Indonesia Waktu Itu, dilaht dari ketegangan PKI dan Militer yang semakin memburuk akibat perebutan Pengaruh di sekitar Presiden, Ketegangan ini Memuncak dengan terjadinya Gerakan 30 Desember 1965 yang menandai berakhirnya dominasi politik Soekarno dan akhirnya juga berdampak pada runtuhnya Demokrasi Terpimpin.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar kajian terhadap retorika Soekarno terus dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat menelusuri aspek linguistik, semiotik, dan psikologis dalam setiap pidato Soekarno guna mengungkap pola simbolik, struktur emosi, dan strategi komunikasi yang membentuk kesadaran politik rakyat. Kajian komparatif juga perlu dilakukan dengan menelaah gaya retorika tokoh-tokoh lain seperti Mohammad Hatta atau

Tan Malaka untuk memahami perbedaan paradigma komunikasi politik pada masa transisi demokrasi Indonesia.

Selain itu retorika Soekarno dapat dijadikan sumber inspirasi dalam pendidikan politik dan komunikasi publik masa kini. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan perlu menjadikan pidato-pidato Soekarno sebagai bahan refleksi bagi pembentukan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam retorika Soekarno, seperti semangat gotong royong, kemandirian, dan keberanian berpikir kritis, relevan untuk membangun generasi muda yang berkesadaran ideologis dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Dengan demikian, pemahaman terhadap retorika Soekarno tidak hanya penting secara historis, tetapi juga menjadi fondasi moral dan intelektual dalam menumbuhkan kepemimpinan yang visioner di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. Metode Penelitian Sejarah, 2003, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Agustina, E. (2019). *Soekarno, Nasakom, dan Buku Di Bawah Bendera Revolusi sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3, 1–10.
- Argenti, G. (2017). *Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14–14.
- Argenti, Gili, dan Dini Sri Istiningdias. “Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017).
- Arifin, Moh Arif. *Idham Chalid dan Perannya Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966* M. Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Aristoteles. *Retorika*. Diterjemahkan oleh Aris Munandar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Armia, M. S. (2017). *Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik*. *Jurnal Review Politik*, 7(1), 126–146.
- Asmara, N. S. (2016). *Konflik Ideologi Buruh Kereta Api Tahun 1949–1965*. Avatara: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Aurora, P. A. (2024, January). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Era Reformasi. In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (Vol. 4, No. 1).
- Batubara, U. N. (2019). *Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan–Reformasi*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 14–34.
- Damanik, K. I., Lubis, E., Siregar, T. R., Nilasari, I., Khairuddin, A., Mufti, N., ... & Ningsih, S. (2010). Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dayani, S. R., Rohayati, T., & Sujana, A. M. (2025). *Pemberontakan PRRI dan Per mestra: Ketegangan Politik di Awal Orde Lama (1957–1958)*. Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 441–454.

- Fajri, P. C. (2023). *Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959)*. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(2), 241–258.
- Fikry, A. (2020). Representasi Konsep Retorika Persuasif Aristoteles dalam Pidato Ismail Haniyah untuk Umat Islam Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 5(3), 137–145.
- Hamid, H. (2012). *Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)*. (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hanafi, F., & Ansorullah, A. (2021). *Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 431–448.
- Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2022). *Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia*. *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(2), 161–180.
- Hermayati, N. F. (2012). *Upaya Nasakomisasi TNI-AD dan Dampaknya pada Situasi Politik Indonesia Tahun 1960–1967*. (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Huda, N. M. (2014). *Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 203–226.
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 18(1), 53–62.
- Ismail, L., Regita, E., Yuniar, J., Umar, D. A., Fikri Subair, M. A., & Wijaya, A. I. (2024). *Pertarungan Ideologi: Konflik Politik dalam Dinamika Masyarakat Modern: Ideologi, Politik, Masyarakat*. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Ketut Sedana Arta. “Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966.” *Jurnal Candra Sangkala* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 1995, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latief, Z. M. (2002). *Kepemimpinan Soekarno Sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Perspektif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Kehidupan Perundang-undangan di Indonesia*. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 81–89.
- M. Al Qautsar Pratama, "Pengantar Ilmu Sejarah". KBM Indonesia, 2025

- Marbun, R. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 1(3), 5.
- Munsi, H. (2016). *Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis*. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 1(1).
- Nisvi, D. S., Fandik, A., Aisy, I. R., & Rettob, S. (2022). *Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI sebagai Syarat Masuk TNI*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(1), 42–58.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). Sejarah Nasional Indonesia (Vol. 6). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Purnama, A. (2024). Gaya Komunikasi Politik Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Pada Akun@ Pinterpolitik (Perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman) (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).
- Raben, R. E. M. C. O. (2011). *Bangsa, Daerah, dan Ambiguitas Modernitas di Indonesia Tahun 1950-an*. Dalam *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*.
- Ramli, M. I., & Sumiyatun, S. (2017). *Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)*. SwarnaDwipa, 1(3).
- rayogo, A. R. (2025). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan 1948–1949* (Tesis Doktor, SI–Sejarah Kebudayaan Islam UINSSC).
- Safitri, D. (2014). LINGUISTIK POLITIK DAN PERSUASI POLITIK “CAPRES BONEKA DALAM PERSPEKTIF DRAMATISTIK KENNETH BURKE”. Jakarta: Universitas Negri Jakarta.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). *Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila dalam Perspektif Konflik Ideologis*. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 4(2).

- Setyahadi, Mulyer Mananda. "Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)." *Jurnal Renaissance* 3, no. 1 (Mei 2018): 346–357.
- Sholehuddin, A. (2015). *Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965*. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(1).
- Sipayung, A. M. E. Implementasi Ideologi Marhenisme Dalam Sejarah Politik Hukum Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Tahun 1959-1965 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Sjamsuddin, Helius. Metodologi Sejarah, 2016, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soekarno. *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 1960–1965*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Solihah, M. A., Zanah, S. N., Wahyudi, R. D., Abiyasa, D. M., Sari, L. K., Liya, A., ... & Nurazahrah, P. Retorika dalam Kehidupan. Penerbit Adab.
- Supriatna, N. (2004). *Terbentuknya Identitas Kebangsaan pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Wibowo, E. Y. (2025). *Pertarungan Ideologi Petani: Studi Historis Konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) 1945–1960*. Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, 6(01), 59–72.
- Winata, L. (2017). *Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959–1965*. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(3).
- Wirahmat, H., & Alfiyani, N. (2022). *Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia*. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 2(2), 114–131.
- Wiratama, N. S., Budianto, A., & Sumarwoto, M. I. Z. I. (2022). *Pancasila dan Nasakom dalam Mempersatukan Bangsa Indonesia: (Kajian Kritis Sejarah Intelektual)*. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 2(2), 66–76.
- Yatim, Badri. Historiografi Islam, 1995, Jakarta: Logos
- Yuwono, Ardi Tri, dan Mustafa Basara. "Faktor Pendorong Nahdlatul Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno (1959-1965)." *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 399–416.

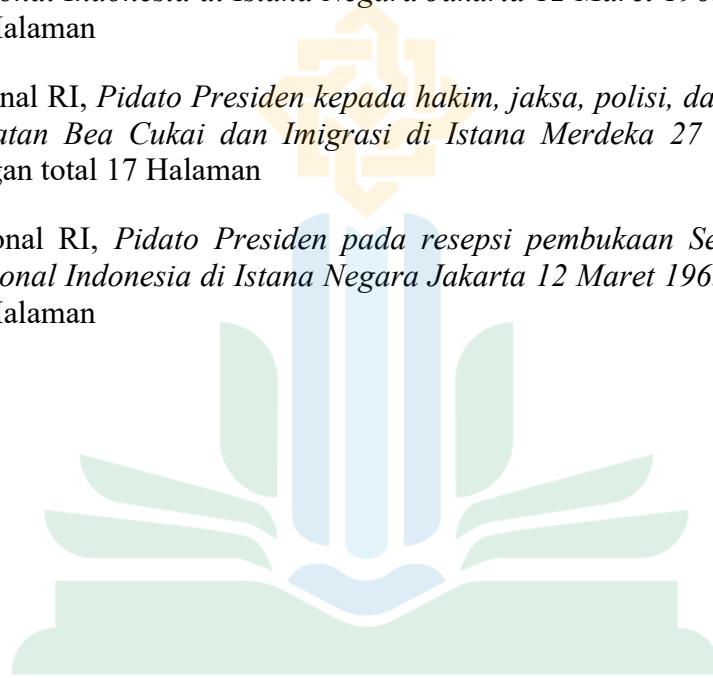
Zulkarnaini, S. (2024). TEKNIK RETORIKA DALAM PENGGUNAAN PATHOS, LOGOS, ETHOS DALAM VIDEO PIDATO JOKO WIDODO DI YOUTUBE. *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia*, 2(2), 74-81.

Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden Sukarno Mengenai Demokrasi Terpimpin Di Muka Krsus Atase Militer, Istana Negara 16 April 1959*, dengan total 16 Halaman

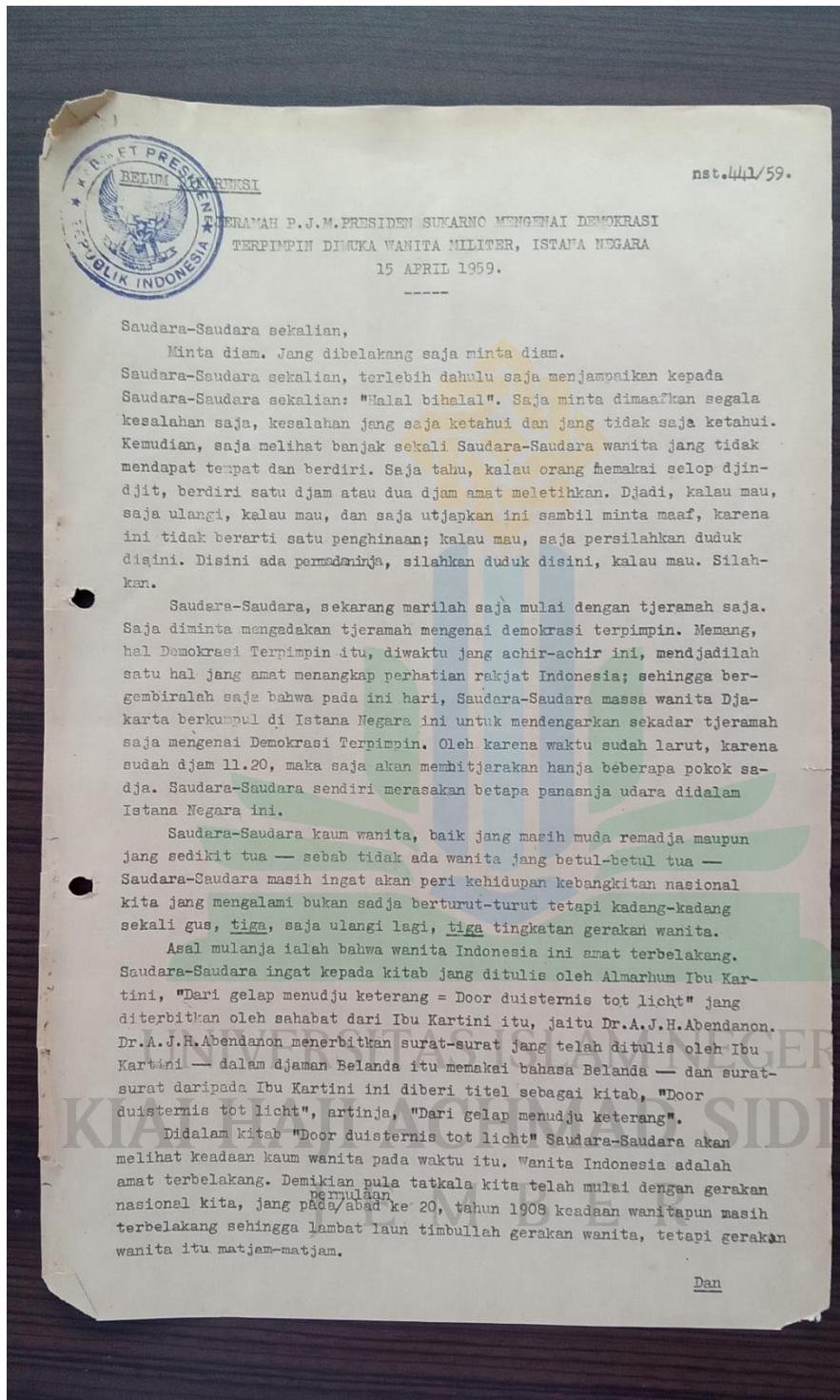
Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden pada resepsi pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara Jakarta 12 Maret 1963*, dengan total 14 Halaman

Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka 27 Januari 1960*, dengan total 17 Halaman

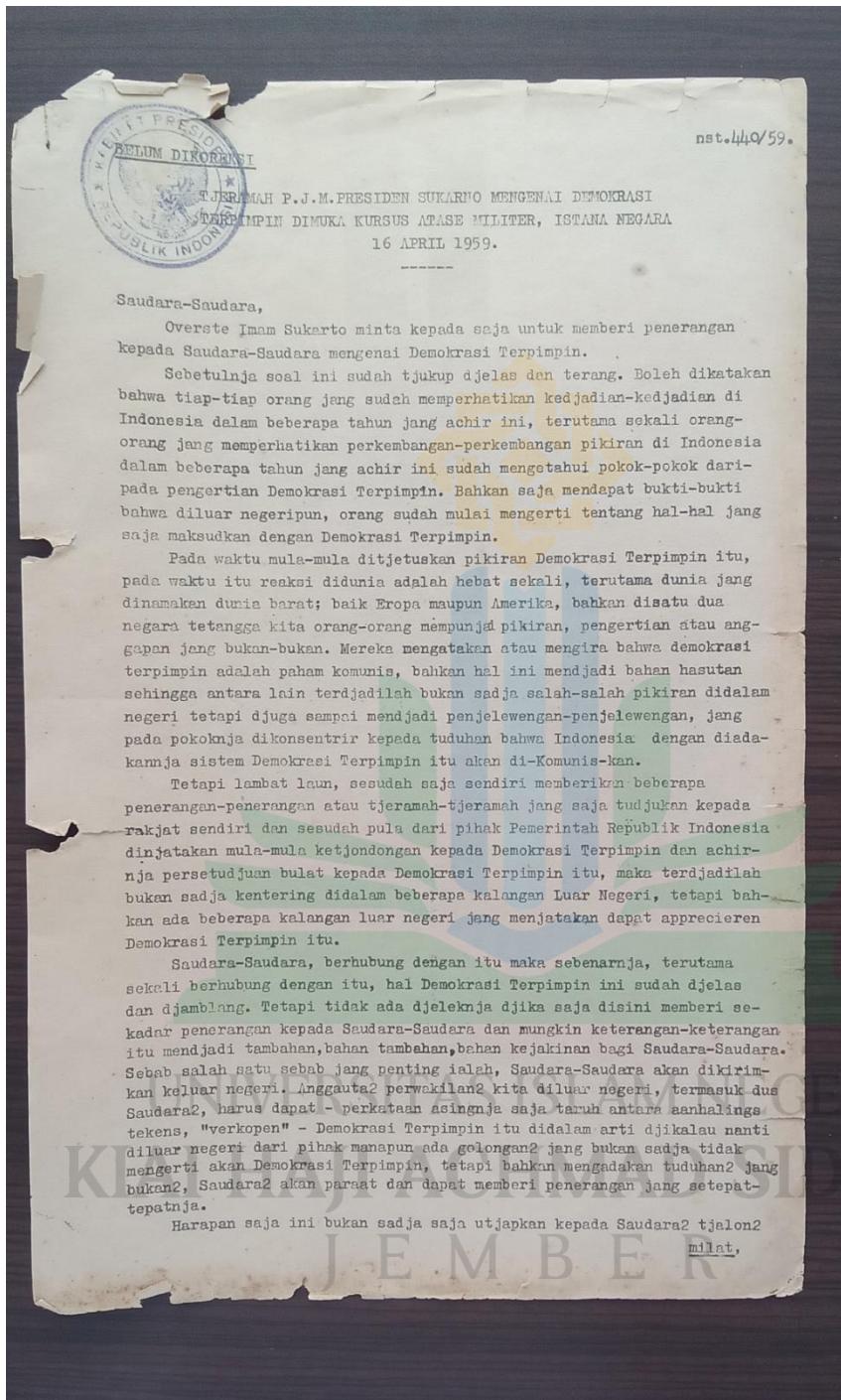
Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden pada resepsi pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara Jakarta 12 Maret 1963*, dengan total 14 Halaman



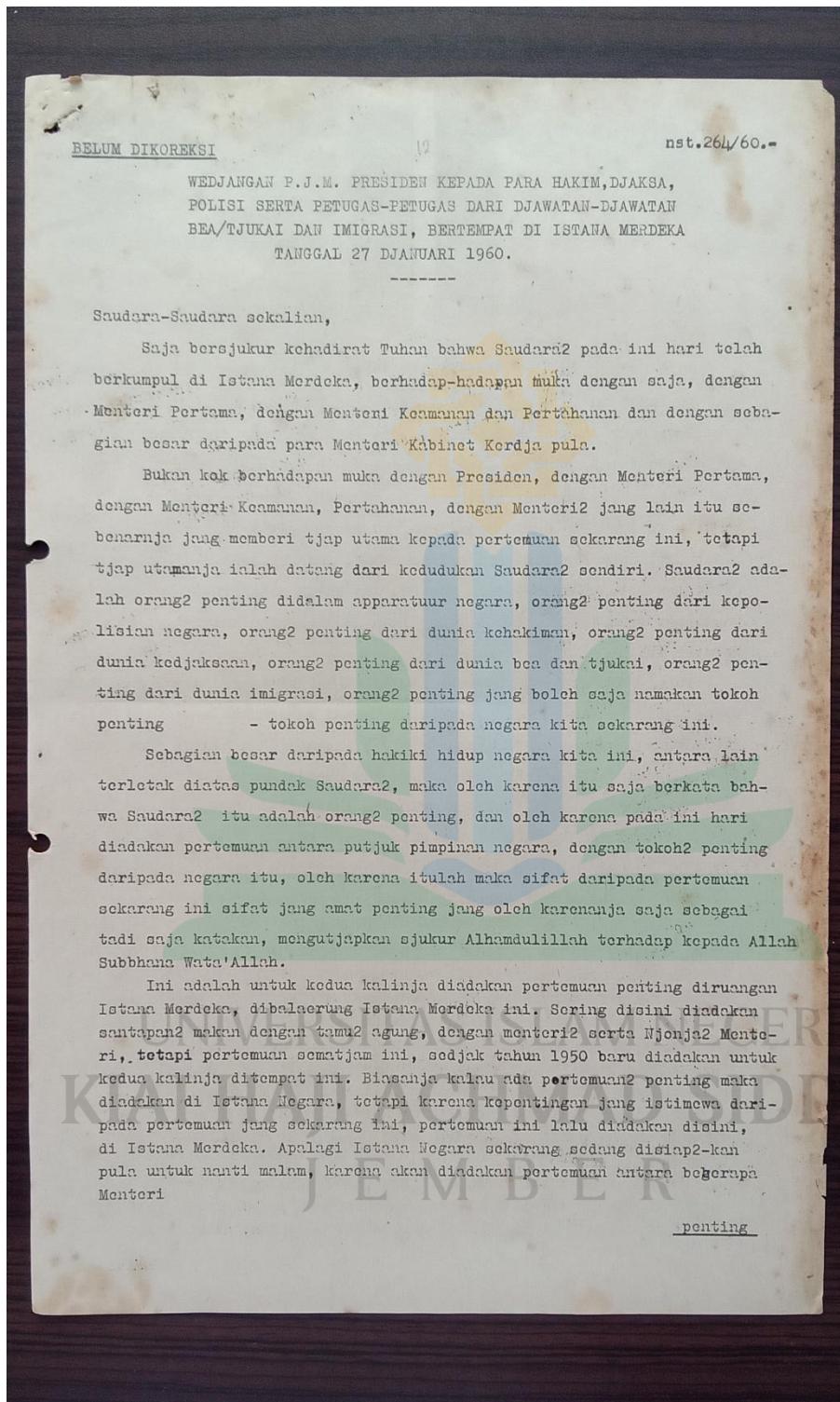
LAMPIRAN-LAMPIRAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



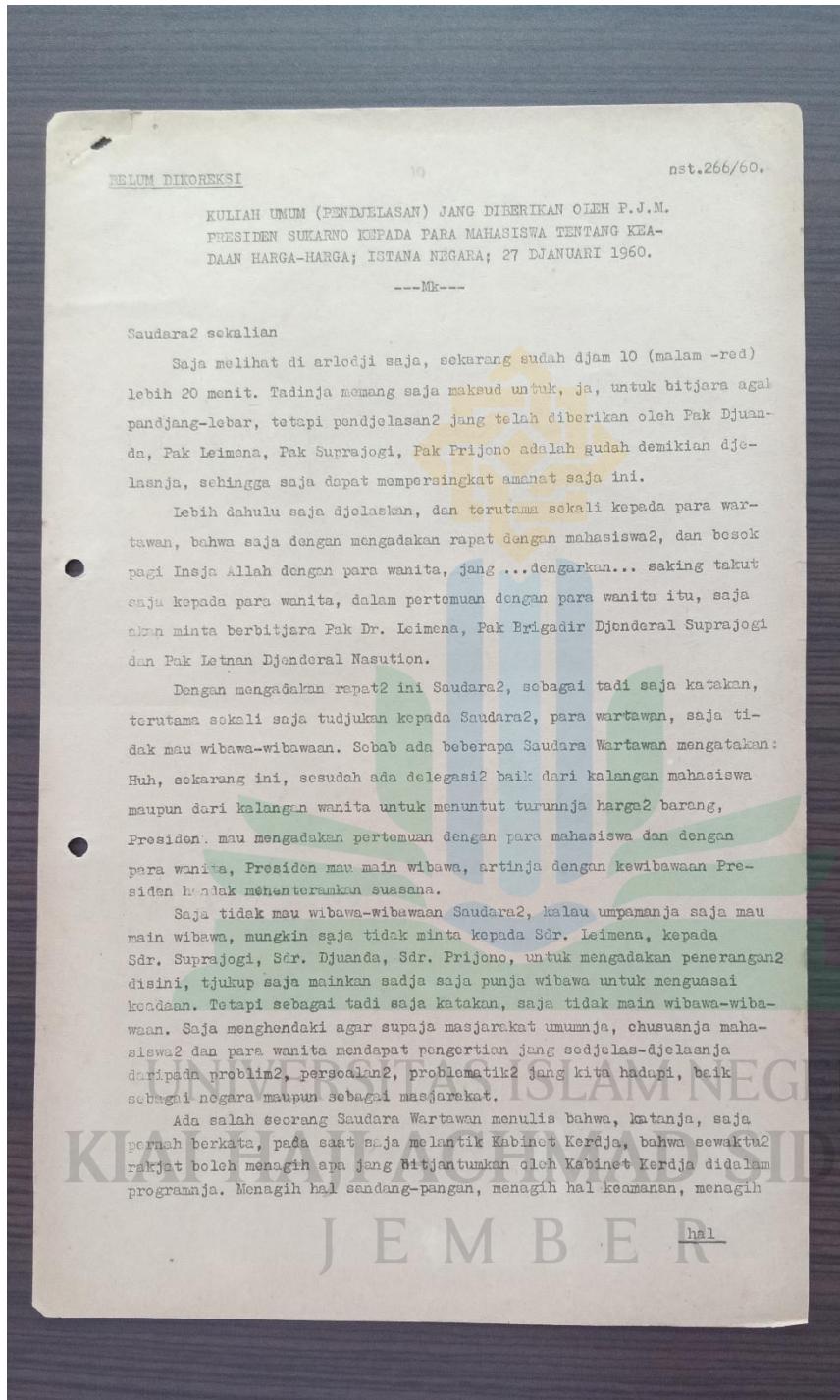
Sumber: Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin di muka wanita militer di Istana Negara 19 April 1959*, dengan 16 Halaman



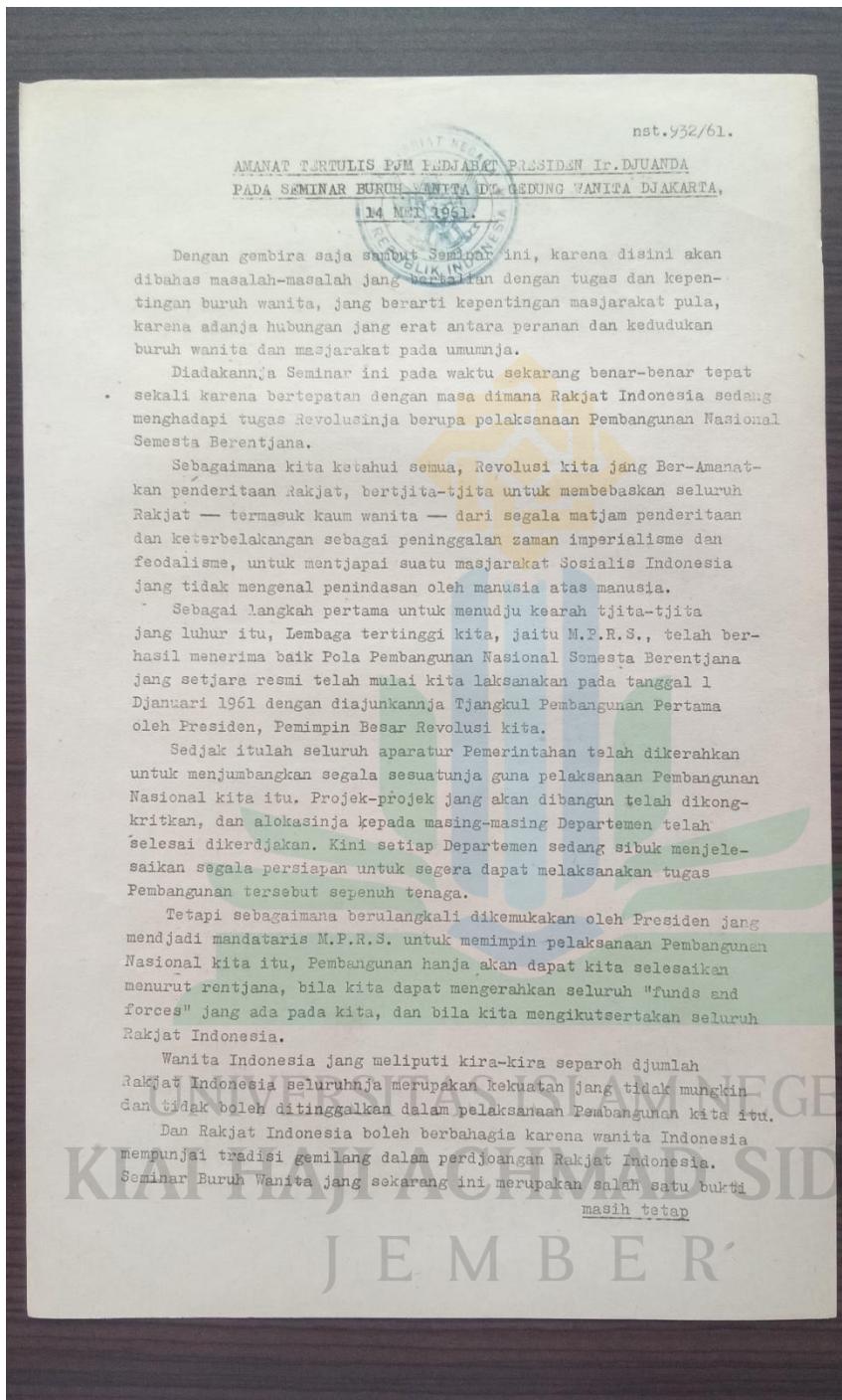
Sumber: Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden Sukarno Mengenai Demokrasi Terpimpin Di Muka Krsus Atase Militer, Istana Negara 16 April 1959*, dengan total 16 Halaman



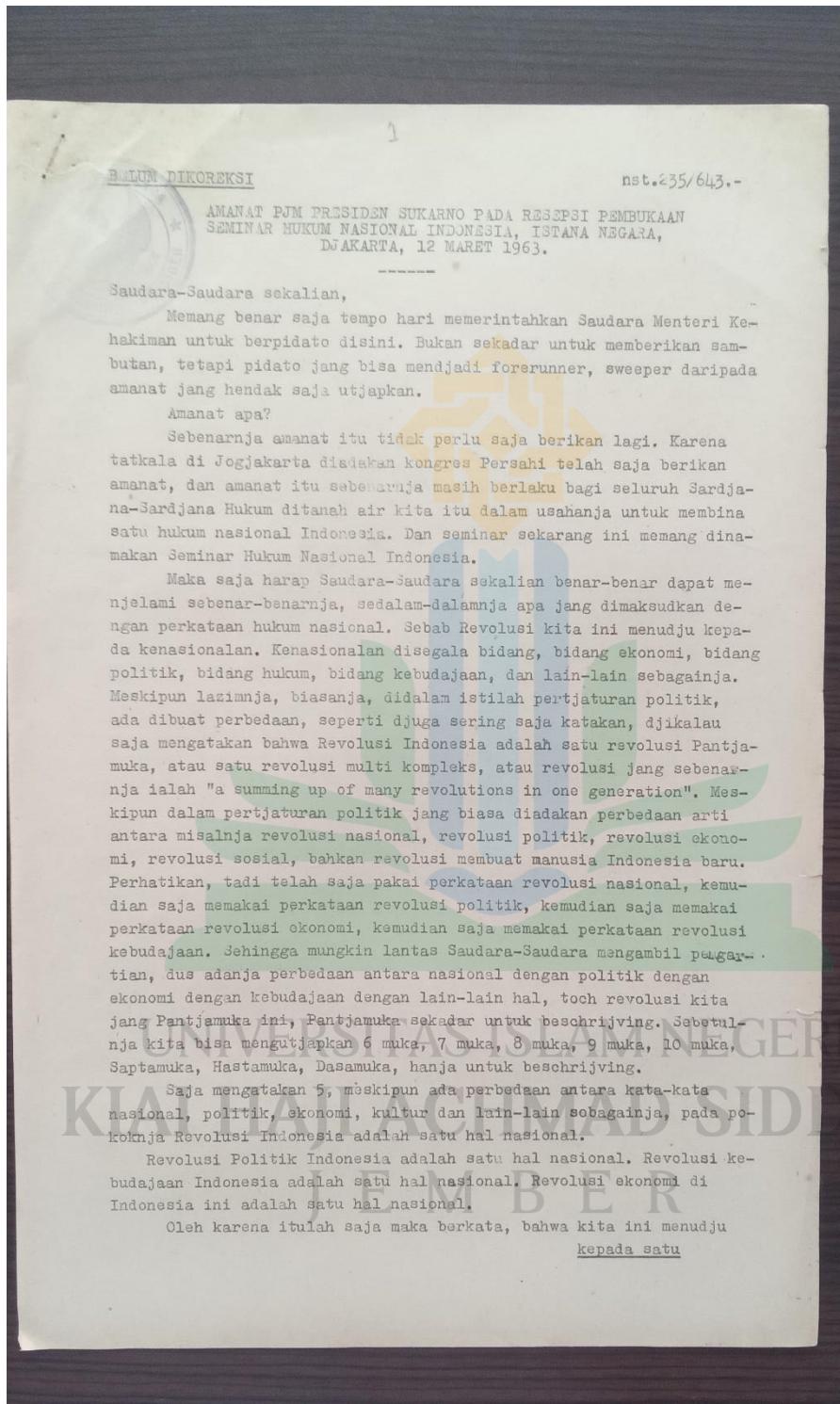
Sumber :Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas
 dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka 27 Januari 1960*, dengan total
 17 Halaman



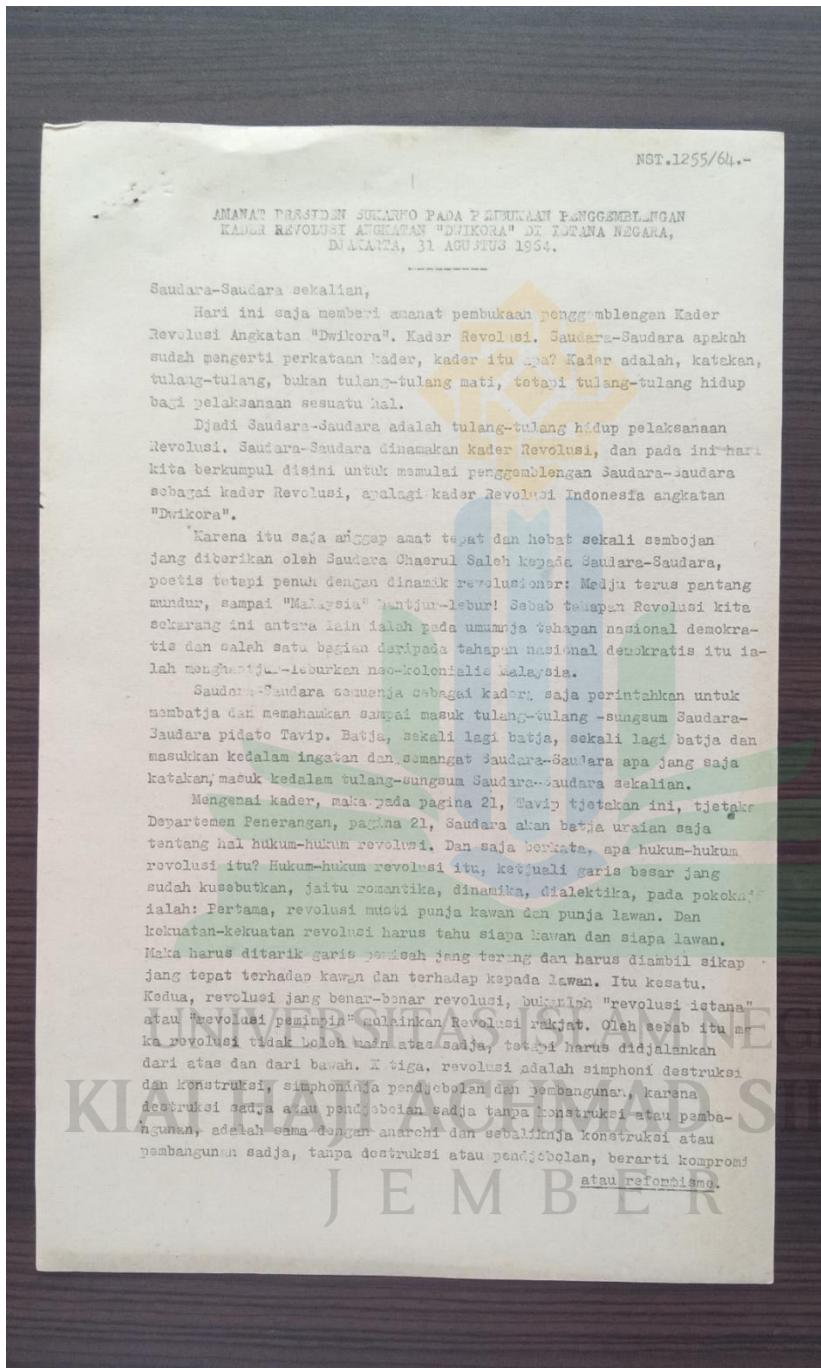
Sumber :Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka 27 Januari 1960*, dengan total 11 Halaman



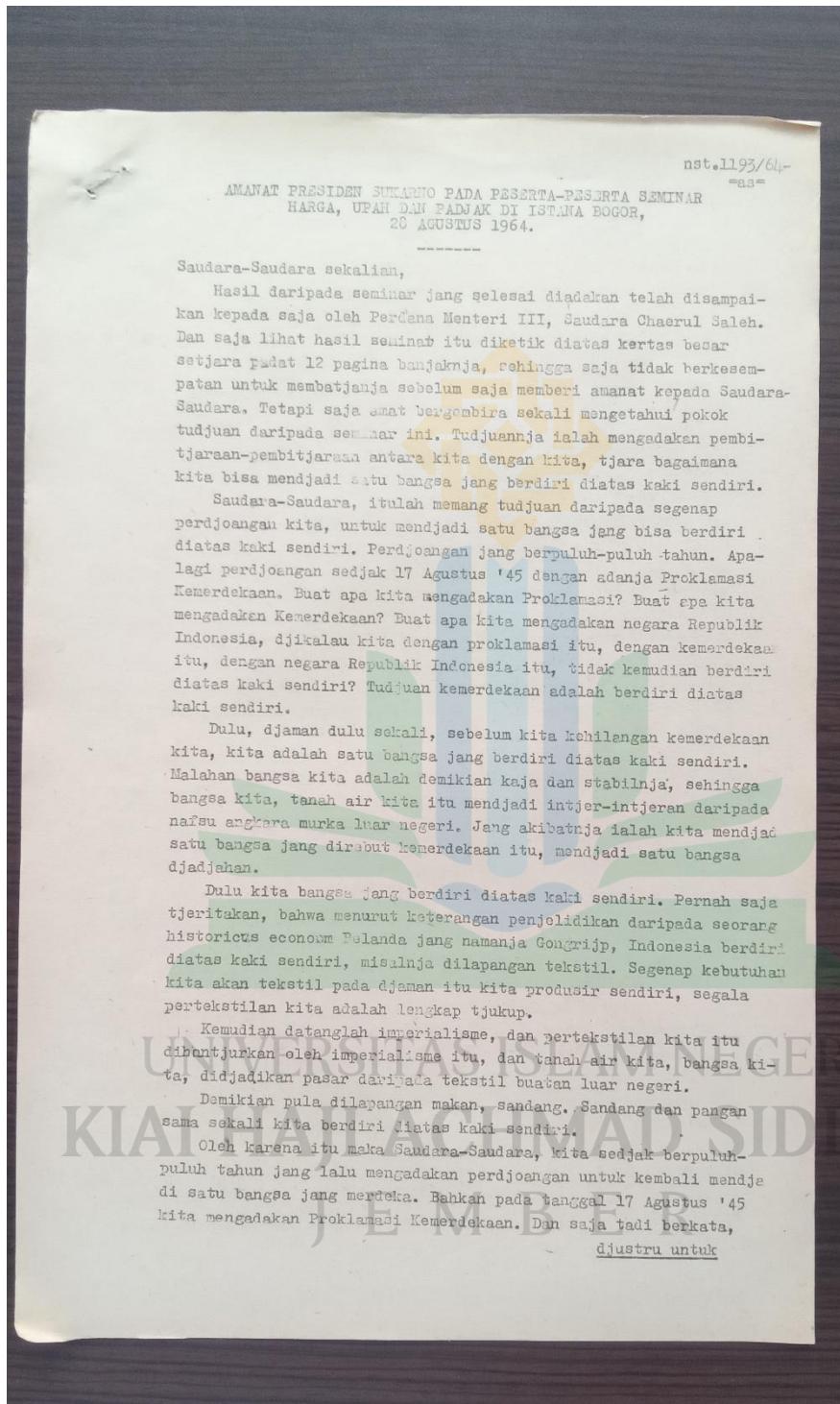
Sumber: Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi di Istana Merdeka 27 Januari 1960*, dengan total 3 Halaman



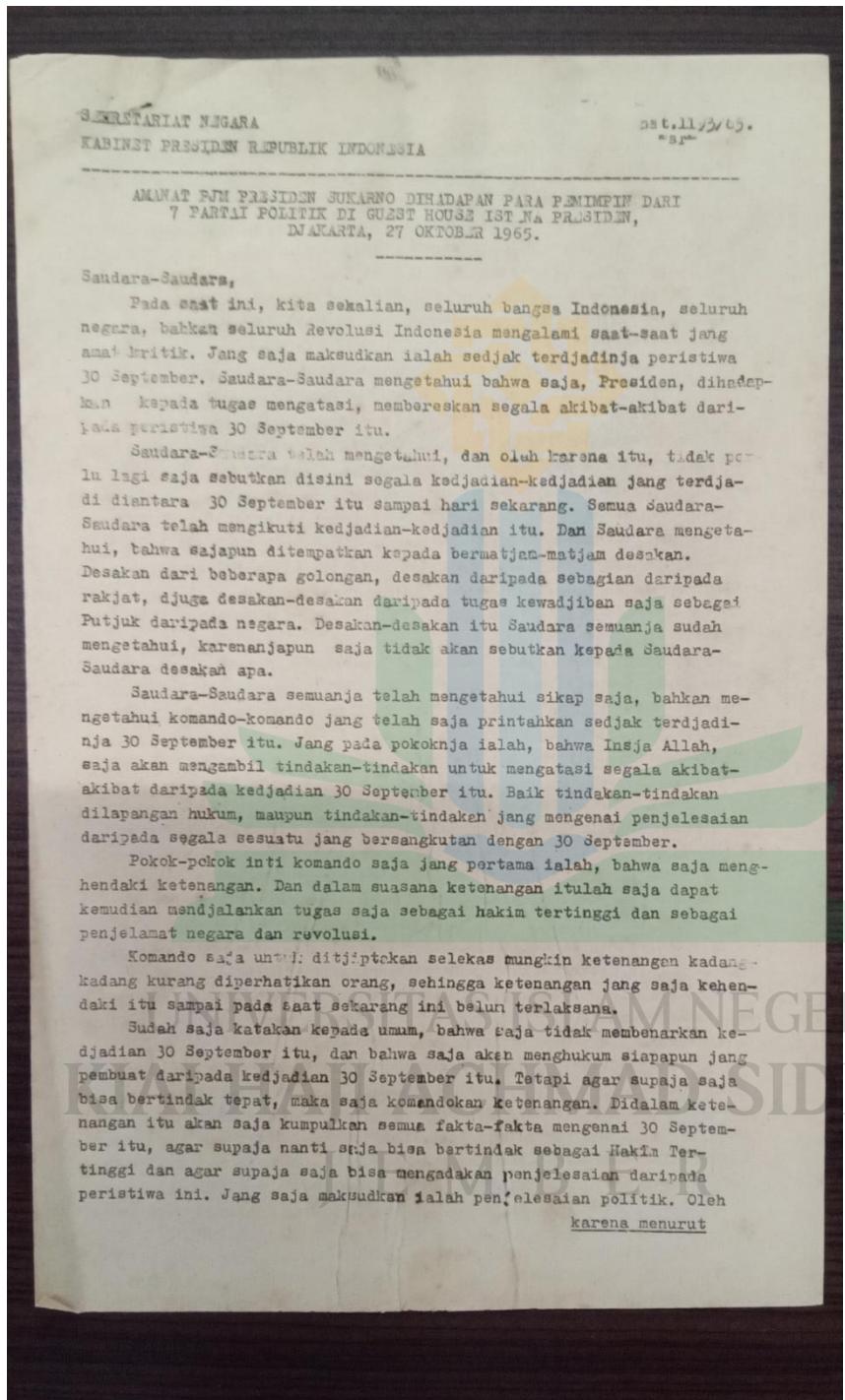
Sumber : Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden pada resepsi pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara Jakarta 12 Maret 1963*, dengan total 14 Halaman



Sumber : Arsip Nasional RI, *Pidato Presiden pada pembukaan penggembangan kader revolusioner Angkatan Dwikora di Istana Negara Jakarta 31 Agustus 1964*, dengan total 14 Halaman



Sumber : Arsip Nasional RI, Amanat Presiden Sukarno Pada Peserta-peserta Seminar Harga, Upah dan Padjak Di Istana Bogor 28 Agustus 1964, dengan total 4 Halaman



Sumber : Arsip Nasional RI, Pidato Presiden kepada para pemimpin dari tujuh partai politik di Guest House Istana Presiden Jakarta 27 Oktober 1965 dengan 10 Halama

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ardian Widi
NIM : 212104040031
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 18 November 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Ardian Widi
212104040031

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Muhammad Ardian Widi |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jember, 11 November 2003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Alamat | : RT.001 RW.009 Jln. Sukosari Desa Tamanrejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. |

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Al-Iqrom
2. SD/MI : SD Sukorejo 02
3. SMP/MTs : SMP Adz-Dzakirin
4. SMA/SMK/MA : SMK Adz-Dzakirin

C. Pengalaman Organisasi

1. Pagar Nusa
2. IPNU Sukowono